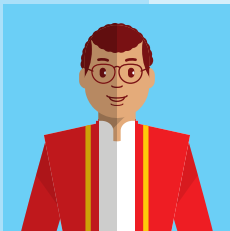






PENDUDUK SEBAGAI MODAL PEMBANGUNAN

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Jakarta - 2018



KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkah dan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan buku “Penduduk sebagai Modal Pembangunan”. Buku ini disusun untuk memberikan informasi mengenai perkembangan kependudukan di Indonesia, kerangka pembangunan kependudukan, serta tantangan dan kebijakan optimalisasi bonus demografi untuk meraih masa depan yang diinginkan.

Perubahan struktur penduduk memungkinkan terciptanya bonus demografi. Bonus demografi bisa dimanfaatkan agar berdampak luas pada pertumbuhan ekonomi dan bersifat jangka panjang, di antaranya melalui investasi sumber daya manusia yang berkualitas dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut serta mempertimbangkan variasi transisi demografi di tingkat daerah dan pertumbuhan penduduk lanjut usia (*population aging*), kebijakan harus diarahkan dengan tepat untuk meraih bonus demografi.



Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasi dalam penyusunan buku ini. Buku ini disusun untuk menjadi pegangan pemerintah pusat dan daerah, serta dapat menjadi rujukan bagi dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, maupun masyarakat luas.

Jakarta, 24 Agustus 2018

Prof. Bambang P.S. Brodjonegoro Ph.D

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas

RINGKASAN EKSEKUTIF



Perubahan struktur penduduk Indonesia yang cukup cepat tergambar dari hasil Survey Penduduk Antar-Sensus 2015. Di lain sisi, UN *Population Projection 2017 Revision* juga memperlihatkan perubahan struktur umur penduduk antar wilayah di dunia terjadi dengan kecepatan yang berbeda. Diperkirakan, pertumbuhan penduduk dunia pada 2050 akan kurang dari 0,2% per tahun. Pada periode yang sama, penuaan penduduk juga terjadi dengan cepat di berbagai wilayah. Gambaran tersebut mendorong perlunya pemutakhiran data penduduk ke depan harus dilakukan untuk menjadi rujukan pemerintah dalam merencanakan pembangunan.

Berdasarkan hasil proyeksi dengan menggunakan SUPAS 2015, penduduk Indonesia diperkirakan pada tahun 2045 berkisar antara 311 – 318,9 juta. Pertama, apabila jumlah anak dibiarkan terus menurun dan mencapai di bawah 2 maka total penduduk menjadi sekitar 311 Juta. Kedua, apabila jumlah anak dapat dipertahankan sekitar 2, jumlah penduduk diperkirakan berkisar pada 318,9 Juta. Migrasi internasional terjadi 2-3 juta penduduk muda (15-29 tahun) setiap tahun dan persentase penduduk lansia (60+) sebesar 19,85% pada tahun 2045. Indonesia perlu menjaga pertumbuhan penduduk agar seimbang dalam waktu yang panjang. Dalam hal ini, pemerintah perlu membuat strategi baik dalam menjaga kuantitas maupun kualitas penduduk.



Pertumbuhan penduduk yang seimbang dapat ditandai antara lain oleh dua indikator. Pertama adalah pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk dalam jangka panjang perlu dijaga untuk tidak mencapai negatif. Menurut pengalaman negara maju yang telah mengalami penuaan dengan jumlah anak yang sedikit, pertumbuhan mereka sudah mencapai negatif, seperti halnya Korea Selatan. Sementara negara maju lain sudah sangat bergantung pada pendatang untuk menjalankan roda ekonomi. Dengan menjaga jumlah anak pada tingkat *replacement rate*, pertumbuhan penduduk dapat dijaga stabil.

Kedua, *fiscal support ratio* yang menggambarkan kemampuan pemerintah untuk membiayai program pemerintah yang dibiayai oleh sumber pendapatan pajak. Indikator ini sangat dipengaruhi oleh pergerakan struktur penduduk. Untuk menjaga kesinambungan program pemerintah, kebijakan kependudukan harus dapat menopang keseimbangan fiskal dalam jangka panjang. Melalui kebijakan menjaga jumlah anak pada *replacement rate*, *fiscal support ratio* terjaga dengan baik dalam jangka panjang.



Sementara itu, apabila jumlah anak terus menurun, jumlah penduduk usia muda akan berkurang dan penduduk akan mengalami penuaan. Melalui skenario ini, *fiscal support ratio* diperkirakan akan mulai mengalami penurunan pada tahun 2030 akhir. Untuk itu, pertimbangan dalam kebijakan kependudukan akan sangat mempengaruhi masa depan Indonesia.



Penduduk merupakan sumber utama pertumbuhan ekonomi yang dapat berperan, baik sebagai pelaku aktif maupun objek pembangunan. Perubahan struktur umur penduduk akan mendorong Indonesia memasuki era “bonus demografi” dengan tumbuhnya penduduk usia produktif. Perubahan struktur penduduk di Indonesia membawa Indonesia menjadi negara dengan jumlah usia produktif yang paling besar di wilayah Asia Tenggara. Dalam jangka panjang, hal tersebut akan mempengaruhi pola konsumsi maupun produktivitas yang akhirnya dapat memberikan pengaruh yang lebih permanen terhadap ekonomi nasional.

Untuk itu, diperlukan upaya yang efektif dalam pemanfaatan bonus demografi. Pendekatan siklus hidup menjadi pilihan karena setiap manusia akan mengalami fase prenatal, neonatal, *infant*, *early childhood*, anak, remaja, dewasa, dan lansia. Pencetakan generasi muda yang sehat dan cerdas akan mendorong mereka beranjak menjadi remaja aktif dan produktif. Selanjutnya, akan tercipta tenaga kerja yang berdaya saing dan produktif. Pada akhirnya, persiapan yang optimal akan menciptakan lansia yang sehat dan produktif.

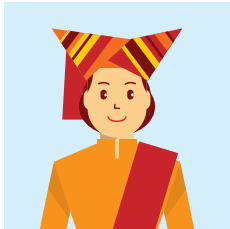
Investasi sumber daya manusia akan dilakukan melalui perluasan pendidikan menengah menyeluruh. Akses dan kualitas pendidikan tinggi ditingkatkan. Di lain sisi, peningkatan investasi didukung dengan pengembangan produk tabungan, deposit, saham, dan jenis investasi jangka panjang lainnya. Hal ini semua akan berjalan dengan baik dengan stabilitas politik dan ekonomi, sistem perbankan dan investasi yang mumpuni, serta sistem pensiun yang berkesinambungan.



“Indonesia perlu menjaga
pertumbuhan penduduk
agar seimbang dalam
waktu yang panjang”

Ir. Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia,
Sidang Kabinet Visi Indonesia 2045,
30 Mei 2017

DAFTAR ISI



1 PENDUDUK INDONESIA3

- a. Penurunan Jumlah Anak dan Peningkatan Kesehatan4
- b. Variasi Antar Provinsi6
- c. Pertumbuhan Penduduk8
- d. Ageing Population9
- e. Kualitas Penduduk Indonesia9
- f. Mobilitas dan Distribusi Penduduk11

2 KERANGKA PEMBANGUNAN DATA KEPENDUDUKAN17

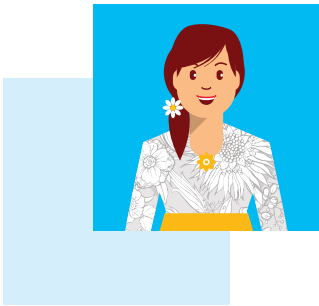
- a. Penduduk Sebagai Penentu Pertumbuhan Ekonomi17
- b. Data Kependudukan dan Indikator19

3 MASA DEPAN YANG DIINGINKAN23

- a. Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang23
- b. Proyeksi Penduduk24
- c. Hasil Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-204529
- d. Perkembangan Struktur Penduduk28

4 TANTANGAN DAN KEBIJAKAN OPTIMALISASI BONUS DEMOGRAFI41

- a. Periode Bonus Demografi41
- b. Bonus Demografi Provinsi47
- c. Strategi Utama Untuk Memetik dan Memperpanjang Bonus Demografi50





1 PENDUDUK INDONESIA



BAGIAN 1

PENDUDUK
INDONESIA

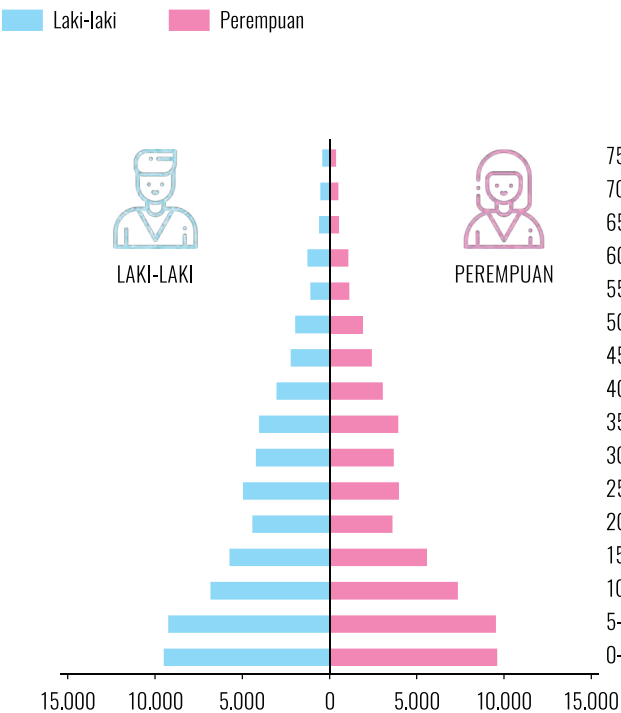


Struktur penduduk Indonesia saat ini masih relatif muda dibandingkan beberapa negara tetangga seperti Thailand, Malaysia, dan Singapura. Jumlah penduduk menurut SUPAS 2015 adalah sebesar 255,1 juta orang. Jumlah tersebut telah bertambah lebih dari 2 kali dibandingkan jumlah penduduk pada awal 1970. Kondisi kependudukan dalam empat puluh tahun terakhir, selain menyangkut jumlah, telah berkembang secara cepat dari sisi struktur maupun kualitas. Meskipun penduduk Indonesia masih relatif muda, komposisi penduduk sudah berubah secara signifikan. Struktur penduduk pada tahun 2015 ditandai dengan dominasi penduduk usia produktif, dengan disertai pertumbuhan penduduk usia muda yang masih relatif tinggi. Dalam empat dasawarsa tersebut jumlah penduduk usia produktif 15-59 bertambah sekitar seratus juta orang atau hampir tiga kali lipat, lebih cepat dari pertumbuhan penduduk secara umum.

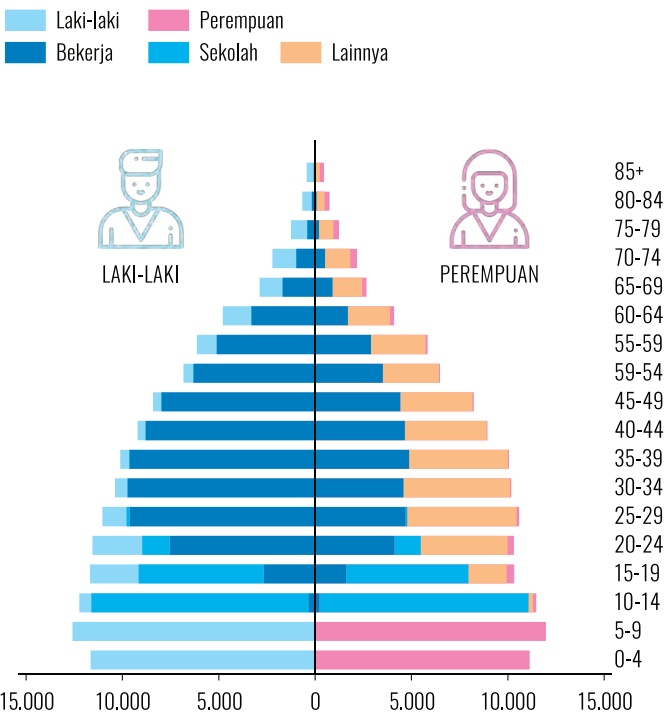
2X Peningkatan jumlah penduduk sejak tahun 1970 sampai 2015

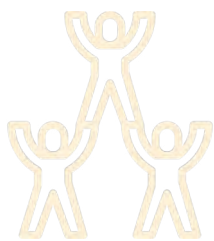
3X Laju pertumbuhan usia produktif 15-59 tahun dalam 40 tahun.

Piramida Penduduk Tahun 1971



Piramida Penduduk Tahun 2015



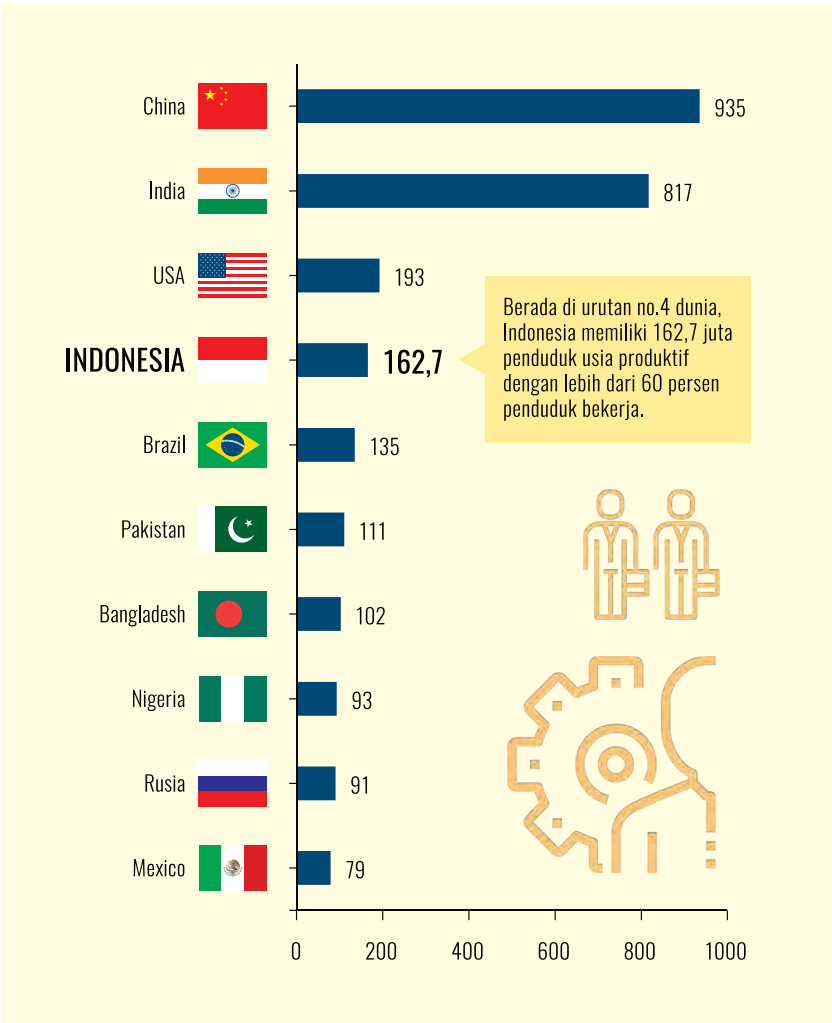


Proporsi penduduk usia produktif juga mengalami perkembangan yang pesat, dimana sebelumnya hanya 53% dari total penduduk. Pada tahun 2015, penduduk usia produktif mencakup sekitar 63,8% dari total penduduk, dengan jumlah sekitar 162,7 juta orang. Di antara 162,7 juta penduduk usia produktif tersebut, lebih dari 60 persen penduduk bekerja. Dengan penduduk usia produktif sebesar itu, Indonesia berpotensi untuk menjadi negara dengan kekuatan ekonomi yang cukup penting, bukan saja di wilayah Asia Tenggara, tetapi juga di dunia. Saat ini, Indonesia menduduki negara keempat dengan jumlah penduduk usia produktif terbesar setelah China, India, dan Amerika Serikat.

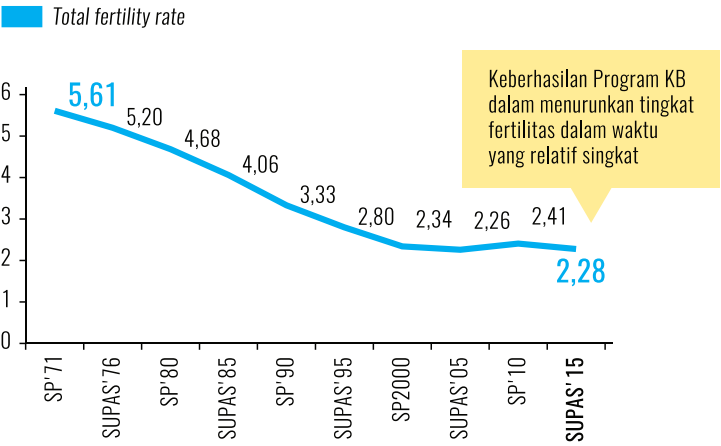
A. PENURUNAN JUMLAH ANAK DAN PENINGKATAN KESEHATAN

Perubahan struktur penduduk yang cepat disebabkan oleh penurunan tingkat fertilitas dan mortalitas yang pesat pada periode 1970-1990. Indonesia telah melakukan upaya pengendalian angka kelahiran melalui Program Keluarga Berencana (KB) sejak era 1970-an. Pada tahun 1971 tingkat fertilitas sebesar 5,61. Program KB telah berhasil menurunkan jumlah anak per satu perempuan hampir setengahnya dalam waktu yang relatif singkat, dan akhirnya pada tahun 2015, tingkat fertilitas mencapai 2,28. Berdasarkan hasil tersebut, Program KB di Indonesia menjadi salah satu program *family planning* terbaik di dunia dan merupakan program perencanaan keluarga berbasis komunitas terbesar di dunia.

10 Negara dengan Penduduk Usia Produktif Terbesar, 2015



Penurunan Tingkat Fertilitas, 1971-2015



Dampak positif program KB secara nyata telah dirasakan. Beberapa studi menunjukkan bahwa pelaksanaan program KB memberikan dampak positif pada tiga hal pokok, yaitu:



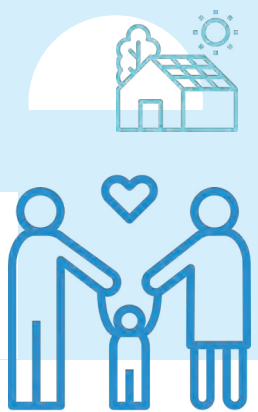
Secara umum, meningkatkan investasi peningkatan kualitas sumber daya manusia karena beban penduduk muda menjadi berkurang.



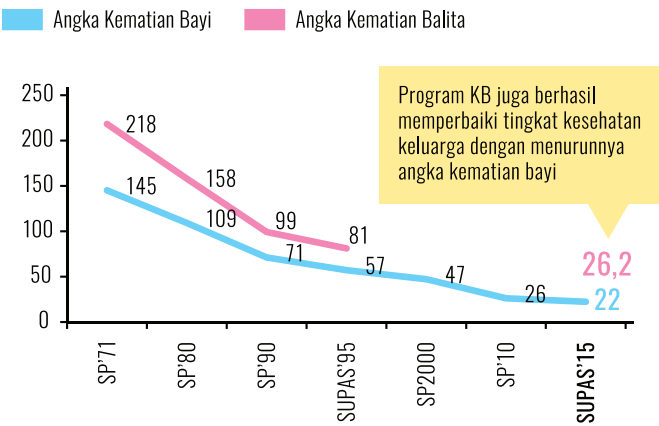
Secara khusus, meningkatkan kualitas hidup perempuan, keluarga dan masyarakat.



Meningkatkan produktivitas ekonomi yang tercermin dari peningkatan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan.



Angka Kematian Bayi, 1971-2015



Dampak positif program KB secara nyata telah dirasakan. Beberapa studi menunjukkan bahwa pelaksanaan program KB memberikan dampak positif pada tiga hal pokok, yaitu:

- (I) Secara umum, meningkatkan investasi peningkatan kualitas sumber daya manusia karena beban penduduk muda menjadi berkurang,
- (II) Secara khusus, meningkatkan kualitas hidup perempuan, keluarga dan masyarakat, dan
- (III) Meningkatkan produktivitas ekonomi yang tercermin dari peningkatan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan.

Program KB secara tidak langsung juga telah berhasil memperbaiki tingkat kesehatan dengan menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKBa). Pada tahun 2015 Angka AKB dan AKBa turun menjadi 22.23 dan 26.2.

Investasi di bidang KB merupakan intervensi yang paling *cost-effective* dan menunjukkan peran KB di dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan keamanan ekonomi perempuan, keluarga, dan masyarakat. Selain itu, manfaat KB tidak berhenti pada peningkatan kesehatan dan produktivitas perempuan/ibu saja, tetapi juga anak dan keluarganya. Jumlah anak yang lebih sedikit memungkinkan investasi pada pendidikan dan kesehatan anak yang lebih besar, pengasuhan anak dapat diberikan lebih optimal sehingga anak-anak yang lahir akan tumbuh menjadi generasi yang cerdas, produktif dan berkualitas. Generasi inilah yang akan menjadi Generasi Emas dan kekuatan bangsa Indonesia dalam perekonomian untuk terus maju dan mampu bersaing.

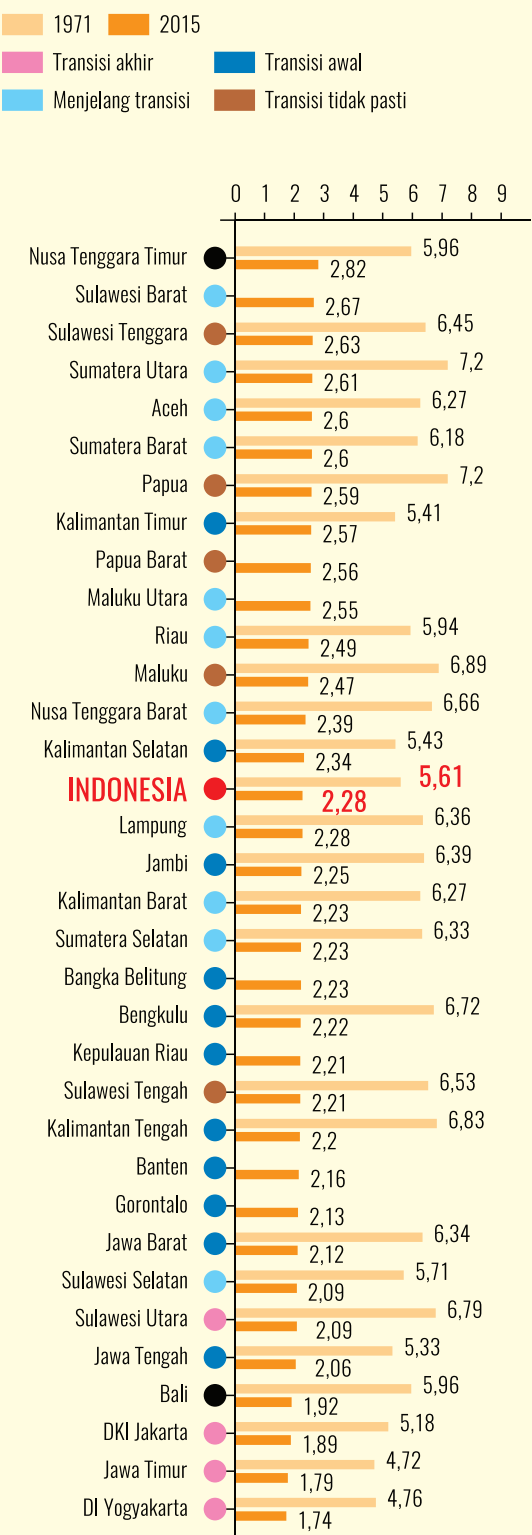
Peran Program KB (Keluarga Berencana) dalam Pembangunan

Sebagai program family planning terbaik dunia, yang terbukti efektif dalam proses pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan keluarga Indonesia.

Keluarga yang terencana dan sejahtera akan melahirkan generasi yang lebih terjamin dalam pengasuhan, kesehatan dan pendidikan.

Generasi yang lahir akan tumbuh menjadi lebih optimal sebagai **GENERASI EMAS** yang akan menjadi kekuatan bangsa Indonesia selanjutnya.

Total Fertility Rate (TFR), 1971 dan 2015



B. VARIASI ANTAR PROVINSI

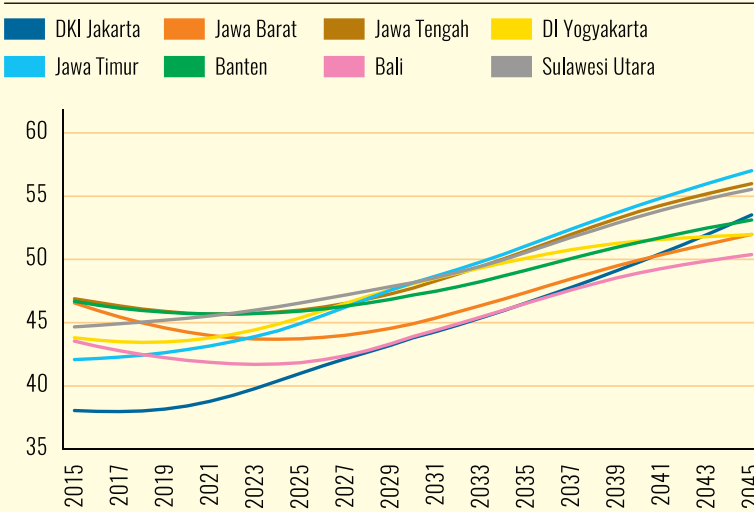
Berbicara fertilitas, dapat dilihat penurunan TFR pada periode 1971-2015 sangat bervariasi dan bergantung kepada berbagai faktor antara lain: faktor pertumbuhan ekonomi, aksesibilitas, serta investasi pendidikan dan kesehatan di wilayah tersebut. Secara umum, seluruh provinsi mengalami penurunan TFR yang cukup besar selama periode 1971-2015. Namun kondisi awal TFR sangat bervariasi, sehingga menghasilkan trayektori yang berbeda-beda. Pada tahun 2015, Angka kelahiran dari setiap perempuan masih sangat bervariasi antar provinsi. Sebagian provinsi, terutama dari Indonesia Bagian Timur, mempunyai TFR di atas 2,1. Beberapa provinsi telah memiliki TFR di bawah 2 dan mengalami transisi yang cukup cepat, antara lain DI Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Jawa Timur. Provinsi dengan angka kelahiran kurang dari dua anak menyebabkan proporsi penduduk lansia yang terus bertambah serta akhirnya pengurangan penduduk produktif di masa depan. Hal ini menyebabkan tidak semua provinsi mendapatkan momentum perubahan struktur penduduk yang sama.

Kebijakan khusus dalam memanfaatkan momentum perubahan struktur penduduk disesuaikan dengan tahapan transisi kependudukan yang terjadi. Setidaknya terdapat tiga kategori transisi kependudukan yang terjadi di Indonesia. Menurut Adioetomo (2017), periode transisi perubahan struktur penduduk dapat dibagi menjadi empat kategori besar, yaitu provinsi pada fase transisi akhir, transisi awal, menjelang transisi, dan akhirnya provinsi yang tidak mempunyai kejelasan dalam fase perubahan struktur tersebut.

Periode transisi perubahan struktur penduduk dapat dibagi menjadi empat kategori besar, yaitu:

- Provinsi pada fase transisi akhir
- Provinsi pada fase transisi awal
- Provinsi pada fase menjelang transisi
- Provinsi dengan fase yang tidak pasti

Masa Transisi Provinsi



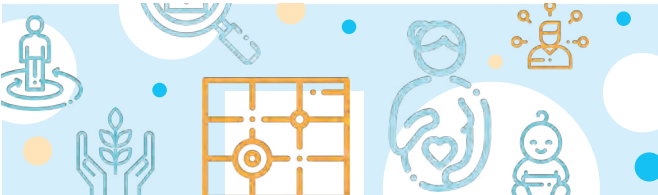
Masa transisi tersebut berhubungan erat dengan cepatnya penurunan baik itu TFR maupun IMR. Seperti misalnya, provinsi DI Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Jawa Timur dengan TFR yang sudah di bawah 2, telah mengalami masa transisi perubahan struktur penduduk yang lanjut. Tahapan bonus demografi dihitung berdasarkan proyeksi penduduk 2010-2035 terlihat bervariasi antar provinsi. Provinsi dengan TFR yang relatif rendah telah akan berakhir jendela kesempatan untuk memperoleh bonus demografi. Provinsi pada kategori *late-transition* ini telah bergerak menuju provinsi dengan penduduk yang *ageing*.

Provinsi dengan masa transisi awal ditandai dengan angka TFR yang relatif lebih tinggi, yaitu antara 2-2,5, dan relatif mengalami penurunan terus. Proporsi penduduk usia produktif (15-64) secara rata-rata masih lebih rendah dibandingkan provinsi tergolong *late-transition*. Selain itu, provinsi ini ditandai dengan jumlah penduduk usia muda di bawah 15 tahun yang masih cukup tinggi, sementara usia penduduk tua sebaliknya rendah, kecuali Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Provinsi yang akan menghadapi transisi perubahan struktur penduduk ditandai dengan masih tingginya TFR, jumlah anak per satu perempuan dan Angka Kematian Bayi. TFR rata-rata masih di atas 2,5. Hal ini mengakibatkan masih tingginya proporsi penduduk usia muda di bawah 15 tahun, meskipun proporsi penduduk usia produktif pun sudah cukup tinggi. Namun, dengan rendahnya usia muda, kebutuhan untuk investasi penduduk usia muda relatif masih cukup tinggi.

Provinsi yang akan Menghadapi Transisi (*Pre-Transition*)

Provinsi	Tahun Puncak	% 15-64	DR 2035	AGEING INDEX 2015
Aceh	2029	67,67	48,53	20
Sumatera Utara	2027	67,14	50,13	21
Sumatera Barat	2032	66,96	49,34	29
Riau	2029	69,38	46,48	15
Sumatera Selatan	2020	67,63	50,22	24
Lampung	2023	68,66	48,31	28
Kalimantan Barat	2024	68,79	47,14	22
Sulawesi Selatan	2021	68,61	49,23	30
Sulawesi Barat	2029	67,86	48,57	20
NTB	2033	67,61	47,99	25
Maluku Utara	2027	68,04	48,54	16



Provinsi dengan Transisi Akhir (*Late-Transition*)

Provinsi	Tahun Puncak	% 15-64	DR 2035	AGEING INDEX 2015
DKI Jakarta	2015	72,35	46,88	26
DI Yogyakarta	2018	69,60	50,41	63
Jawa Timur	2015	70,30	51,37	49
Sulawesi Utara	2015	69,03	50,88	37

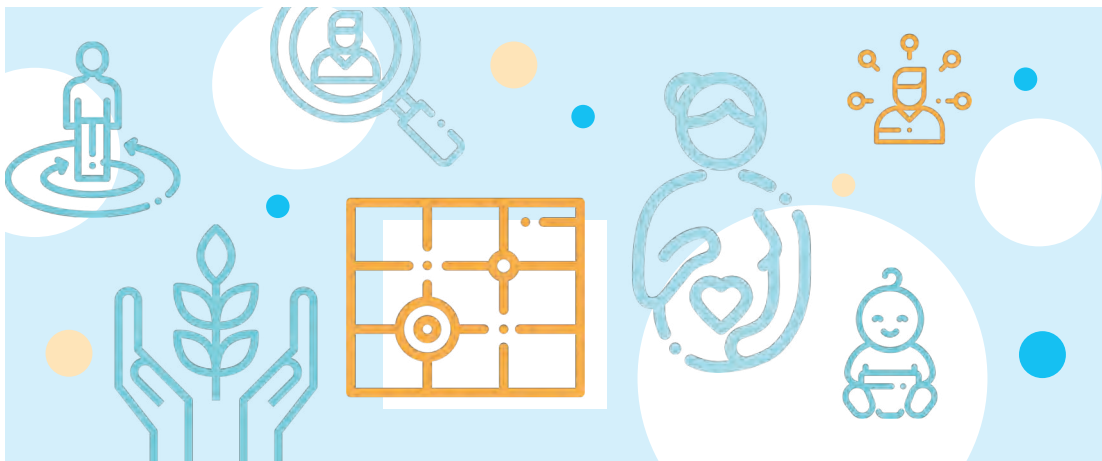
Provinsi pada Masa Transisi Awal

Provinsi	Tahun Puncak	% 15-64	DR 2035	AGEING INDEX 2015
Jawa Tengah	2021	68,48	50,98	47
Jawa Barat	2023	69,39	47,73	29
Banten	2022	69,65	47,14	18
Bangka Belitung	2020	69,25	47,59	24
Bengkulu	2020	69,17	47,36	23
Jambi	2020	68,96	48,41	23
Kalimantan Timur	2019	70,85	47,20	17
Kalimantan Selatan	2015	67,86	50,83	22
Kalimantan Tengah	2021	70,52	46,21	18
Gorontalo	2022	69,42	47,32	24
Kepulauan Riau	2025	70,71	43,42	13

Provinsi yang tidak masuk pada tiga kategori di atas bukan saja ditandai dengan TFR yang relatif tinggi, namun juga Angka Kematian Bayi yang jauh lebih tinggi dari provinsi lain. Oleh karena itu, penduduk usia muda di bawah 15 tahun masih cukup tinggi proporsinya. Yang menjadi tidak pasti adalah, dengan tingginya jumlah anak tersebut, peningkatan penduduk usia produktif belum dapat berhasil menurunkan *Dependency Ratio* menjadi di bawah 50%.

Provinsi dengan Ketidakpastian untuk Masuk Transisi

Provinsi	Tahun Puncak	% 15-64	DR 2035	AGEING INDEX 2015
Sulawesi Tengah	2023	67,85	49,22	25
Maluku	2028	67,32	49,26	20
Sulawesi Tenggara	2025	66,87	50,53	19
Papua	2023	69,70	46,37	8
Papua Barat	2029	69,82	43,80	12
NTT			61,48	21

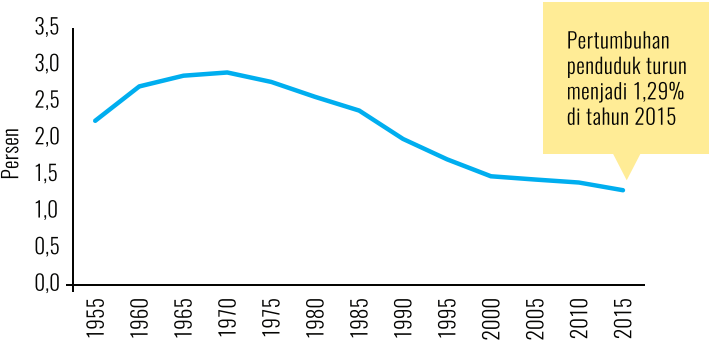


C. PERTUMBUHAN PENDUDUK

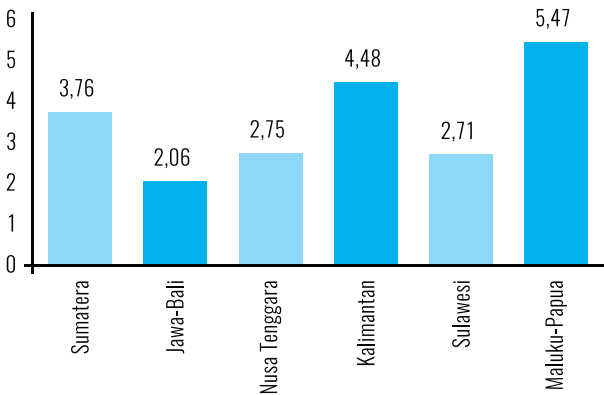
Penurunan TFR yang relatif pesat pada periode 1970-1990 menyebabkan perubahan pertumbuhan penduduk pada periode yang sama. Dengan turunnya jumlah anak per satu perempuan pada periode tersebut pertumbuhan penduduk yang sebelumnya di atas 2% turun dan mengalami penurunan mencapai sekitar 1,29% pada tahun 2015.

Pertumbuhan penduduk wilayah, sejalan dengan variasi perubahan struktur penduduk antar provinsi, juga menunjukkan variasi yang lebar. Pada periode 1971-2015, pertumbuhan penduduk rata-rata tertinggi terjadi di Maluku-Papua dan Kalimantan, dengan pertumbuhan di atas 4%. Namun demikian, pertumbuhan penduduk di kedua wilayah tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan penduduk secara nasional. Terlihat bahwa pertumbuhan secara nasional banyak dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk di wilayah Jawa. Pada periode 1971-2015, pertumbuhan Jawa-Bali sekitar 2%.

Pertumbuhan Penduduk Indonesia Rata-Rata per Tahun, 1950-2015



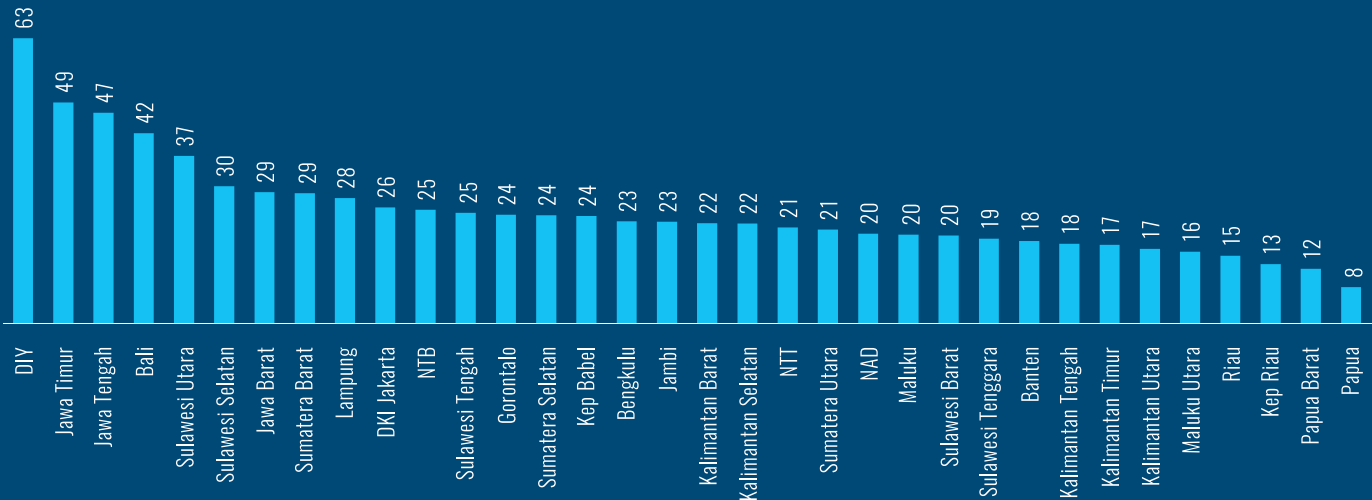
Pertumbuhan Penduduk Rata-Rata 1971-2015 (%)



D. AGEING POPULATION

Perubahan struktur penduduk terus berlangsung di seluruh provinsi di Indonesia. Secara nasional, penduduk Indonesia akan mengalami penuaan dalam waktu dekat. Saat ini, penduduk usia 60+ merupakan 8,5% total penduduk. Namun demikian, variasi antar provinsi cukup besar. Sesuai dengan masa transisi provinsi tersebut, beberapa provinsi sudah pada tahap *ageing population*, seperti DIY dan Jawa Timur. *Ageing Index* tersebut merupakan angka *ageing* yang diukur berdasarkan jumlah penduduk 65+ terhadap jumlah penduduk 15+.

Ageing Index Per Provinsi 2015



70,8 TAHUN

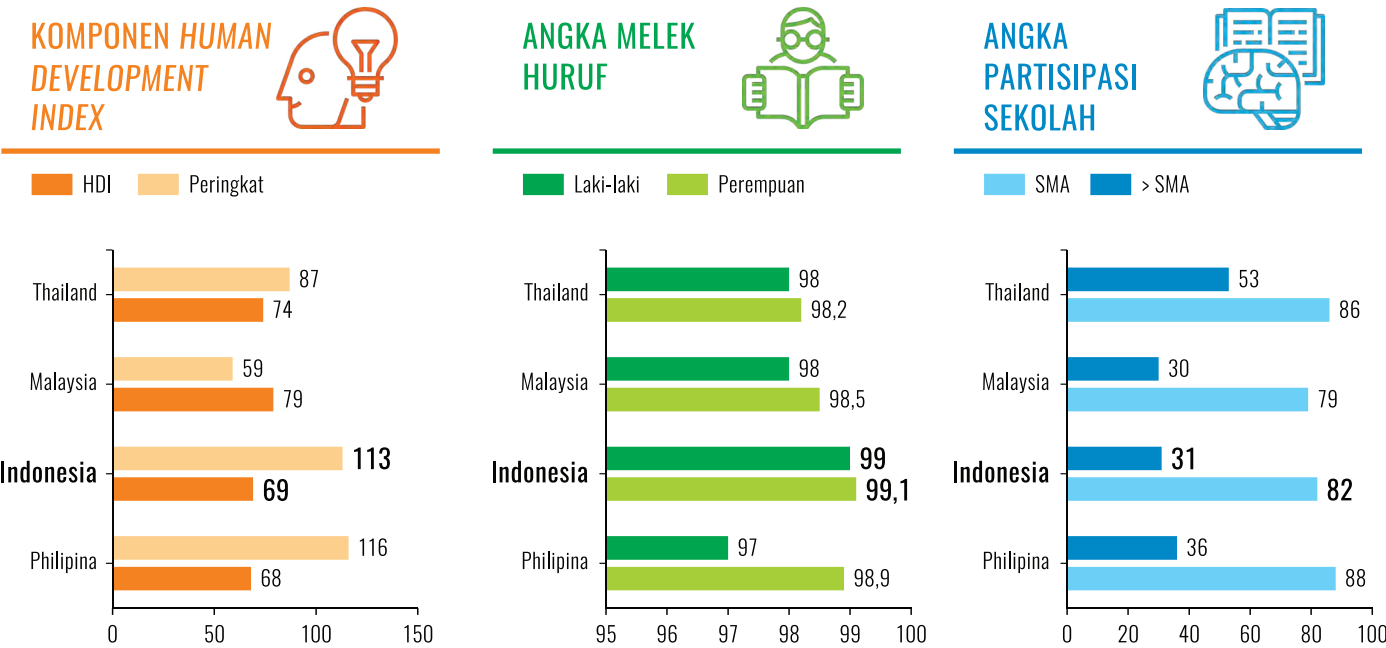
Usia harapan hidup manusia Indonesia pada 2015, dari yang semula hanya 55,1 tahun pada tahun 1971.

E. KUALITAS PENDUDUK INDONESIA

Dalam 45 tahun, bukan hanya kedua indikator tersebut yang mengalami perubahan. Manusia Indonesia memiliki usia harapan hidup lebih lama yang semula 55,1 tahun menjadi 70,8 tahun. Pertama, usia harapan hidup telah berkembang lebih panjang yaitu dari 55,1 tahun pada tahun 1971 menjadi 70,8 tahun pada 2015. Tentunya kondisi ini berpengaruh pada *High Human Development Index* (HDI)/ Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara keseluruhan.

IPM Indonesia berada pada peringkat 113 pada tahun 2016, masih sedikit sedikit di atas Philipina. IPM kita masih jauh di bawah Thailand dan Malaysia yang mempunyai kategori *High Human Development Index*. Faktor yang paling banyak mempengaruhi ketertinggalan IPM adalah kualitas pendidikan dan tingkat kesehatan yang direfleksikan dalam Angka Harapan Hidup. Angka ini relatif lebih rendah dibanding Thailand dan Malaysia. Dari sisi melek huruf dan partisipasi sekolah, Indonesia tidak kalah dari dua negara tersebut.

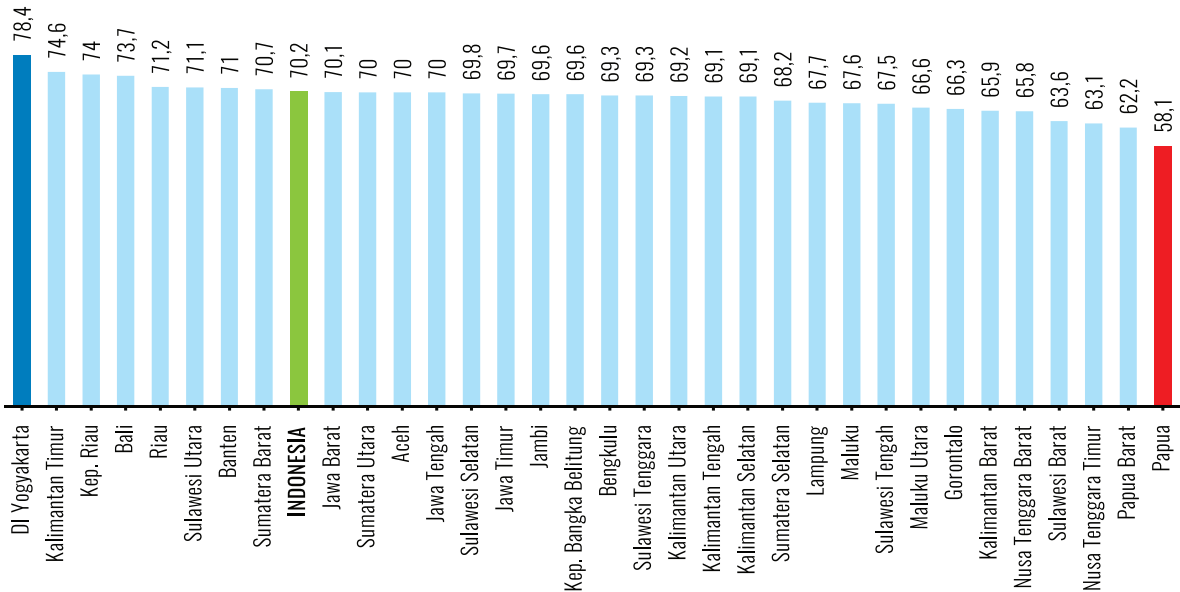
Indikator Pembangunan Manusia



Walaupun secara nasional indikator IPM membaik, namun masing-masing daerah memiliki kondisi yang berbeda. Kualitas sumber daya manusia bervariasi antar provinsi. Ketiga elemen angka harapan hidup, angka melek huruf dan rerata lama sekolah, dalam IPM ini bisa menggambarkan sejauh mana tingkat keberhasilan daerah mempersiapkan sumber daya manusia. Umum diketahui, kualitas sumber daya manusia merupakan jembatan transisi demografi menuju pertumbuhan ekonomi.

Sebagian provinsi dengan transisi demografi pada tahapan akhir memiliki HDI yang relatif tinggi, terutama DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. Sementara provinsi dengan HDI yang relatif rendah rata-rata dimiliki oleh provinsi dengan transisi demografi yang terlambat bahkan provinsi yang belum memiliki kepastian tahapan demografi transisi. Dengan kualitas sumber daya manusia yang relatif rendah, hal ini memberikan implikasi bahwa secara rata-rata bonus demografi di Indonesia belum dapat secara optimal dimanfaatkan.

IPM Provinsi



F. MOBILITAS DAN DISTRIBUSI PENDUDUK

Perkembangan perekonomian Indonesia dalam empat puluh terakhir berdampak pada pertumbuhan perkotaan yang terjadi dengan sangat cepat. Pada tahun 2015, penduduk lebih banyak terkonsentrasi di perkotaan. Kepadatan penduduk di Pulau Jawa berkembang hampir lebih dari dua kali lipat dari tahun 1971 ke 2015. Hampir 60% penduduk di Pulau Jawa tinggal di perkotaan. Kepadatan penduduk perkotaan menjadi cukup tinggi, terutama Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Dengan demikian, penduduk semakin terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Dalam beberapa tahun terakhir, kota-kota besar tumbuh dan sebagian membentuk mega urban. Wilayah lain pun juga mengalami perkembangan kepadatan yang cukup pesat. Sama halnya dengan Pulau Jawa, penduduk di wilayah lain lebih banyak terkonsentrasi di perkotaan. Namun demikian, penduduk di Jawa jauh lebih banyak dibandingkan penduduk di wilayah lain.

Jumlah dan Kepadatan Penduduk Antar Pulau

WILAYAH	Jumlah Penduduk (*ribu orang) & Kepadatan penduduk (/Km²)		
	1971	2010	2015
Sumatera	20.808 [43]	50.860 [106]	55.199 [115]
Jawa-Bali	78.206 [578]	140.941 [1.042]	149.162 [1.102]
Kalimantan	5.156 [9,3]	13.851 [25]	15.320 [28]
Sulawesi	8.527 [45]	17.437 [92]	18.702 [99]
Nusa Tenggara	4.499 [67]	9.222 [13]	9.943 [148]
Maluku - Papua	2.013 [4]	6.207 [13]	6.856 [14]

Kepadatan penduduk di Pulau Jawa berkembang hampir lebih dari dua kali lipat dari tahun 1971 ke 2015. Hampir 60% penduduk di Pulau Jawa tinggal di perkotaan.

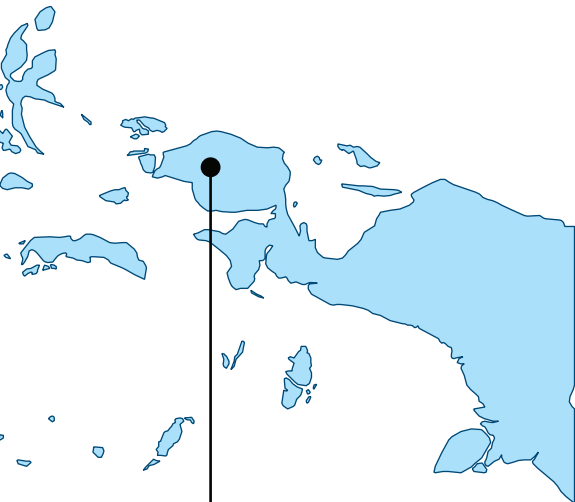
Pertumbuhan Penduduk Pulau-Pulau Besar Indonesia



Isu mobilitas penduduk merupakan bagian penting dalam perkembangan kependudukan di Indonesia. Sejak tahun 1950-an, pemerintah telah memberikan banyak perhatian terhadap pemerataan distribusi penduduk antar pulau. Kepadatan di Pulau Jawa dan kondisi wilayah di luar Jawa yang kurang tereksplorasi memberikan pemikiran untuk memindahkan sebagian penduduk Jawa ke luar pulau Jawa. Pada tahun 1972 lahir Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Transmigrasi sebagai tonggak pelaksanaan transmigrasi pada masa Orde Baru.

Namun demikian, setelah lebih 45 tahun program tersebut berjalan, distribusi penduduk masih relatif sama. Konsentrasi penduduk di pulau Jawa masih sangat padat, dibandingkan dengan pulau lainnya, terutama di Indonesia Bagian Timur. Dengan kondisi perekonomian yang timpang, yaitu penduduk melihat kesempatan perekonomian yang terkonsentrasi di Pulau Jawa, penduduk banyak berpindah ke Pulau Jawa.

Perkembangan terakhir dengan dibangunnya beberapa pusat perekonomian baru memberikan alternatif penduduk untuk berpindah, seperti Pulau Batam provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Timur. Kedua pulau telah menjadi tujuan para penduduk usia muda untuk mencari pekerjaan.

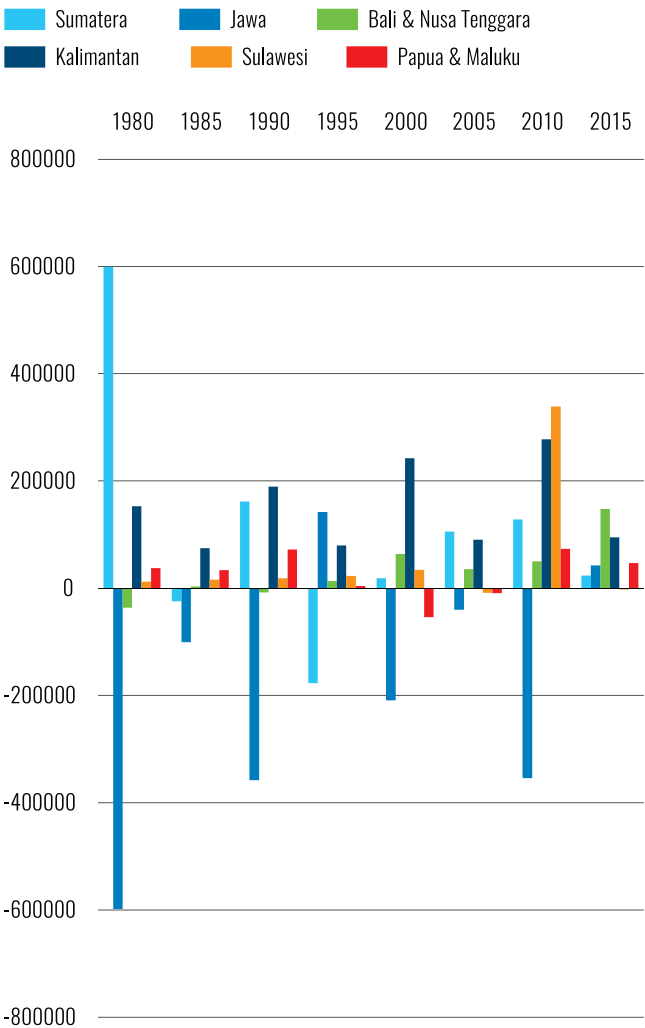


MALUKU-PAPUA
2016: 2,5%
2017: 2,4%
PERTUMBUHAN:
2017: 2,4%

BATAM KALTIM

Pusat perekonomian baru yang sedang berkembang, wilayah alternatif penduduk untuk berpindah, dan telah menjadi tujuan penduduk usia muda untuk mencari pekerjaan.

Migrasi Neto Menurut Pulau, 1980-2015



Perpindahan penduduk selama ini sebenarnya sudah banyak dari Pulau Jawa ke luar pulau Jawa. Net internal migrasi dari Pulau Jawa terus positif sampai pada tahun 2010. Net migrasi ke pulau lain selain pulau Jawa cenderung positif, atau pulau di luar Jawa banyak menerima penduduk dari daerah lain. Pulau Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera termasuk tujuan pada migran untuk mencari kesempatan ekonomi yang lebih baik.

Pola tersebut sedikit berubah pada tahun 2015, Pulau Jawa berubah secara drastis dengan menerima banyak para migran. Meskipun demikian, jumlah perpindahan secara netto lebih banyak penduduk yang berpindah ke Pulau Bali dan Nusa Tenggara.

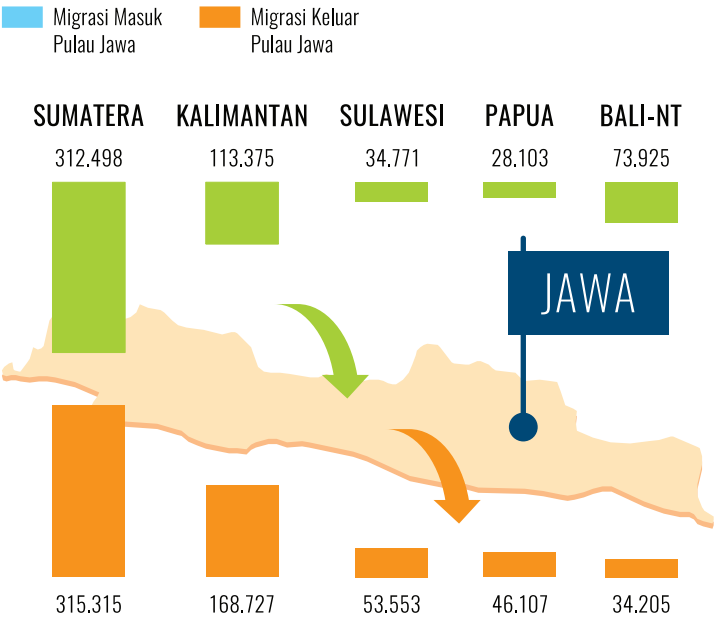
Sementara itu, Pulau Papua dan Maluku dari tahun ke tahun secara jumlah netto belum memberikan pengaruh yang cukup besar untuk meningkatkan kepadatan penduduk di kedua pulau tersebut.

Dengan penguatan konektivitas dan pengembangan berbagai pusat perekonomian di Indonesia Timur, manfaat untuk perpindahan dari Pulau Jawa atau Sumatera ke Indonesia Timur menjadi relatif lebih menarik sehingga menjadikan daerah tersebut menarik sebagai tujuan migrasi.

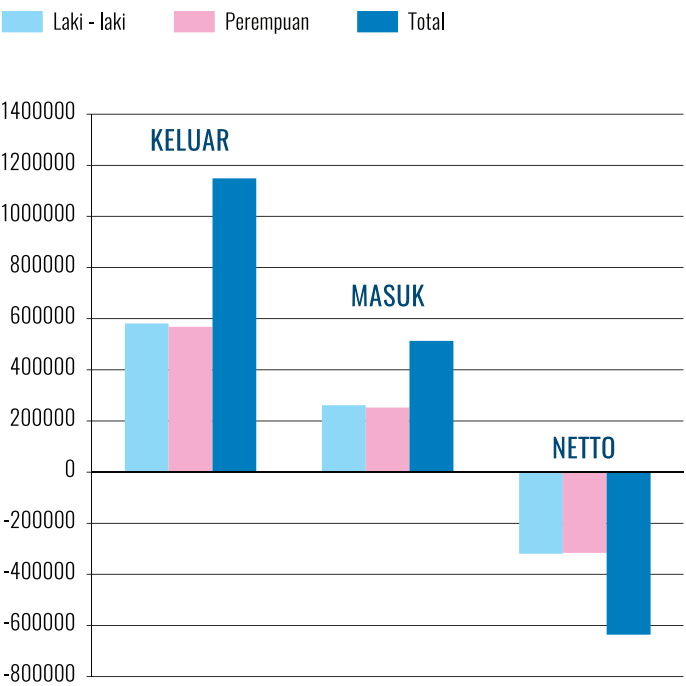
25-40 Usia produktif penduduk yang banyak menjadi migran internasional, karena motivasi ekonomi dan pendidikan.

Selain antar provinsi dan antar pulau, penduduk Indonesia juga berpindah ke luar negeri. Pada tahun 2015, migrasi internasional lebih banyak arus keluar Indonesia mejadikan net migrasi negatif. Perpindahan tersebut seperti halnya internal migrasi dimotivasi secara ekonomi, kemudian sebagian dari mereka pindah karena bersekolah. Sebagian besar dari para migran internasional merupakan penduduk dengan usia produktif, yaitu antara 25-40 tahun.

Migrasi Pulau Jawa, SUPAS 2015



Migrasi Risen Internasional, Keluar, Masuk, dan Netto, Hasil SUPAS 2015



“Penduduk bukan beban.
Penduduk yang berkualitas
adalah modal kita untuk
menjadi bangsa besar”

H.M. Jusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia,
dalam sambutannya pada acara launching Proyeksi Penduduk
di Istana Wakil Presiden, Jakarta, tanggal 24 Agustus 2018



2 KERANGKA PEMBANGUNAN DAN DATA PENDUDUK



BAGIAN 2

KERANGKA PEMBANGUNAN DAN DATA KEPENDUDUKAN

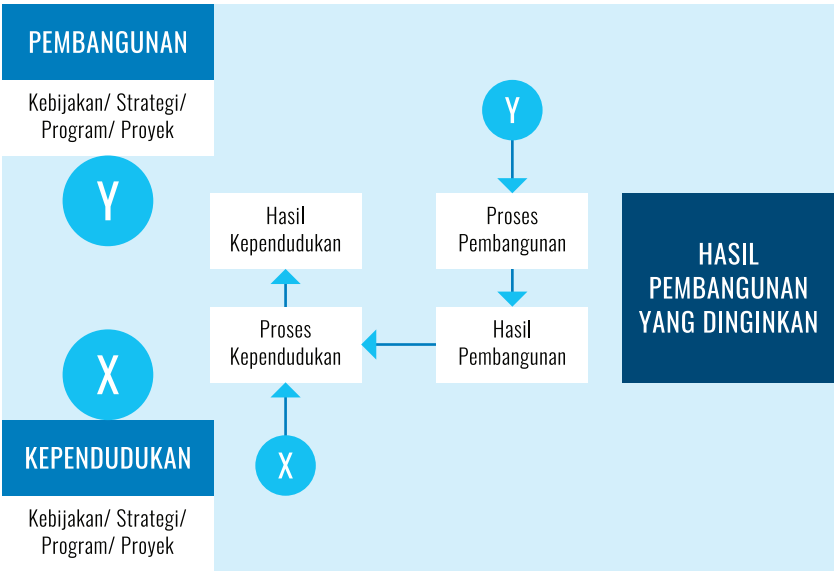
A. PENDUDUK SEBAGAI PENENTU PERTUMBUHAN EKONOMI

Penduduk dan pembangunan memiliki hubungan yang erat dalam suatu siklus sebab dan akibat. Kebijakan dalam pembangunan akan memberikan dampak tertentu pada penduduk. Beberapa indikator utama dari hasil pembangunan dinyatakan melalui tingkat pendapatan atau distribusinya, tingkat partisipasi kerja, status pendidikan dan kesehatan, serta kualitas lingkungan. Pembangunan ini akan berdampak pada kualitas manusia sebagai elemen kependudukan. Kualitas manusia atau khususnya tenaga kerja, selanjutnya akan memberikan dampak terhadap proses pembangunan selanjutnya yaitu produksi.



MODEL INTERELASI POPULASI DAN PEMBANGUNAN

Hasil-hasil pembangunan dan perubahan kualitas penduduk berikutnya akan mempengaruhi indikator kependudukan lainnya, yaitu tingkat fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Proses ini berlangsung secara timbal balik dan saling mempengaruhi. Seperti terlihat pada Gambar di samping, model interelasi penduduk dan pembangunan berlaku timbal balik, dengan kebijakan yang dilakukan satu sektor akan mempengaruhi proses kependudukan maupun kualitas dari penduduk itu sendiri, karena penduduk dapat bersifat sebagai objek maupun subjek dari pembangunan.



Memahami kerangka kependudukan dan pembangunan lebih dalam akan menempatkan penduduk sebagai salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi (*engine of growth*). Pengertian ini dapat diartikan dalam dua hal, yaitu penduduk sebagai konsumen dan penduduk sebagai produsen atau pelaku aktif pembangunan.

Dalam konteks Indonesia, ada dua hal penting untuk diperhatikan. Pertama, dengan jumlah penduduk yang relatif besar, penduduk Indonesia menjadi salah satu konsumen terbesar di dunia. Secara nasional, konsumsi masyarakat memberikan kontribusi terbesar dalam pertumbuhan ekonomi. Dalam beberapa tahun terakhir, konsumsi masyarakat telah memberikan kontribusi pertumbuhan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 4.93%. Perubahan struktur penduduk yang terjadi demikian cepat akan berpengaruh terhadap pola konsumsi, yang akhirnya akan juga berpengaruh terhadap kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi.

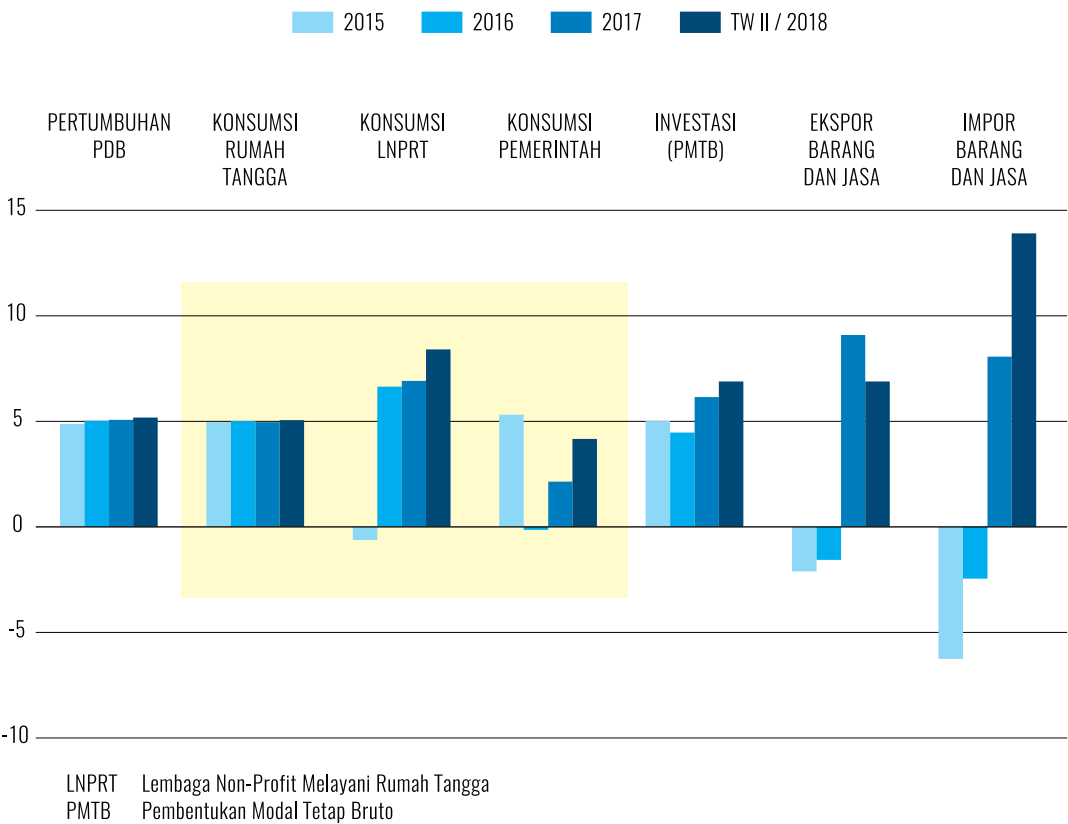
Kedua, perubahan struktur penduduk membawa Indonesia menjadi negara dengan jumlah usia produktif yang paling besar di wilayah Asia Tenggara. Jumlah usia produktif, yaitu penduduk dengan kelompok umur 15-59, menurut Supas 2015 berjumlah sekitar 162,7 juta orang. Penduduk usia produktif yang besar diharapkan menghasilkan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi dari sisi produksi.

Lebih jauh lagi, penduduk usia produktif dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui investasi yang dapat dilakukan semasa usia produktif. Hal ini diharapkan dapat memberikan pengaruh yang lebih permanen terhadap ekonomi nasional.

Perubahan struktur penduduk merupakan peluang bagi Indonesia untuk dapat bergerak menjadi negara maju. Dengan berbagai peluang kontribusi penduduk, baik dari sisi jumlah maupun kualitas penduduk, perlu diarahkan untuk menghasilkan lompatan yang berarti secara ekonomi. Oleh karena itu, tantangannya adalah bagaimana kita dapat meningkatkan kontribusi penduduk dari sisi konsumsi yang lebih banyak diproduksi dari dalam negeri sehingga pengaruhnya akan menjadi jauh lebih signifikan.

Selain itu, tantangan lain adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga terbentuk penduduk yang cerdas baik sebagai konsumen maupun sebagai produsen. Peningkatan kualitas tersebut tidak hanya difokuskan pada usia produktif, namun juga mengoptimalkan lanjut usia yang produktif. Kondisi dimana penduduk usia produktif dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dikenal dengan bonus demografi.

Pertumbuhan PDB Sisi Permintaan (y-o-y), 2015-2018



B. DATA KEPENDUDUKAN DAN INDIKATOR

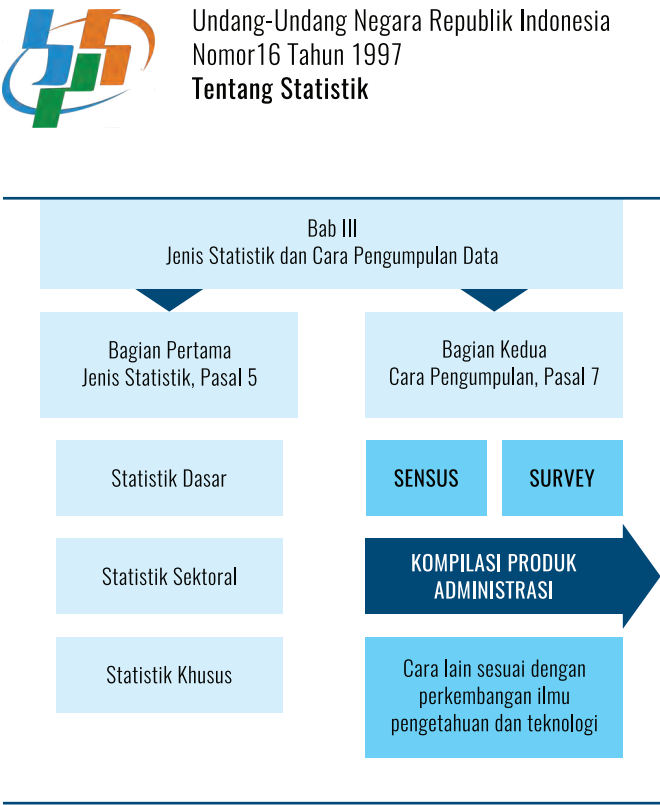
Penduduk merupakan subjek dan objek pembangunan. Pentingnya komponen penduduk dalam pembangunan menjadikan kebutuhan akan data kependudukan sebagai hal yang sangat mendasar. Data dapat menjadi bukti empiris dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan pembangunan (*evidence-based policy*). Sehubungan dengan hal tersebut, data kependudukan dibutuhkan untuk mengakomodasi empat hal penting yaitu: peningkatan kualitas, pengendalian kuantitas, penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk, serta terakhir administrasi penduduk.

Peningkatan kualitas akan melihat sejauh mana tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, harapan hidup, serta keahlian dan penguasaan teknologi dari penduduk. Kemudian penyusunan kebijakan pengendalian kuantitas dapat dilakukan melalui penyediaan data tingkat fertilitas maupun penurunan angka kematian ibu dan bayi. Dalam hal penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk dibutuhkan data-data kependudukan terkait tata kelola urbanisasi dan tata kelola migrasi baik internal maupun eksternal. Terakhir, administrasi penduduk dan catatan sipil akan menjadi dasar kuat pembangunan data kependudukan melalui perluasan cakupan NIK dan perluasan kepemilikan akta kelahiran dan dokumen lainnya.

Bagaimana ketersediaan data kependudukan saat ini? Data kependudukan dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu pertama bersifat survei dan sensus. Kedua adalah data administrasi kependudukan. Kedua jenis data ini diatur secara terpisah dalam dua Undang-Undang yang berbeda. Melalui Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS) dibentuk sebagai lembaga penyelenggara statistik. Kegiatan statistik yang dijalankan meliputi upaya penyediaan dan penyebaran data serta upaya pengembangan ilmu statistik. Jenis statistik yang dikumpulkan terdiri dari statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus. Pengumpulan data dapat dilakukan melalui cara sensus, survei, kompilasi produk administrasi, maupun cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Di lain sisi, Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan administrasi kependudukan secara nasional. Beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain: penetapan sistem, pedoman, dan standar; pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala nasional; dan menyediakan blangko dokumen kependudukan termasuk blangko KTP-el melalui instansi pelaksana. Amanah ini dijalankan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Dua Undang-Undang Mengatur Data Kependudukan





Data kependudukan harus akurat, mutakhir, dan *real time*.

Melalui pencatatan data penduduk yang komprehensif akan memberikan database yang akurat bagi pemerintah pusat maupun daerah. Terobosan-terobosan dengan mengembangkan metodologi dalam pendataan baik sensus maupun survei dengan mengikuti perkembangan teknologi modern, sehingga mampu menjawab aspirasi masyarakat yang menuntut tersedianya data dan informasi yang cepat, akurat dan tepat di tengah membanjirnya data digital. Informasi ini akan menjadi dasar penyusunan perencanaan dan pengambilan kebijakan yang berbasis fakta terkait kependudukan serta dapat memitigasi berbagai kebutuhan dasar baik pangan, energi, perumahan, pendidikan dan kesehatan. Data penduduk yang akurat dan mutakhir juga akan bermanfaat sebagai bahan evaluasi indikator capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals-SDGs*).

Perbandingan Sumber-Sumber Data Kependudukan

JENIS DATA	JUMLAH	PENGUNAAN	DASAR HUKUM
SURVEY	Sample tertentu	Perencanaan dan evaluasi suatu program	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
SENSUS	Seluruh penduduk	Perencanaan pembangunan dan pengembangan usaha	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
REGISTRASI	Seluruh penduduk	Penentuan Daftar Pemilih Tetap (DTP) saat Pemilihan Umum, perencanaan pembangunan, dan perencanaan bisnis	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Namun demikian, tidak cukup dengan terpenuhinya kebutuhan data. Diperlukan pemahaman yang baik antar pemangku kepentingan terhadap data yang dihasilkan. Sesuai dengan klasifikasi di atas, data penduduk atau kependudukan dapat terdiri dari data survei dan sensus serta data administrasi kependudukan. Data survei dilakukan oleh BPS dan memberikan gambaran mengenai berbagai aspek terkait kependudukan, seperti pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Survei dilakukan dengan mengambil sejumlah sample penduduk dengan karakteristik yang dapat mewakili karakteristik penduduk keseluruhan sesuai dengan tujuan sample tersebut. Data yang dihasilkan digunakan antara lain untuk perencanaan dan evaluasi suatu program.

Sensus Penduduk yang juga dilaksanakan oleh BPS menghasilkan data sensus yang mencakup seluruh penduduk Indonesia yang tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, data sensus akan lebih akurat dalam menggambarkan kondisi penduduk Indonesia dibandingkan dengan data survei. Akan tetapi, sensus dilaksanakan setiap 10 tahun sekali sehingga BPS perlu melakukan survei untuk mengisi kekosongan data kependudukan mengingat pentingnya data kependudukan untuk keperluan perencanaan pembangunan dan pengembangan usaha. Luasnya wilayah NKRI dan keterbatasan waktu yang dimiliki membuat data sensus menjadi lebih bersifat umum, yakni mencakup informasi dasar berupa nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, agama, kewarganegaraan, pekerjaan, tempat lahir, migrasi dan lain-lain.

Berbeda dengan survei dan sensus penduduk yang dilaksanakan oleh BPS, registrasi penduduk dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/ kelurahan. Registrasi penduduk menghasilkan data administrasi yang mencakup data NIK, peristiwa kelahiran, kematian, perpindahan penduduk, serta data administrasi kependudukan lainnya. Apabila data administrasi kependudukan terus menerus diperbaharui serta didukung oleh pelaporan peristiwa penting kependudukan oleh masyarakat, maka data administrasi kependudukan dapat menjadi data paling akurat dan dapat dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan.



3 MASA DEPAN YANG DIINGINKAN



BAGIAN 3

MASA DEPAN YANG DIINGINKAN



A. PERTUMBUHAN PENDUDUK YANG SEIMBANG

Pembangunan berpusat pada penduduk. Untuk menjaga keberlangsungan pembangunan dan menjaga kesejahteraan penduduk, beberapa faktor terkait dengan penduduk perlu dijaga.

1

Pertama adalah penduduk tumbuh dengan seimbang dan berkualitas. Dalam hal ini, tidak saja kuantitas penduduk yang harus dijaga, namun juga kualitasnya. Penduduk dengan daya saing yang tinggi akan mampu berkompetisi dengan penduduk dari negara lain dan menjadi negara yang besar.

3

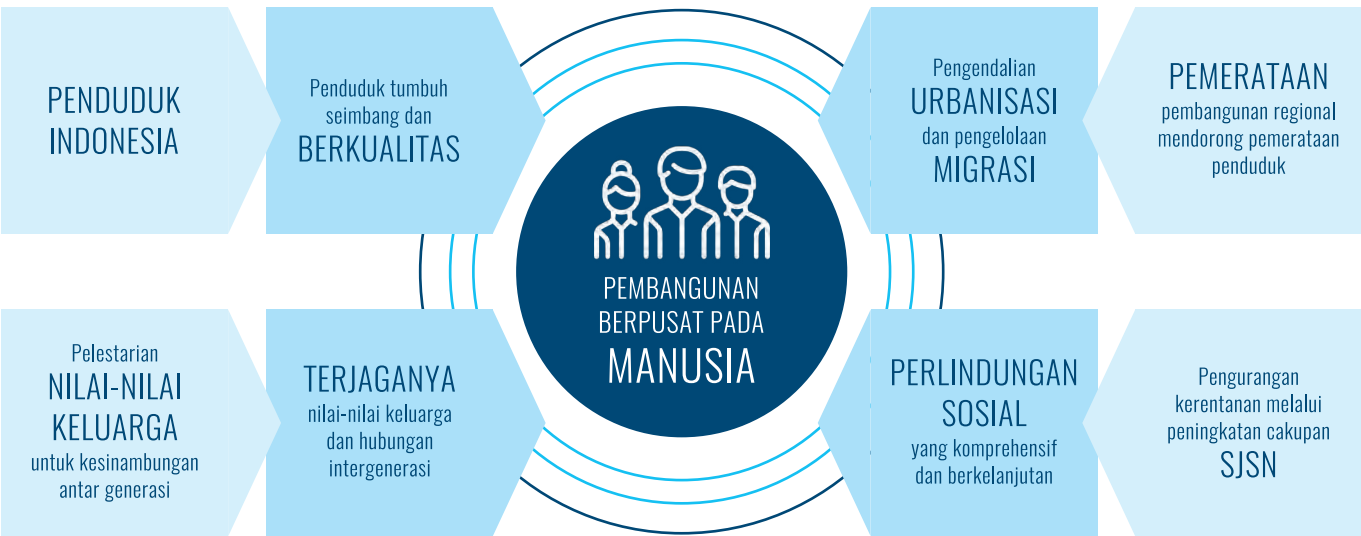
Ketiga, penduduk perlu mendapatkan perlindungan sosial yang komprehensif. Melalui perlindungan sosial yang komprehensif ini, penduduk mendapatkan perlindungan dari guncangan ekonomi, sosial, maupun guncangan lainnya. Skema perlindungan sosial yang dilaksanakan sangat bergantung pada pertumbuhan penduduk yang ada, terutama untuk menjaga keseimbangan fiskal dalam jangka panjang.

2

Kedua, distribusi penduduk yang harus seimbang dan disesuaikan dengan kapasitas dukung lingkungan. Perpindahan penduduk perlu ditata dengan baik, tidak saja menyangkut administrasi kependudukan, namun juga bagaimana menciptakan pusat-pusat penghidupan yang sesuai dengan daya dukung lingkungan. Hal ini diupayakan untuk mencegah perpindahan penduduk yang tidak terkendali. Perpindahan penduduk saat ini didominasi oleh faktor ekonomi. Penduduk desa pindah ke kota karena memandang tidak ada lagi sumber penghidupan yang baik di pedesaan. Umumnya penduduk desa yang berpindah tidak memiliki bekal pendidikan yang cukup. Distribusi penduduk selain antara kota dan desa yang perlu dijaga, keseimbangan kepadatan penduduk di Jawa dan luar Jawa perlu menjadi pertimbangan pembangunan ekonomi dan wilayah ke depan.

4

Keempat, penduduk yang kuat adalah penduduk yang dapat menjaga nilai-nilai luhur budaya dengan menjaga keseimbangan antar generasi. Untuk itu, pembangunan penduduk pada tingkat keluarga menjadi penting. Hubungan antar generasi baik yang bersifat ekonomi maupun sosial adalah modal utama keseimbangan antar generasi yang perlu terus dijaga dan dikembangkan dalam berbagai aspek. Ketergantungan antara satu generasi dengan generasi lain dalam lingkaran keluarga dipercaya sebagai cara yang paling efektif dalam menata keseimbangan ekonomi, sosial, dan emosional individu maupun kelompok.



B. PROYEKSI PENDUDUK

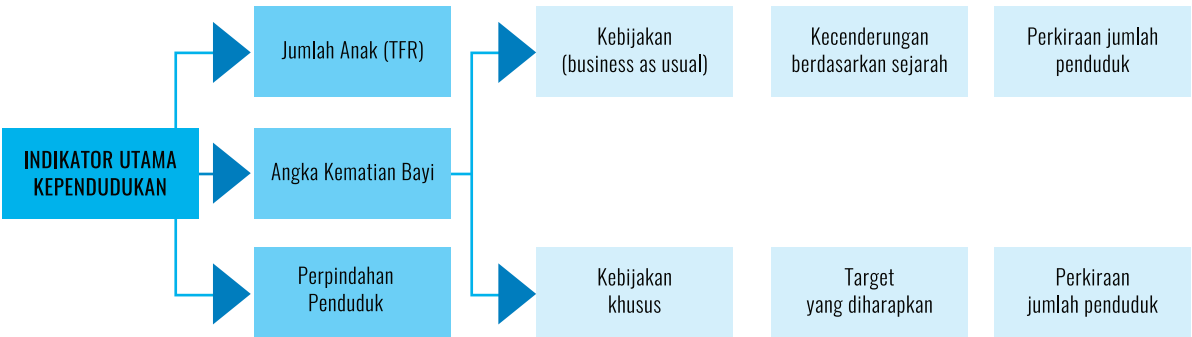
Proyeksi penduduk merupakan produk perhitungan matematik secara ilmiah untuk melihat besar jumlah penduduk dan struktur umur penduduk di masa yang akan datang. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah berinisiatif melakukan hal ini lebih dari dua dasawarsa lalu. Tujuan awal metode proyeksi adalah untuk mengintegrasikan variabel penduduk ke dalam perencanaan pembangunan. Tahun 2017 lalu, Divisi Populasi Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial dari Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa telah meluncurkan *The 2017 Revision of World Population Prospects*. Proyeksi penduduk ini menampilkan indikator demografi utama, wilayah, sub-wilayah, dan negara yang mencakup periode 1950-2100.

Dalam konteks Indonesia, dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan proyeksi penduduk. Sebagai dasar proyeksi digunakan data hasil Sensus Penduduk dan Survey Penduduk Antar Sensus (SUPAS) tahun 1971, 1980, 1985, 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, dan 2015. Proyeksi ini untuk memperbaharui proyeksi penduduk yang terakhir dibuat berdasarkan hasil SP2010 untuk periode 2010 – 2035.

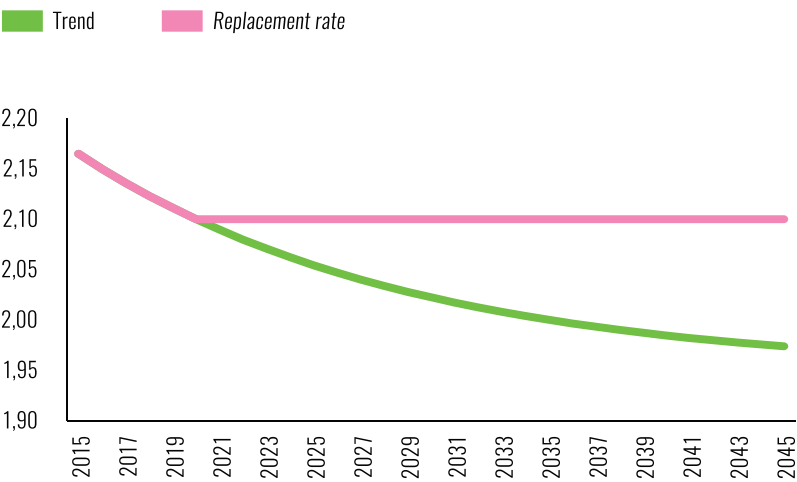
Data proyeksi terbaru ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024, Rencana Aksi SDGs, dan Visi Pembangunan 2045. Untuk itu, Bappenas dan BPS kembali menyusun proyeksi penduduk mencakup periode 2015-2045 dengan menambah data terbaru penduduk dari SUPAS 2015.

Dalam penyusunan proyeksi penduduk, sejalan juga dengan apa yang dilakukan secara internasional, pemerintah perlu menetapkan skenario yang ingin dicapai, selain juga skenario yang berdasarkan pada kecenderungan yang telah terjadi. Oleh karena itu, terdapat setidaknya dua jenis skenario yang diputuskan dalam proyeksi ini, yaitu:

- Pertama, adalah proyeksi yang menghitung jumlah penduduk apabila mengikuti kecenderungan perkembangan indikator kependudukan yang telah terjadi pada tahun tahun sebelumnya.
- Kedua adalah proyeksi yang menghitung jumlah penduduk apabila pemerintah mempunyai cita-cita tertentu terhadap indikator kependudukan yang terpilih.



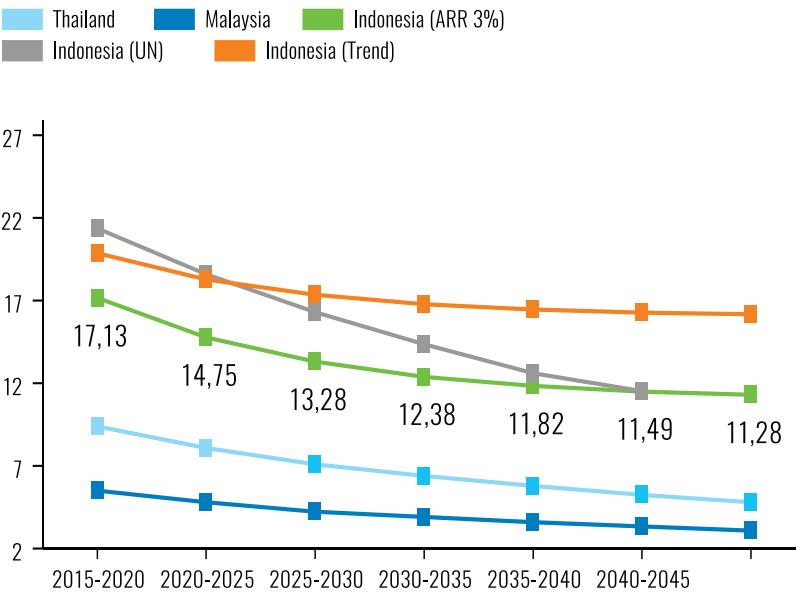
Asumsi TFR: Trend vs Replacement Rate



Dengan mempertimbangkan sejarah kecenderungan yang lalu, skenario pertama menggunakan Tingkat Fertilitas yang terus mengalami penurunan dan Angka Kematian Bayi yang juga terus menurun dengan kecepatan yang konsisten dengan sejarah. Skenario kedua adalah menggunakan Tingkat Fertilitas yang berubah atau ditetapkan sesuai target yang diinginkan sehingga menuju kondisi pertumbuhan penduduk yang diinginkan. Angka Kematian Bayi diinginkan untuk turun lebih cepat ke depan sehingga dapat mencapai target yang ditetapkan dalam SDGs.

- Secara ringkas, asumsi yang diambil meliputi:
- a) Dua alternatif tingkat fertilitas (TFR) yaitu TFR=2,1 dan mengikuti trend,
 - b) Dua alternatif tingkat mortalitas (IMR) yaitu sejak tahun 2015 IMR akan mengalami penurunan 3 persen tiap tahun hingga tahun 2030 dan mengikuti trend, dan
 - c) Migrasi Internasional net = -0.5.
Asumsi migrasi mengambil data dari Supas 2015 dan tidak berubah menurut waktu ke depan.

Asumsi Angka Kematian Bayi



Sesuai dengan ilustrasi pada Gambar, Angka Kematian Bayi di Indonesia diasumsikan terus menurun. Untuk skenario business as usual, penurunan Angka Kematian Bayi diperkirakan sekitar 1% setiap tahun. Sementara untuk skenario percepatan, penurunan Angka Kematian Bayi ini ditetapkan sekitar 3% setiap tahun. Tentunya dengan adanya percepatan tersebut terdapat implikasi kebijakan yang harus dilakukan sehingga perkiraan jumlah penduduk tersebut akan terwujud.

ASUMSI MIGRASI

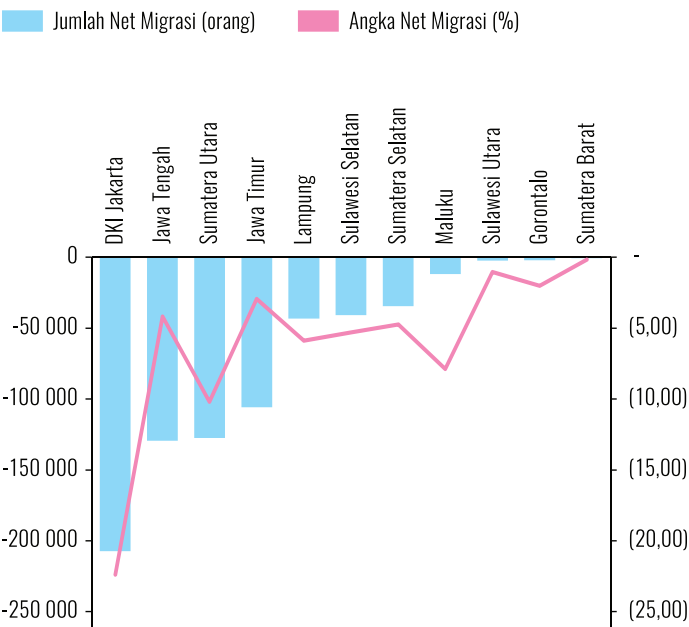
Pada proyeksi 2010-2035 dengan menggunakan Sensus 2010 migrasi masih belum menjadi faktor dalam perhitungan jumlah penduduk. Dalam proyeksi update dengan menggunakan data Supas 2015 ini, data migrasi digunakan, yaitu migrasi internal dan migrasi internasional.

Sebagian provinsi memiliki jumlah net migrasi (risen) yang negatif, yaitu banyak penduduk keluar dari wilayah. Terdapat 11 provinsi dengan net migrasi yang negatif, termasuk DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara. Ketiga provinsi tersebut merupakan tiga provinsi paling banyak “kehilangan penduduk” karena perpindahan antar provinsi atau regional. Dari sisi persentase penduduk yang bergerak terhadap jumlah penduduk total DKI Jakarta dan Jawa Timur mempunyai proporsi penduduk berpindah yang terbanyak. Di DKI Jakarta lebih dari 20% penduduk berpindah ke luar wilayah, terutama berpindah di sekitar Jawa Barat atau Banten, karena tekanan biaya hidup atau harga tanah yang sangat mahal di pusat kota.

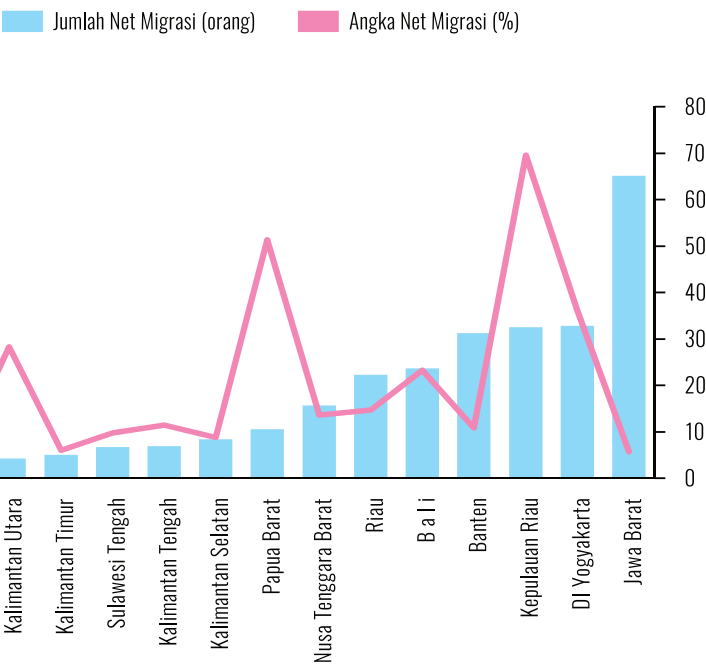
23 provinsi mempunyai net migrasi yang positif, atau banyak penduduk pendatang. Beberapa provinsi dengan net migrasi positif cukup besar adalah Kepulauan Riau, Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan Banten. Provinsi Jawa Barat dan Banten menerima banyak penduduk setiap tahunnya, terutama dari DKI Jakarta. Dengan mudahnya transportasi antara kedua provinsi tersebut, banyak penduduk tinggal di Jawa Barat dan Banten untuk bekerja di DKI Jakarta.

Kepulauan Riau sebagai salah satu contoh provinsi dengan pengembangan pusat ekonomi dimana sebagian besar penduduk adalah pendatang. Papua Barat juga merupakan provinsi dengan banyak pendatang yang bekerja. Dinamika penduduk seperti ini sangat berpengaruh terhadap kebijakan pengembangan wilayah yang perlu dilakukan. Hal ini penting terutama untuk pengembangan wilayah Indonesia Timur dan kerangka pemerataan distribusi penduduk.

Provinsi Dengan Net Migrasi Negatif



Provinsi Dengan Net Migrasi Positif



Perpindahan penduduk dimotivasi utamanya oleh faktor ekonomi, baik itu perpindahan antar provinsi maupun antar negara. Lebih dari 90 persen penduduk yang berpindah ke luar negeri karena mereka mencari penghidupan yang lebih baik dengan pekerjaan yang lebih baik.



MIGRASI INTERNASIONAL

Selain itu, penduduk pergi ke luar negeri karena belajar dan menemani pasangan. Sementara ini, masih sedikit penduduk Indonesia berpindah ke luar negeri karena alasan politik maupun sosial lainnya.

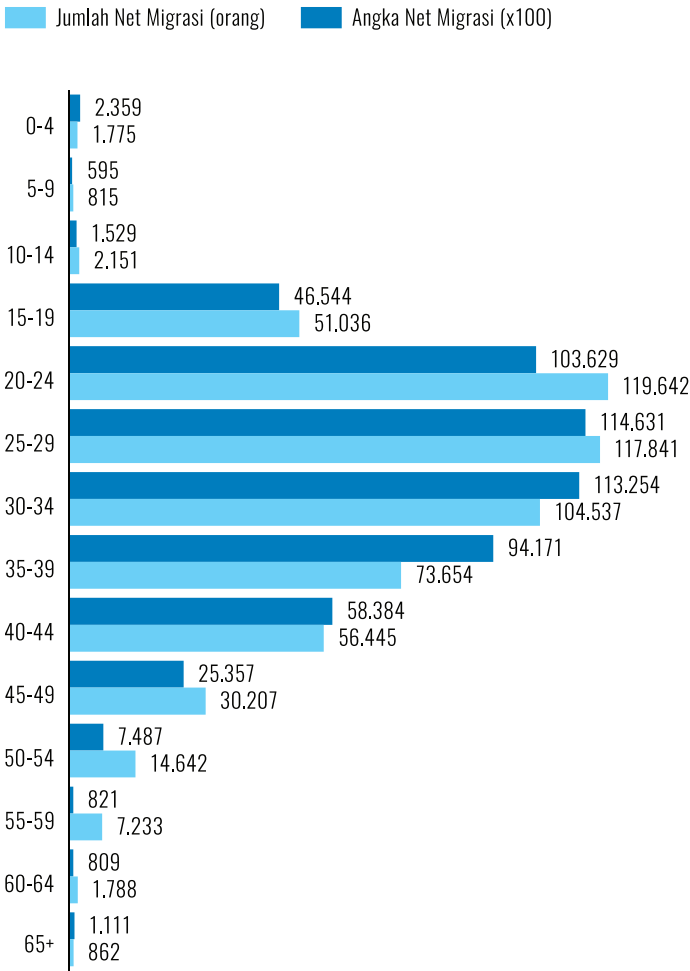
Alasan penduduk berpindah ke luar negeri

ALASAN BERPINDAH	JUMLAH ORANG	%
Mencari pekerjaan	1,087,623	94.30%
Belajar	28,227	2.45%
Menemani pasangan	27.325	2.37%
Alasan politik dan sosial	738	0.06%
Lainnya	9.396	0.82%
TOTAL	1,153,309	100%

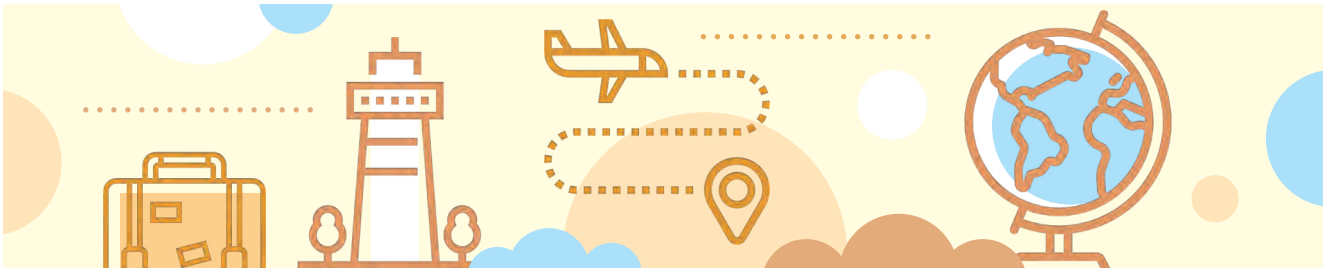
Meskipun sebagian besar penduduk yang pindah ke luar negeri adalah laki-laki, perbedaannya dengan penduduk perempuan tidak begitu signifikan. Hal ini terlihat dari umur penduduk yang berpindah, banyak penduduk berusia produktif yaitu sejak 20-40 tahun baik itu laki laki maupun perempuan. Setelah 40 tahun, penduduk yang berpindah ke luar negeri terjadi penurunan jumlah yang cukup signifikan.

ANGGOTA KELUARGA	JUMLAH ORANG	%
Laki-laki	582,628	50.52
Perempuan	570,681	49.48
Total	1,153,309	100.00

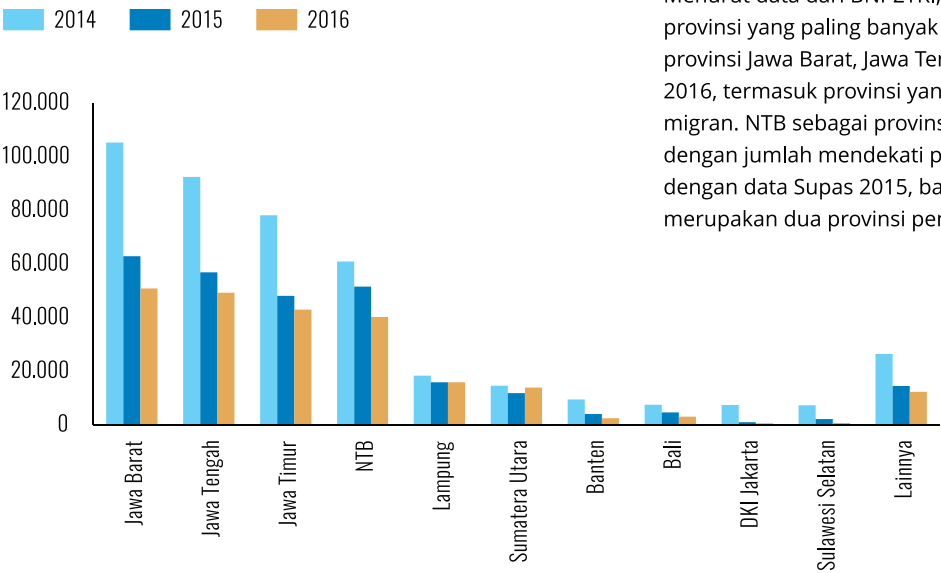
Anggota Keluarga yang Tinggal di Luar Negeri Terhitung Sejak Tahun 2010 Berdasarkan Kelompok Umur.



Proyeksi 2015 - 2045 ini menggunakan data-data migrasi tersebut dalam memperkiran jumlah penduduk ke depan. Hal ini merupakan salah satu bagian upaya perbaikan dari proses proyeksi penduduk yang selama ini dilakukan.

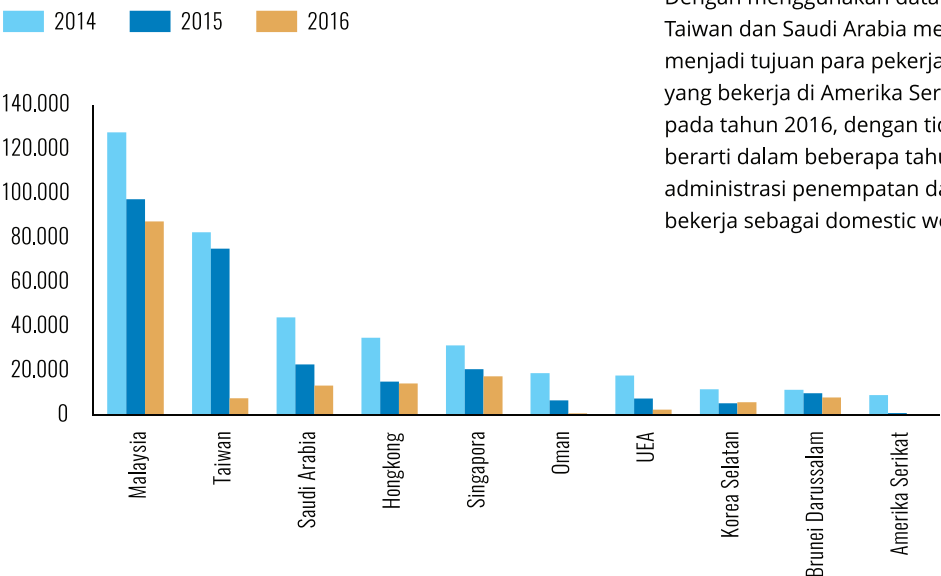


Jumlah Pekerja Migran Menurut Provinsi Asal, 2014-2016



Menurut data dari BNP2TKI, provinsi Jawa Barat merupakan provinsi yang paling banyak mengirimkan pekerja migran. Selain provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur tahun 2015 dan 2016, termasuk provinsi yang mengirimkan relatif banyak pekerja migran. NTB sebagai provinsi di luar Jawa yang pengirim migran dengan jumlah mendekati provinsi Jawa Timur. Hal ini sesuai dengan data Supas 2015, bahwa provinsi Jawa Timur dan NTB merupakan dua provinsi pengirim pekerja migran terbesar.

Negara Tujuan Pekerja Migran Indonesia, 2014-2016



Dengan menggunakan data dari sumber yang sama, Malaysia, Taiwan dan Saudi Arabia merupakan tiga negara utama yang menjadi tujuan para pekerja migran Indonesia. Pekerja migran yang bekerja di Amerika Serikat terhitung hanya sekitar 0,11% pada tahun 2016, dengan tidak banyak perkembangan yang berarti dalam beberapa tahun terakhir ini. Menurut data administrasi penempatan dari BNP2TKI pekerja kita banyak bekerja sebagai domestic workers.

C. HASIL PROYEKSI PENDUDUK INDONESIA 2015-2045

Apabila berbagai indikator penentu pertumbuhan penduduk dibiarkan menurun sesuai dengan kecenderungan yang telah terjadi, penduduk indonesia diperkirakan akan mencapai sekitar 311,6 juta pada tahun 2045. Dalam hal ini, jumlah penduduk akan berkembang sekitar 56 juta dalam 30 tahun atau tumbuh sekitar 0,73% per tahun. Perkembangan jumlah penduduk ini disebabkan oleh turunnya Tingkat Fertilitas atau jumlah rata-rata anak untuk setiap perempuan dari 2,17 tahun 2015 menjadi sekitar 1,9 pada tahun 2045. Sementara itu, Angka Kematian Bayi atau *Infant Mortality Rate* (IMR) menjadi 16,15 pada tahun 2045. Angka indikator tersebut berpengaruh tidak saja pada jumlah penduduk, namun juga pada Usia Harapan Hidup saat lahir.

Hasil Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045 dengan Skenario TFR Trend

INDIKATOR	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (juta orang)	255,6	269,6	282,0	292,5	301	307,4	311,6
TFR	2.17	2.1	2.05	2.02	2	1,99	1,97
IMR	19,86	18,27	17,33	16,77	16,45	16,26	16,15
Usia Harapan Hidup Saat Lahir	72,56	73,05	73,12	73,19	73,26	73,33	73,39

Jumlah penduduk akan lebih banyak apabila dua indikator utama yaitu TFR dan IMR ditargetkan sesuai dengan yang kita inginkan. Dalam hal ini, apabila TFR dijaga pada nilai 2,1 dan IMR diturunkan lebih cepat (3% penurunan per tahun), maka jumlah penduduk pada tahun 2045 diperkirakan sebesar 318,9 juta atau bertambah 63,3 juta dalam 30 tahun. Melalui skenario kedua ini penduduk rata-rata tumbuh 0,83% setiap tahun. Dengan adanya perbaikan kesehatan bayi, usia harapan hidup pada saat lahir juga relatif meningkat dibandingkan dengan skenario angka kematian bayi menurun dengan kecepatan relatif lebih rendah (1% per tahun).

Hasil Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045 dengan Skenario TFR 2,1

INDIKATOR	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (juta orang)	255,6	269,6	282,4	294,1	304,2	312,5	318,9
TFR	2.17	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10
IMR	17,13	14,75	13,28	12,38	11,82	11,49	11,28
Usia Harapan Hidup Saat Lahir	72,5	73,4	74,1	74,6	75,0	75,3	75,5

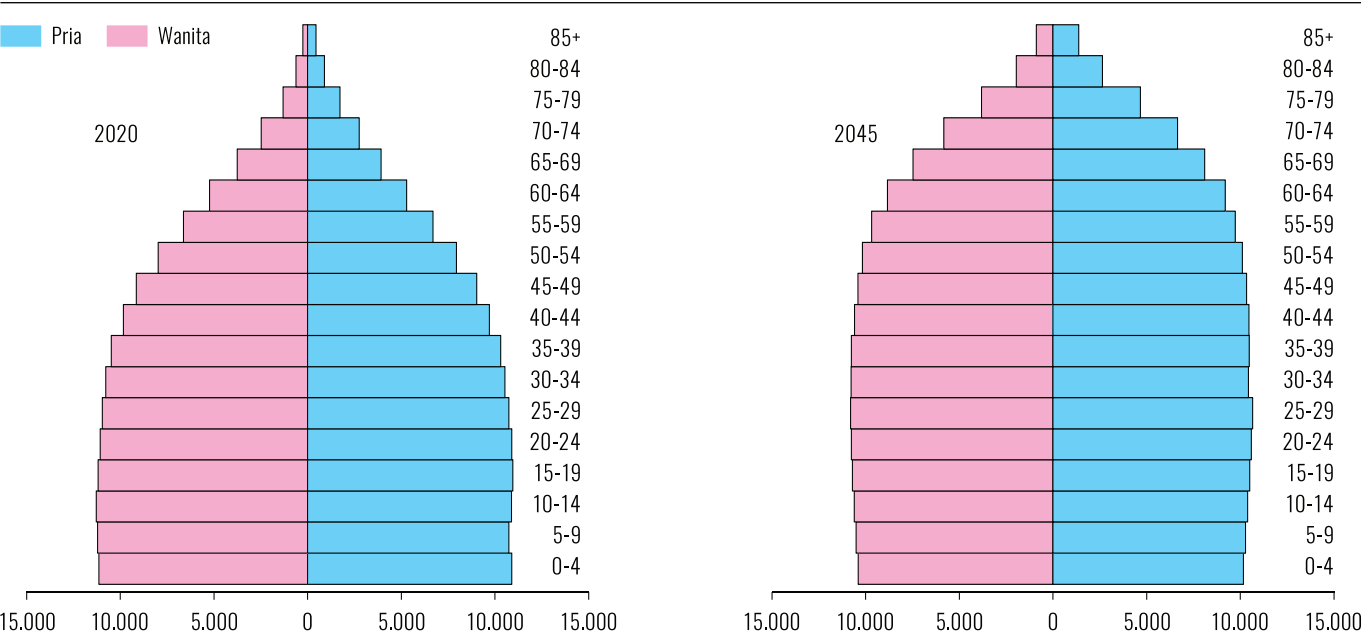
Apabila kita bandingkan hasil proyeksi tersebut dengan hasil proyeksi yang telah dilakukan oleh *UN Population Division* hasil revisi tahun 2017, skenario yang mendekati adalah skenario *instant replacement rate*. Melalui skenario ini, UN memperkirakan bahwa jumlah penduduk kita sebesar 318,2 juta pada tahun 2045. Angka TFR pada tahun yang sama adalah 2,1 sementara Angka Kematian Bayi adalah sekitar 12. Kedua indikator ini sangat mendekati. Namun demikian, Usia Harapan Hidup pada saat lahir agak lebih pendek yaitu hanya sekitar 72 tahun.

Hasil Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045 menurut UN Revisi 2017

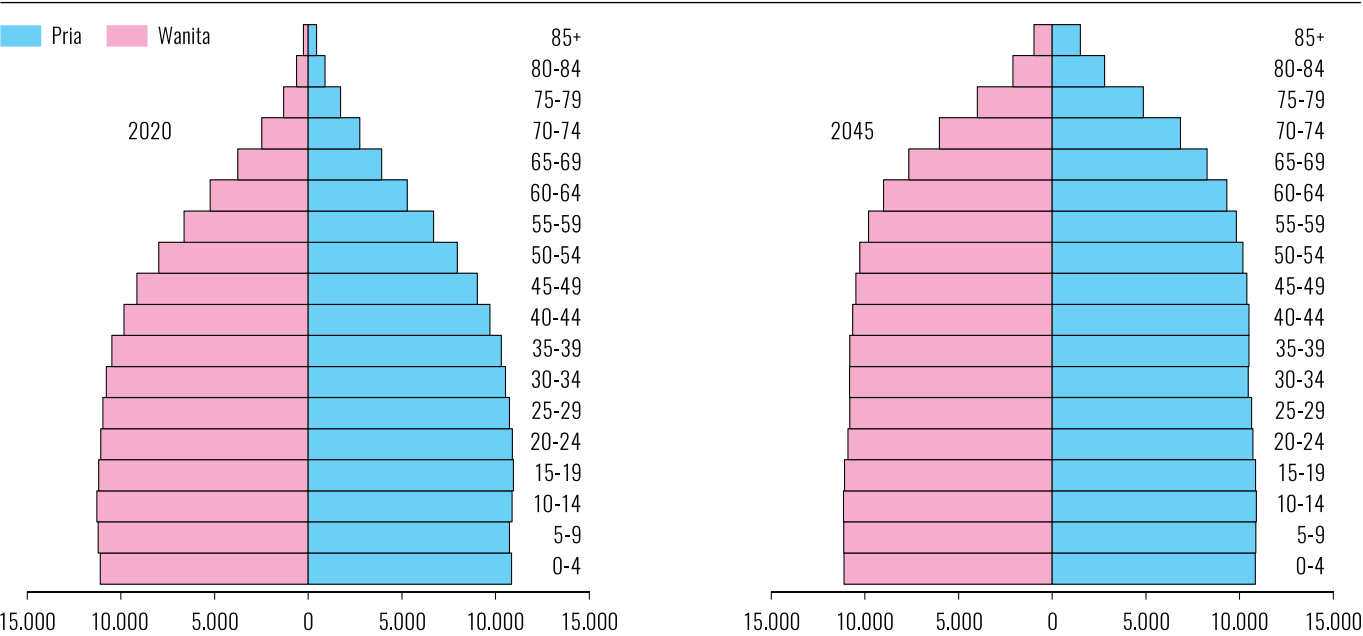
INDIKATOR	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (juta orang)	258,2	270,4	282,1	292,9	302,9	311,3	318,2
TFR		2,14	2,13	2,11	2,11	2,1	2,1
IMR (3%)		21	19	16	14	13	12
Usia Harapan Hidup Saat Lahir	69,35	69,95	70,54	71,1	71,64	72,18	72,75

Perkiraan penduduk di atas tentunya sangat bergantung pada pilihan kebijakan kita ke depan dan bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan dengan efektif. Saat ini meskipun kondisi TFR menunjukkan angka 2,28 menurut Supas 2015, angka TFR setiap provinsi sangat berbeda dan bervariasi. Oleh karena itu, kebijakan umum secara nasional untuk menjaga TFR 2,1 harus merupakan upaya yang terintegrasi semua provinsi. Ada sebagian provinsi yang harus menurunkan TFR, dan sebagian provinsi lain harus meningkatkan TFR karena terancam TFR pada provinsi tersebut terancam terjun bebas. Struktur penduduk hasil proyeksi pada kedua skenario tidak menunjukkan perbedaan dalam jangka pendek. Pada tahun 2020, strukturnya hampir sama. Sementara, pada tahun 2045 struktur penduduk sudah memperlihatkan perbedaan yang cukup mencolok, terutama pada penduduk usia muda. Pada skenario trend, karena jumlah anak per satu perempuan semakin turun, maka pengaruhnya terhadap jumlah penduduk usia muda terlihat berkurang pada tahun 2045. Sementara proyeksi dengan mempertahankan jumlah anak pada tingkat *replacement rate*, jumlah anak terlihat seimbang dengan jumlah penduduk usia di atasnya. Penuaan penduduk sudah mulai terlihat pada kedua skenario tersebut.

Piramida Penduduk Tahun 2020 dan 2045 Skenario TFR Trend



Piramida Penduduk Tahun 2020 dan 2045 Skenario TFR 2,1

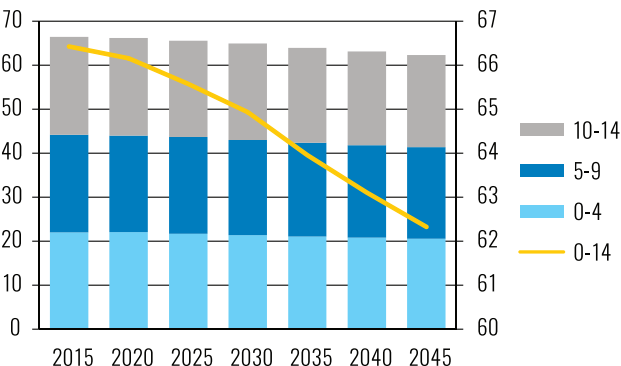


D. PERKEMBANGAN STRUKTUR PENDUDUK

Perkembangan struktur penduduk akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan indikator yang ditetapkan. Apabila kita membiarkan TFR menurun terus, tentunya jumlah anak masa depan akan terus mengalami penurunan. Perbedaan yang sangat terasa adalah jumlah penduduk usia muda yang terus. Pada tahun 2045, penduduk usia muda menurun menjadi sekitar 61 juta orang, dari 66,4 juta usia muda pada tahun 2015. Penurunan terjadi sekitar 5 juta orang dalam waktu 30 tahun. Sementara apabila kita pertahankan jumlah anak rata-rata dua orang setiap tahunnya, maka penurunan terjadi sementara.

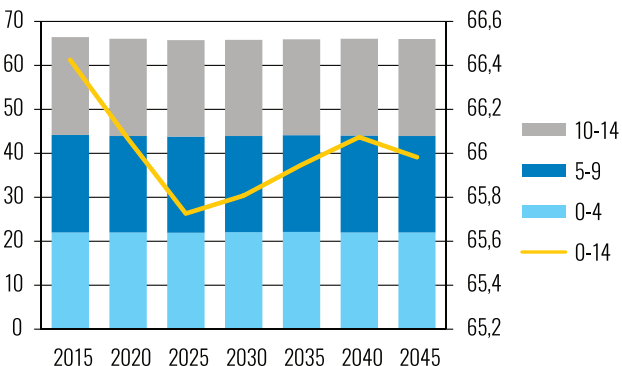
Penduduk usia muda dengan TFR yang terus menurun

* Dalam Juta Orang



Penduduk usia muda dengan TFR dijaga pada tingkat Replacement Rate

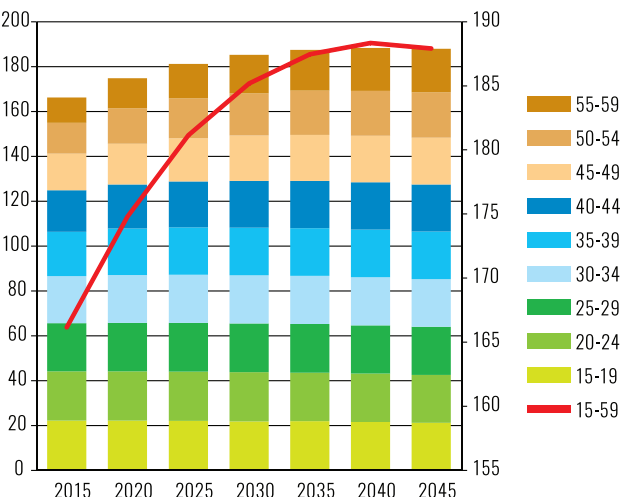
* Dalam Juta Orang



Penurunan jumlah anak memberikan konsekuensi terhadap jumlah penduduk usia produktif yang menurun dalam jangka panjang. Jumlah penduduk usia produktif mengalami puncak pada tahun 2040-an untuk kemudian menurun dan mencapai sekitar 187 juta pada tahun 2045. Usia produktif ini diproyeksikan akan terus menurun, terutama pada kelompok umur 15-39. Sementara dalam skenario kedua jumlah penduduk usia produktif akan relatif stabil pada tahun 2040 dan seterusnya. Jumlahnya mencapai sekitar 189 juta mulai tahun 2040-an.

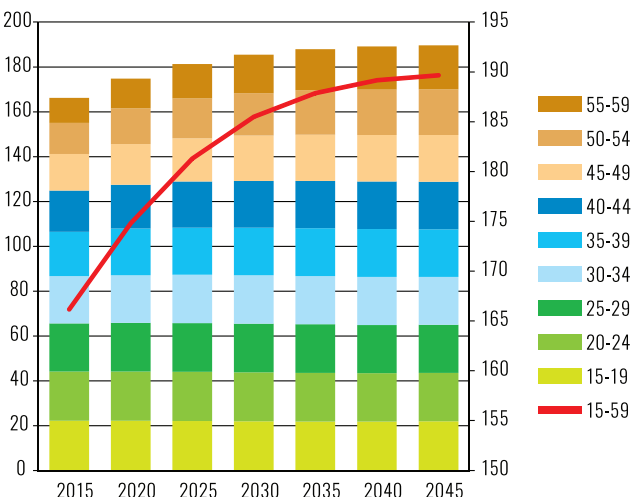
Penduduk usia produktif dengan TFR yang terus menurun

* Dalam Juta Orang



Penduduk Usia Produktif dengan TFR Dijaga Pada Tingkat *Replacement Rate*

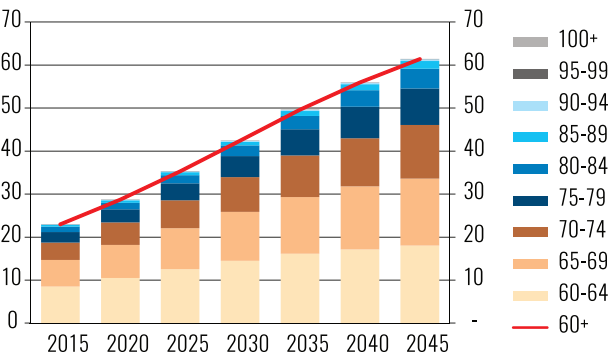
* Dalam Juta Orang



Selain jumlah anak sebagai indikator penentu, tingkat kesehatan bayi yang digambarkan melalui Angka Kematian Bayi menjadi faktor dalam menentukan struktur penduduk ke depan. Untuk kondisi dengan jumlah anak yang terus menurun dan Angka Kematian Bayi yang turun relatif lambat, meski demikian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, menghasilkan penduduk lansia yang relatif lebih sedikit dibandingkan dengan skenario kedua. Perbedaan jumlah penduduk usia lanjut adalah sekitar 2 juta orang pada tahun 2045.

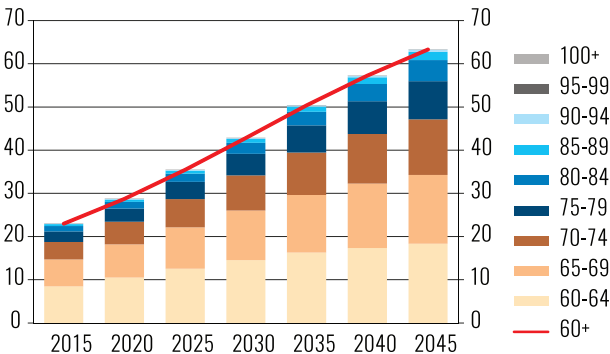
Penduduk lanjut usia dengan TFR yang terus menurun

* Dalam Juta Orang



Penduduk lanjut usia dengan TFR dijaga pada tingkat Replacement Rate

* Dalam Juta Orang

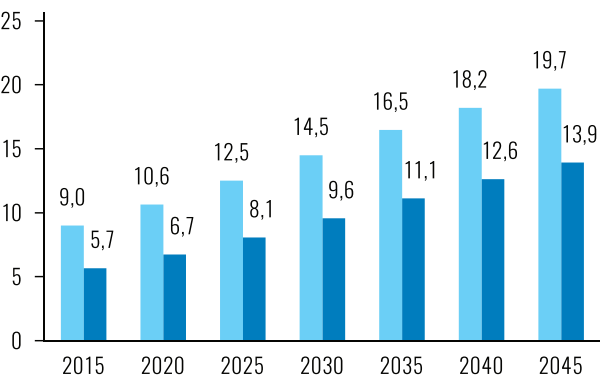


Skenario Kedua menjadikan penduduk Indonesia menjadi “ageing” lebih cepat. Penuaan penduduk yang relatif “lebih cepat” utamanya disebabkan oleh kesehatan penduduk yang semakin baik sehingga usia harapan hidup saat lahir sudah semakin panjang. Penduduk usia lanjut (60+) pada tahun 2045 hampir mencapai 20% dan 14,1% untuk penduduk usia 65+. Sementara, dengan skenario penurunan Angka kematian Bayi yang relatif lambat, persentase penduduk usia 65+ berbeda sekitar 0,2% atau jumlahnya lebih rendah sebesar 1,2 juta.

Persentase penduduk lanjut usia 60+ dan 65+ dengan TFR dan IMR menurun sesuai trend

* Dalam Juta Orang

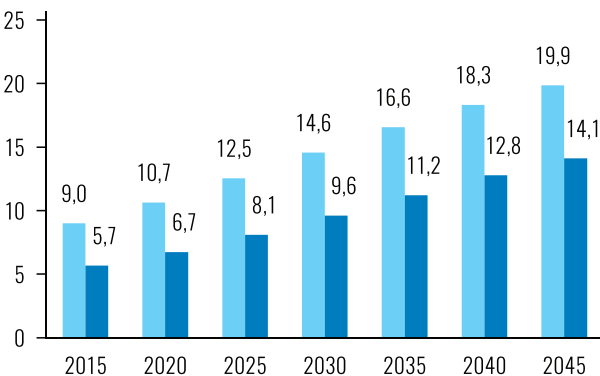
%60+ %65+



Persentase penduduk lanjut usia 60+ dan 65+ dengan TFR pada angka 2,1 dan IMR menurun dengan kecepatan 3% per tahun

* Dalam Juta Orang

%60+ %65+

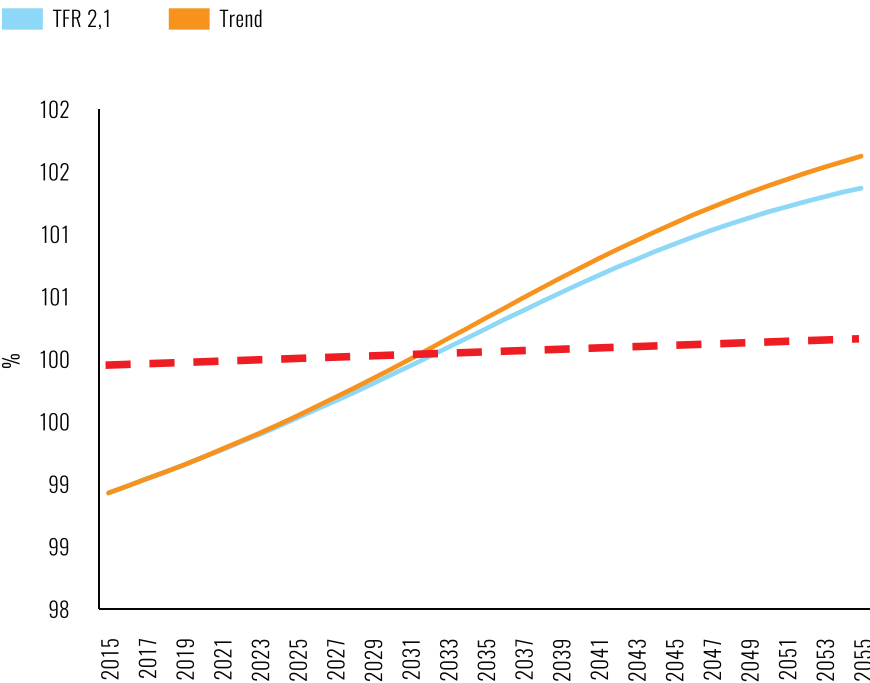




Skenario penurunan Angka Kematian Bayi akan memberikan keuntungan dalam jangka panjang terhadap keseimbangan antara penduduk perempuan dan laki-laki.

Perbedaan skenario penurunan indikator TFR dan Angka Kematian Bayi memberikan konsekuensi terhadap besarnya *Sex Ratio* penduduk perempuan terhadap laki-laki. Terlihat bahwa penurunan Angka Kematian Bayi yang relatif lebih cepat akan memberikan keuntungan kepada penduduk laki-laki. *Sex Ratio* penduduk perempuan dibandingkan dengan penduduk laki-laki menjadi lebih kecil. *Gap* antara kedua penduduk tersebut relatif lebih rendah dibandingkan dengan skenario penurunan Angka Kematian Bayi yang lebih lambat.

Perbandingan penduduk perempuan dan laki laki dengan dua skenario



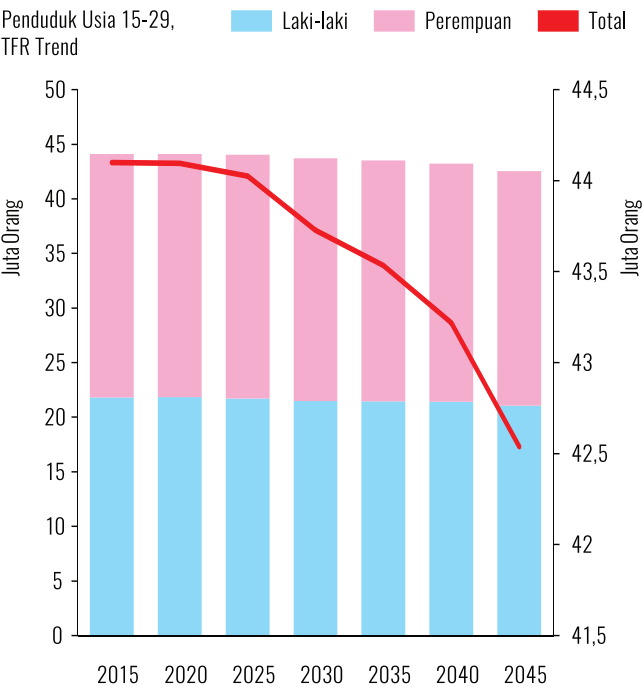
Keuntungan perbaikan kesehatan akan dirasakan dalam jangka panjang. Untuk semua kohor, keuntungan perbaikan kesehatan akan dirasakan oleh penduduk laki-laki pada usia lebih lanjut. Untuk semua kohor, *sex ratio* pada awalnya kurang dari 100, dimana perempuan lebih sedikit dari laki-laki. Dengan skenario *business as usual*, penurunan kematian bayi relatif lebih lambat, seiring dengan penambahan umur, penduduk perempuan lebih banyak. Meskipun tidak terlalu besar perbedaannya, penurunan kematian bayi yang lebih cepat, akan memberikan keuntungan dalam keseimbangan penduduk perempuan terhadap laki-laki pada usia lebih lanjut, terutama setelah 60 tahun.

Sex Rasio Penduduk Perempuan Terhadap Laki-Laki Berdasarkan Kohor dan Skenario Proyeksi

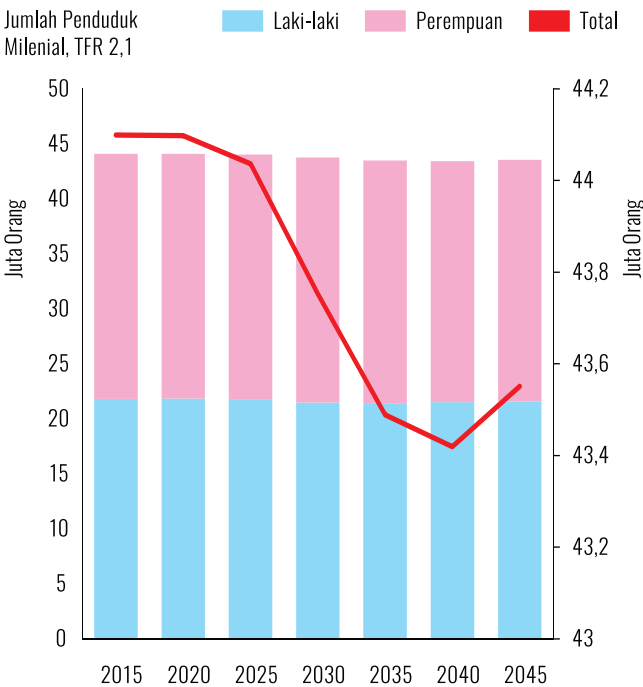
Umur	Skenario	Kohor							
		1950	1960	1970	1980	1990	2000	2010	2020
10	Trend							96	98
	TFR 2,1							96	98
30	Trend					98	99	97	99
	TFR 2,1					98	99	97	99
50	Trend			99	99	99	100		
	TFR 2,1			99	99	99	99		
60	Trend		100	102	103	102			
	TFR 2,1		100	102	103	102			
70	Trend	107	109	111	112				
	TFR 2,1	107	109	111	111				
80	Trend	124	126	128					
	TFR 2,1	124	125	127					

Penduduk usia muda sekarang dan ke depan dikategorikan dengan generasi Z dan Alpha. Generasi Z adalah penduduk yang lahir mulai tahun 1995 sampai 2010. Sementara, penduduk alpha adalah penduduk yang lahir setelah 2010 sampai kemungkinan 2025. Penduduk Z mempunyai karakteristik *technology-based workers*, lebih kompetitif, spontan, berpetualang, dan lebih banyak tahu. Penduduk Alpha adalah penduduk dengan pendidikan yang lebih tinggi. Penduduk usia 15-29 ini yang menjadi ujung tonggak pembangunan. Untuk itu, dengan melihat perkembangan usia penduduk ini, kita bisa melihat bagaimana *fiscal sustainability* program-program pemerintah maupun lembaga keuangan ke depan. Pada skenario dengan penurunan jumlah anak ke depan (TFR mengikuti trend penurunan secara historis), penduduk usia muda 15-29 atau generasi Z dan Alpha ini akan mengalami penurunan terus. Penduduk ini akan kemudian digantikan dengan generasi berikutnya yang relatif lebih sedikit dan berkurang sampai pertumbuhan penduduk mencapai negatif pada tahun 2055-an.

Jumlah penduduk Generasi Z dan Alpha dengan TFR yang Menurun



Jumlah penduduk Generasi Z dan Alpha dengan TFR dijaga pada Replacement Rate (2,1)



Untuk menjaga kesinambungan generasi muda dan kemampuan fiskal, proyeksi penduduk dengan menjaga jumlah anak yang seimbang menghasilkan jumlah penduduk generasi Z dan Alpha yang meningkat pada tahun 2040-an. Peningkatan ini memberikan efek positif jangka panjang dan mempertahankan pertumbuhan penduduk yang lebih stabil. Pada tahun 2045, penduduk usia 15-29 mengalami peningkatan sehingga berjumlah sekitar 43,6 juta orang. Sementara itu, untuk skenario sebelumnya, penduduk usia yang sama pada tahun yang sama hanya berjumlah 42,5 juta dan diperkirakan terus menurun.

“Pada tahun 2045, persentase lansia (60+) sebesar 19,85 persen. Indonesia telah memasuki era baru, *aged population*”

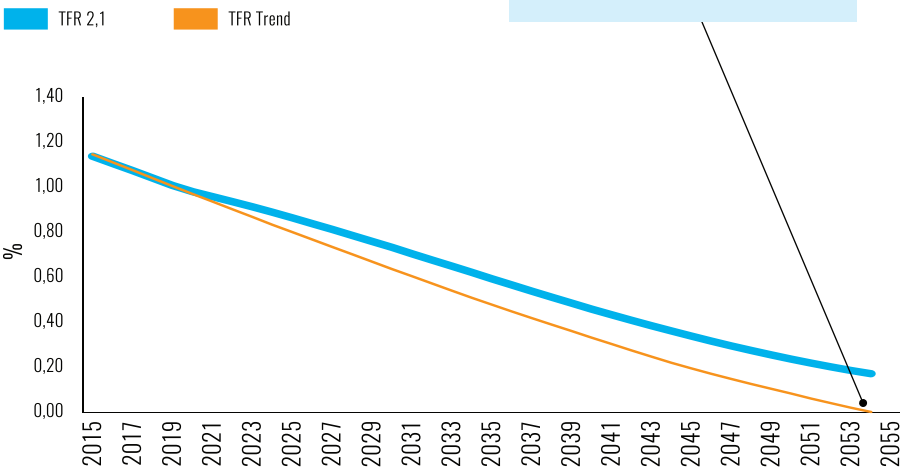
Prof. Bambang P.S. Brodjonegoro dalam launching Proyeksi Penduduk 2045, 24 Agustus 2018

BAGAIMANA KITA MEYAKINKAN BAHWA PENDUDUK TUMBUH SECARA SEIMBANG

Seiring dengan banyak negara di dunia mengalami penuaan dan mengalami pertumbuhan negatif, penduduk Indonesia akan terus berkembang dan bertambah ke depan. Dengan jumlah anak sekitar 2 lebih untuk setiap perempuan memberikan harapan bahwa pertumbuhan penduduk negatif masih jauh akan terjadi. Namun demikian, Indonesia yang terdiri dari 34 provinsi mempunyai keanekaragaman yang luas. Apabila dilihat jumlah anak setiap provinsi, angkanya sangat bervariasi dan sebagian provinsi telah mengalami penuaan yang cukup cepat. Provinsi tersebut memiliki jumlah anak di bawah 2 per setiap perempuan. Untuk itu, terdapat tantangan yang cukup nyata untuk mempertimbangkan keanekaragaman ini dengan kebijakan yang khusus untuk setiap provinsi.

Untuk menjawab tantangan tersebut, skenario menjaga jumlah anak pada tingkat *replacement rate* diperlukan. Dalam skenario ini, terdapat beberapa provinsi memerlukan kebijakan khusus untuk membentuk keluarga yang sejahtera dengan jumlah anak yang cukup. Sebagian provinsi masih memiliki rata-rata Tingkat Fertilitas yang cukup tinggi, sehingga membutuhkan kebijakan yang khusus dan efisien dalam mencapai keluarga yang sejahtera. Dengan kedua skenario tersebut, pertumbuhan penduduk untuk skenario jumlah anak yang dijaga pada angka 2,1 memperlihatkan pertumbuhan yang stabil dalam jangka panjang. Pada tahun 2055, pertumbuhan penduduk masih terjaga sekitar 0,2%.

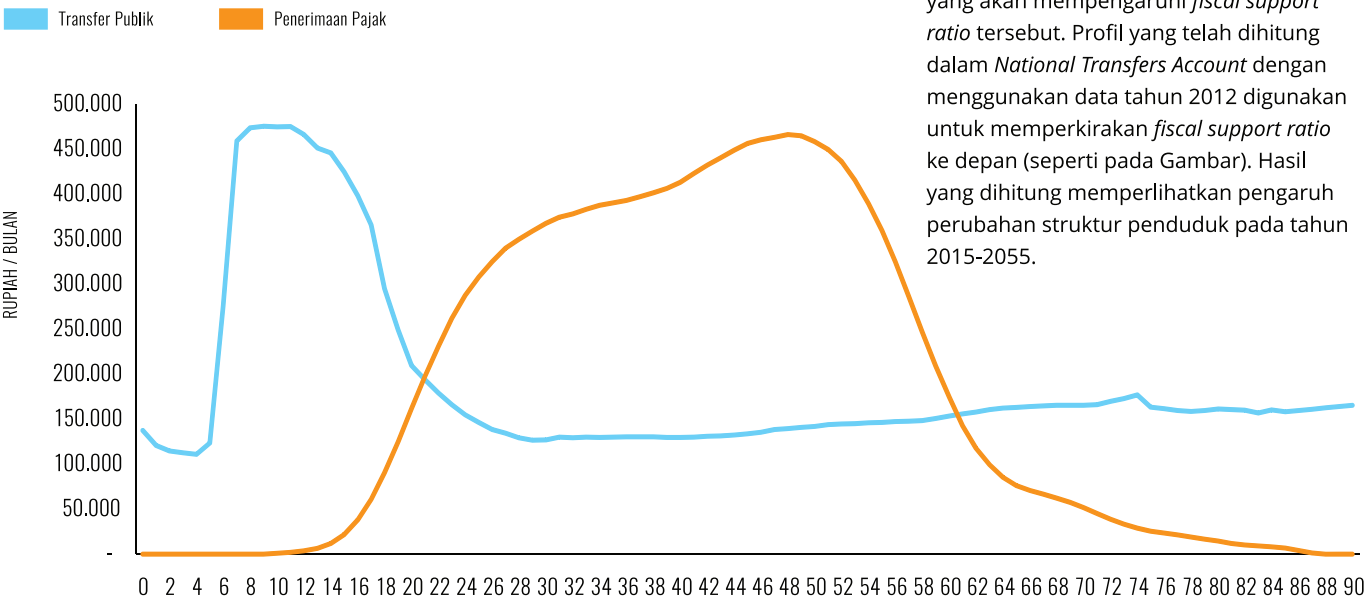
Pertumbuhan Penduduk Berdasarkan Dua Skenario Proyeksi Penduduk (%)



Hal apalagi yang menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan pendudukan? kebijakan pendudukan yang diambil akan sangat mempengaruhi seluruh sektor, termasuk pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal, program sosial, dan sebagainya. Untuk itu, pertimbangan kesinambungan fiskal dalam menentukan kebijakan kependudukan sangat penting.

Salah satu pengukuran kesinambungan fiskal adalah dengan mengukur *fiscal support ratio* dalam jangka panjang. *Fiscal support ratio* dihitung berdasarkan perbandingan proyeksi penerimaan pajak terhadap transfer publik terhadap penduduk. Profil penerimaan pajak dan transfer publik diambil dari model Mason (2018) melalui metode *National Transfers Account* (NTA). Asumsi yang dipakai adalah profil menurut umur tersebut dianggap tetap selama proyeksi tersebut. Dalam hal ini, pengaruh perubahan struktur penduduk yang akan mempengaruhi *fiscal support ratio* tersebut. Profil yang telah dihitung dalam *National Transfers Account* dengan menggunakan data tahun 2012 digunakan untuk memperkirakan *fiscal support ratio* ke depan (seperti pada Gambar). Hasil yang dihitung memperlihatkan pengaruh perubahan struktur penduduk pada tahun 2015-2055.

Profil umur transfer publik dan penerimaannya per kapita per bulan, 2012

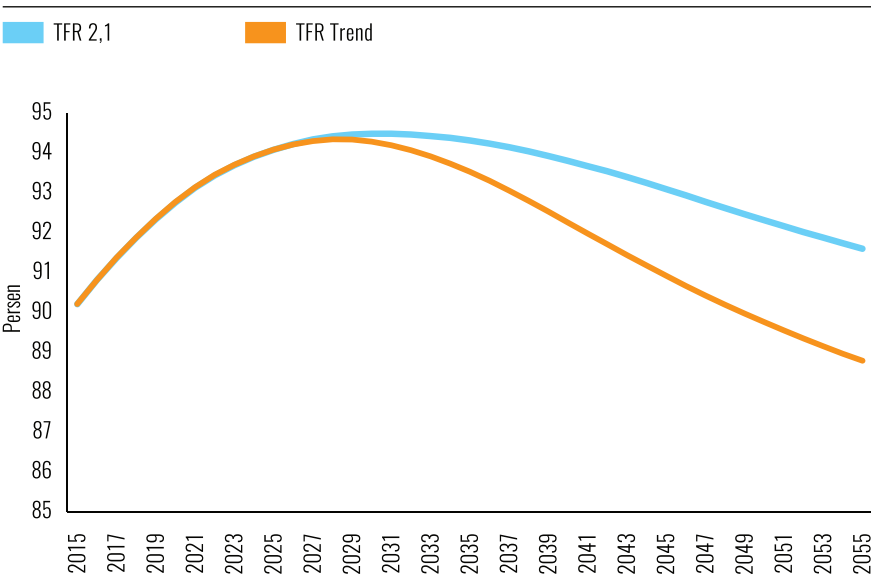


Fiscal support ratio terlihat terus meningkat pada kedua skenario. Namun, seiring dengan pengurangan penduduk usia muda pada skenario TFR yang menurun, maka *fiscal support ratio* pun mengalami puncak pada tahun 2027 sebelum akhirnya mengalami penurunan. Meskipun pada saat puncak *fiscal support ratio* itu sebesar 94%, indikator ini terus mengalami penurunan sampai mencapai 89% pada tahun 2055. Hal ini akan menimbulkan permasalahan ke depan dalam menopang kebijakan publik. Sementara itu, skenario dengan TFR yang dijaga 2,1 memperlihatkan *fiscal support ratio* secara konsisten lebih tinggi, dengan puncak yang relatif lebih lama pada angka 94%. Meskipun terjadi penurunan, namun skenario ini relatif lebih baik.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, *fiscal support ratio* dapat dijaga apabila kita dapat menjaga pertumbuhan penduduk yang seimbang.

Hasil proyeksi penduduk mencakup pertumbuhan penduduk, perubahan struktur umur, dan distribusi penduduk. Proyeksi tidak hanya berimplikasi terhadap jumlah penduduk tetapi juga pada implikasi peningkatan “kualitas” dan kebijakan yang perlu dilakukan. Proyeksi memberikan implikasi pada penggunaan satu sumber data dalam perencanaan kebijakan di bidang sosial, secara spesifik pada isu kependudukan. Proyeksi diharapkan dapat digunakan untuk data dasar dalam penyusunan perencanaan berbagai sektor, baik penentuan indikator ekonomi maupun target pembangunan dan indikator sosial lainnya.

Fiscal Support Ratio untuk kedua skenario proyeksi penduduk



Pemanfaatan Hasil Proyeksi



IMPLIKASI KEBIJAKAN DALAM MENJAGA PENDUDUK TUMBUH SEIMBANG

2015		2045
255,1 juta	Jumlah Penduduk	318,9 juta
2,28	Total Fertility Rate	2,1
70,8 tahun	Harapan Hidup	75,5 tahun
21,6 juta	Jumlah Lansia (60+)	63,3 juta
49,2%	Rasio Ketergantungan	53,5%
53,1%	Penduduk tinggal di perkotaan	67,1%

Dalam empat puluh tahun terakhir, jumlah penduduk meningkat dari 119,2 juta di tahun 1971 menjadi 255,1 juta pada tahun 2015. Begitu juga dengan usia harapan hidup yang meningkat lebih dari dua puluh poin menjadi 70,8 tahun di tahun 2015. Namun demikian, penurunan TFR akan terus terjadi. Apabila dibiarkan, TFR akan mendekati 1,9 pada tahun 2045. Dengan TFR 1,9, pertumbuhan penduduk akan mencapai negatif sekitar tahun 2060. Trend ini akan meningkatkan beban fiskal di masa depan.

Penambahan pengeluaran pemerintah untuk pendidikan, keterampilan, dan kesehatan pada saat ini cukup besar untuk terus meningkatkan *human capital*. Dengan penuaan penduduk, pengeluaran yang berhubungan dengan kesehatan, maupun perawatan jangka panjang bagi orang tua, akan semakin meningkat. Beban santunan lansia atau *support system* untuk para penduduk usia lanjut dan rentan akan membebani generasi muda melalui pembayaran pajak mereka. Terlebih apabila penduduk muda semakin menurun, sehingga beban per kapita semakin meningkat. Sistem Jaminan Sosial kita diharapkan mampu untuk menjawab tantangan tersebut. Namun demikian, permasalahan-nya adalah kepesertaannya yang masih belum menyeluruh sehingga beban program juga menjadi berat, terutama untuk Sistem Jaminan Kesehatan Nasional.

Angka Kematian Bayi (*Infant Mortality Rate*) mempengaruhi bagaimana besarnya beban masa depan. Tingkat kesehatan yang baik sehingga Usia Harapan Hidup Sehat pada saat usia lanjut mendekati Usia Harapan Hidup pada usia yang sama akan memperingan beban fiskal ke depan. Penurunan IMR terjadi secara konsisten dari tahun ke tahun. Dengan tren tersebut, IMR akan menjadi sekitar 16 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2045. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan Malaysia dan Thailand. Selain itu, penurunan dengan kecepatan tersebut tidak mampu bagi Indonesia untuk mencapai target yang telah menjadi komitmen internasional dalam SDGs. Oleh karena itu, diperlukan penurunan sekitar 3% per tahun untuk mencapai SDGs.



Beberapa strategi jangka panjang yang dapat dilakukan dalam menjaga keseimbangan penduduk tersebut.

PERTAMA, Pemerintah Daerah perlu mengupayakan angka kelahiran pada tingkat *replacement rate*.

KEDUA, untuk tetap mendukung produktivitas yang tinggi dan mencegah arus perpindahan penduduk yang tidak terkendali, daerah tersebut perlu meningkatkan konektivitas dengan kota-kota satelitnya. Hal ini perlu ditunjang oleh sistem registrasi penduduk yang mumpuni untuk menata dinamika perpindahan penduduk tersebut.

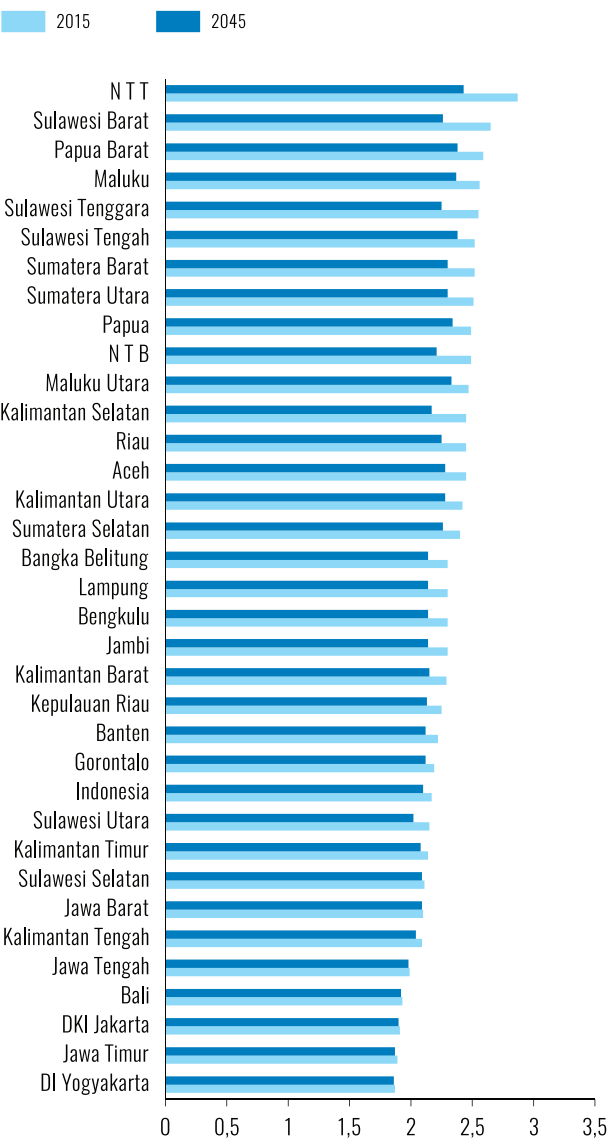
KETIGA, menjamin pendidikan dan kesehatan anak berkualitas serta pengaturan waktu kerja yang fleksibel bagi perempuan dan laki-laki untuk meningkatkan partisipasi kerja lebih luas.

Kebijakan khusus masing-masing provinsi: provinsi Jawa-Bali mengalami transisi yang cepat dengan TFR < 2

Pengalaman perubahan struktur penduduk yang berbeda memberikan konsekuensi terhadap komposisi penduduk yang bervariasi antar provinsi. Sebagian besar provinsi di Indonesia bagian Timur relatif lebih muda dibandingkan dengan provinsi di bagian barat, terutama provinsi di Pulau Jawa. Sebagian provinsi bahkan dengan kecenderungan yang ada, baik dari tingkat TFR, IMR, maupun pola migrasi, tidak akan mendapatkan momentum perubahan struktur penduduk yang menguntungkan.

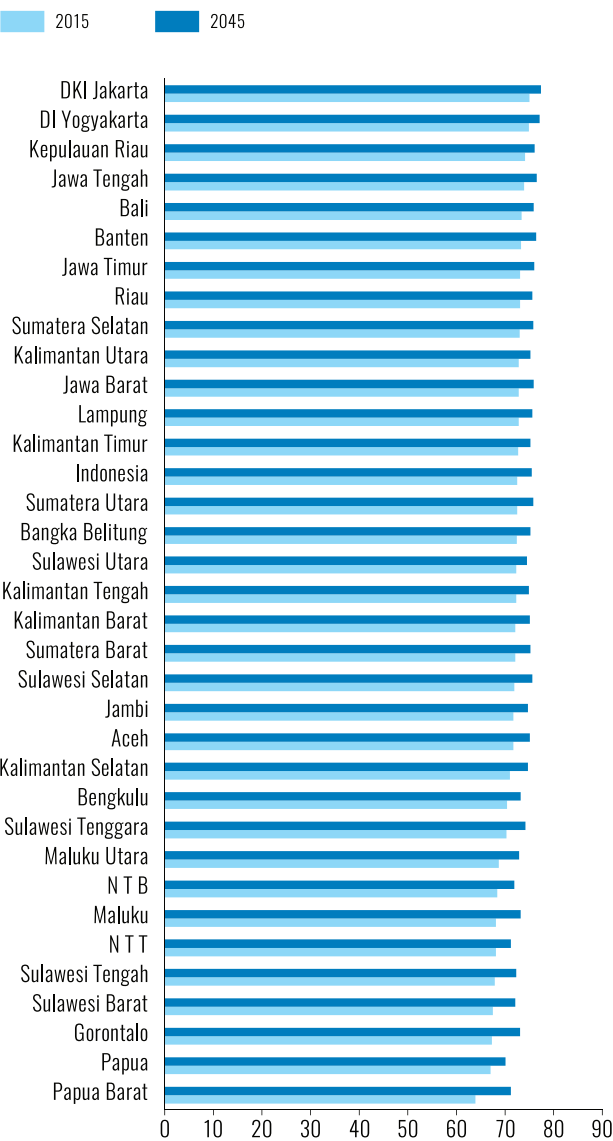
Kebijakan khusus untuk provinsi yang telah mengalami periode “Late transition” dengan karakteristik TFR sudah rendah bahkan di bawah replacement rate TFR dengan kriteria proporsi penduduk usia tua tinggi dan window of opportunity sudah lewat. Terhadap kondisi tersebut perlu mempersiapkan Ageing Population lebih baik dan menjaga keseimbangan pertumbuhan penduduk. Ageing population tersebut terlihat dari variasi Usia Harapan Hidup sejak lahir antar provinsi. Sebagian provinsi dengan komposisi penduduk usia lanjut yang tinggi, relatif memiliki Usia Harapan Hidup tersebut lebih panjang, seperti DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. Hal ini tentunya harus didukung melalui peningkatan kualitas penduduk dan membangun infrastruktur yang mendukung karakter penuaan penduduk.

Perkembangan TFR 2015-2045,
Menurut Skenario TFR 2,1



Selanjutnya, di daerah yang memiliki angka kelahiran dan tingkat kematian yang tinggi, seperti Maluku, Papua, NTT, dan Sulawesi Tenggara dalam jangka panjang, Pemerintah Daerah terutama harus terus mendorong pelaksanaan Keluarga Berencana untuk membentuk keluarga sejahtera. Hal ini juga diiringi dengan peningkatan akses pendidikan dan kesehatan serta kepesertaan jaminan sosial perlu dipermudah bagi masyarakat, terutama masyarakat rentan. Pemerintah perlu bekerja sama secara masif dan inovatif dengan pelaku pembangunan di daerah, terutama NGO atau LSM, yang dapat memberikan pemahaman yang positif dari masyarakat untuk dapat secara aktif membentuk keluarga sejahtera.

Usia Harapan Hidup Dari Lahir,
Menurut Skenario Penurunan IMR 3%





4 TANTANGAN DAN KEBIJAKAN OPTIMALISASI BONUS DEMOGRAFI



BAGIAN 4

TANTANGAN DALAM MEMANFAATKAN PERUBAHAN STRUKTUR PENDUDUK

A. PERIODE BONUS DEMOGRAFI

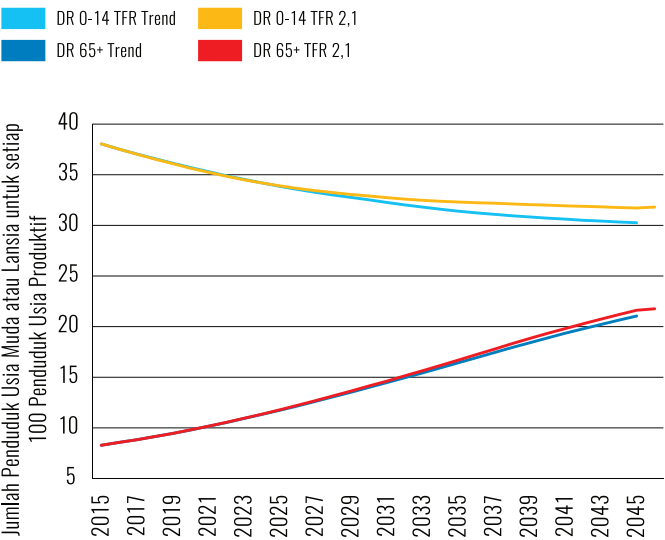
Indonesia telah mengalami perubahan demografi yang cepat dimana jumlah penduduk usia produktif terus meningkat dan mencapai puncak pada sekitar 2030. Dalam periode tersebut, Indonesia menjadi salah satu negara dengan angkatan kerja terbanyak di Asia. Namun pada saat yang sama, angka ketergantungan mengalami peningkatan karena jumlah penduduk usia tua (65+) meningkat. Hingga pada tahun 2045, Indonesia sudah menjadi *ageing society* dengan perkiraan penduduk tua sudah mencapai 14 persen. Penyelenggara negara perlu mempertimbangkan kebijakan pembangunan penduduk yang dapat mengoptimalkan perubahan struktur tersebut.



Bonus demografi adalah dampak perubahan struktur umur penduduk suatu bangsa. Perubahan struktur penduduk yang menguntungkan adalah dimana penduduk usia produktif terus meningkat sementara jumlah penduduk usia non-produktif berkurang. Apabila proses ini terjadi, tekanan secara ekonomi terhadap penduduk usia produktif akan terus menurun. Untuk itu, bonus demografi dapat dihitung dengan membandingkan penduduk usia tua dan muda dengan penduduk usia produktif yang disebut *Dependency Ratio* atau Angka Ketergantungan. Angka ketergantungan dapat juga dinyatakan secara parsial, yaitu Angka Ketergantungan Penduduk Muda atau Angka Ketergantungan Tua. Bonus demografi terjadi pada periode terjadinya penurunan Angka Ketergantungan sampai akhirnya mengalami kenaikan kembali.

Melalui dua skenario proyeksi terlihat bahwa dua hasil proyeksi tersebut sangat berbeda pada Angka Ketergantungan Usia Muda. Penurunan Angka Ketergantungan Usia 0-14 pada skenario TFR 2,1 mulai mengalami perlambatan pada tahun 2037. Hal ini merupakan konsekuensi dari mempertahankan jumlah anak pada tingkat *replacement rate*. Sementara pada skenario pertama, yaitu TFR terus menurun, akan memperkecil jumlah anak di kemudian hari. Hal ini tentunya akan mempercepat penurunan Angka Ketergantungan 0-14.

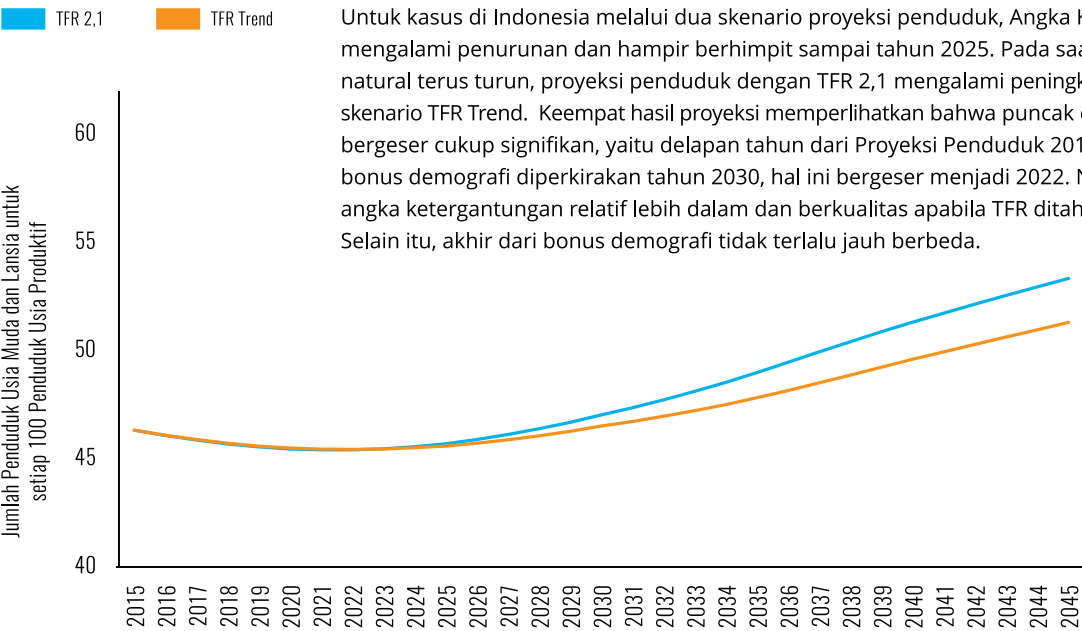
Angka Ketergantungan 0-14 dan 65+ Dengan Dua Skenario Proyeksi Penduduk



Angka ketergantungan usia lanjut atau penduduk usia 65+ pada dua skenario tidak memberikan perbedaan seperti sebelumnya. Namun demikian, proyeksi penduduk dengan skenario TFR 2,1 disertai dengan skenario penurunan Angka Kematian Bayi yang cukup cepat. Oleh karena itu, peningkatan tingkat kesehatan akan memberikan tambahan usia harapan hidup setelah lahir dan meningkatkan jumlah penduduk lansia pada masa depan. Untuk itu, Angka Ketergantungan Lansia pada skenario ini relatif lebih tinggi, meskipun perbedaannya tidak mencolok.

Angka ketergantungan total mengkombinasikan penduduk usia muda dan lansia terhadap penduduk usia produktif. Angka ini memberikan gambaran secara total bagaimana beban seorang penduduk usia produktif dalam populasi. Angka ketergantungan ini banyak menjadi acuan bagi pemangku kebijakan untuk melihat bagaimana kesempatan suatu negara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mengambil keuntungan dari peningkatan penduduk usia produktif ini.

Angka Ketergantungan dengan Dua Skenario Proyeksi Penduduk



Untuk kasus di Indonesia melalui dua skenario proyeksi penduduk, Angka Ketergantungan Total mengalami penurunan dan hampir berhimpit sampai tahun 2025. Pada saat 2025, dimana TFR secara natural terus turun, proyeksi penduduk dengan TFR 2,1 mengalami peningkatan dan “terpisah” dari skenario TFR Trend. Keempat hasil proyeksi memperlihatkan bahwa puncak dari bonus demografi bergeser cukup signifikan, yaitu delapan tahun dari Proyeksi Penduduk 2010-2035. Semula puncak bonus demografi diperkirakan tahun 2030, hal ini bergeser menjadi 2022. Namun demikian, besaran angka ketergantungan relatif lebih dalam dan berkualitas apabila TFR ditahan pada *Replacement Rate*. Selain itu, akhir dari bonus demografi tidak terlalu jauh berbeda.

Perbandingan Periode Bonus Demografi Proyeksi 2015-2045, Proyeksi 2010-2035, dan Proyeksi UN

SKENARIO	Angka Ketergantungan Total Mencapai Minimum	Besar Angka Ketergantungan	Tahun Berakhir (AK=50%)
TFR Trend	2022	45,42	2042
TFR 2,1	2022	45,44	2038
Proyeksi 2010-2035	2030	46,9	2043
UN Instant Replacement Rate	2025-2030	46,41	2045-2050

Perubahan struktur umur penduduk dapat mendorong Indonesia memasuki era “bonus demografi” dimana terdapat potensi percepatan pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh terus bertumbuhnya penduduk usia produktif, yang proporsinya relatif lebih besar dibandingkan penduduk usia non-produktif (anak-anak dan lanjut usia). Menurut proyeksi 2015-2045, Indonesia diperkirakan akan terus mengalami penurunan rasio ketergantungan kurang dari 50% sampai tahun 2040 awal. Namun, keuntungan ekonomi yang didapat dari perubahan struktur umur penduduk tersebut tidak otomatis, perlu adanya intervensi pemerintah dalam memanfaatkan besarnya penduduk usia kerja untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Dalam RPJMN 2015-2019, kebijakan pemanfaatan bonus demografi telah dijabarkan dalam agenda pembangunan nasional yang mencakup berbagai bidang antara lain penurunan angka fertilitas, perluasan lapangan kerja, peningkatan partisipasi angkatan kerja tingkat regional serta pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi. Penyusunan serta pelaksanaan kebijakan yang efektif dan responsif terhadap dinamika kependudukan akan menciptakan lingkungan yang kondusif dalam mengoptimalkan bonus demografi.

Seiring dengan hal itu, Negara Indonesia ikut berperan aktif dan komitmen dalam penentuan sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam dokumen *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. Tahun 2017 Presiden meluncurkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Terdapat dua jenis bonus demografi, yaitu:

BONUS DEMOGRAFI PERTAMA, disebabkan oleh perubahan struktur penduduk yang kemudian memberikan keuntungan yang diperoleh dari peningkatan pendapatan per kapita karena meningkatnya jumlah angkatan kerja serta menurunnya konsumsi sebagai akibat dari menurunnya jumlah penduduk usia anak dan rendahnya jumlah penduduk lanjut usia.

BONUS DEMOGRAFI KEDUA, lebih menekankan pada peningkatan akumulasi aset karena meningkatnya angka harapan hidup yang diasumsikan akan mendorong penduduk usia produktif untuk menabung untuk pembiayaan hari tua.

Kebijakan Pemanfaatan
BONUS DEMOGRAFI
dalam RPJMN 2015-2019

Penurunan angka fertilitas

Perluasan lapangan kerja

Peningkatan partisipasi
angkatan kerja tingkat regional

Pengembangan pusat
pertumbuhan ekonomi

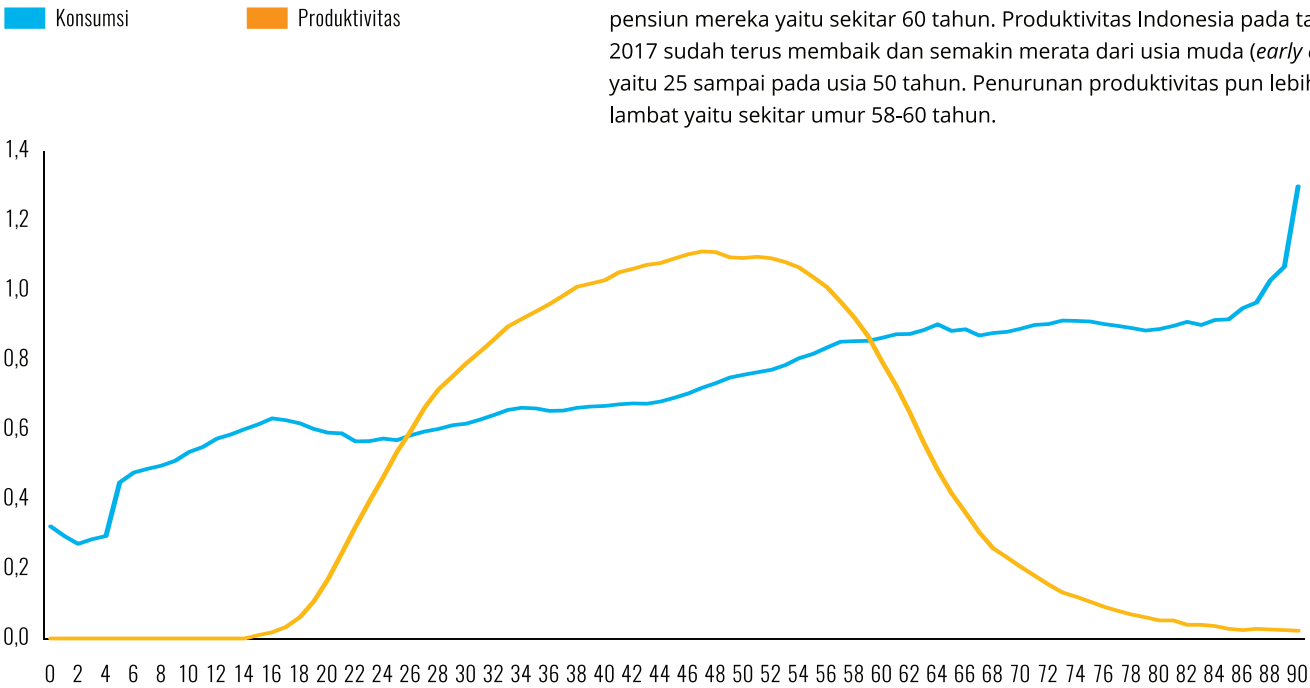
Secara umum tujuan yang ingin dicapai terkait dengan penurunan angka kemiskinan, peningkatan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, maupun peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Pemanfaat bonus demografi akan menjadi suatu pendorong pencapaian tujuan tersebut.

BONUS DEMOGRAFI PERTAMA

Demografi Dividen pertama diraih melalui pertumbuhan daya dukung ekonomi (*growth of economic support ratio*) yaitu pertumbuhan perbandingan produktivitas penduduk bekerja terhadap kebutuhan konsumsi oleh seluruh penduduk (Mason, 2015). *Economic support ratio* menghitung pengaruh perubahan struktur penduduk terhadap kapasitas penduduk untuk berkontribusi terhadap *output* nasional. Produksi dan kebutuhan konsumsi digambarkan dalam profil menurut umur yang menggambarkan perbedaan karakteristik kebudayaan, kebiasaan, dan kelembagaan pada suatu negara ataupun provinsi tertentu. Profil ini dapat berubah secara dinamis karena perubahan produktivitas, kebijakan publik terutama kebijakan *transfers* terhadap masyarakat, dan juga kemajuan teknologi.

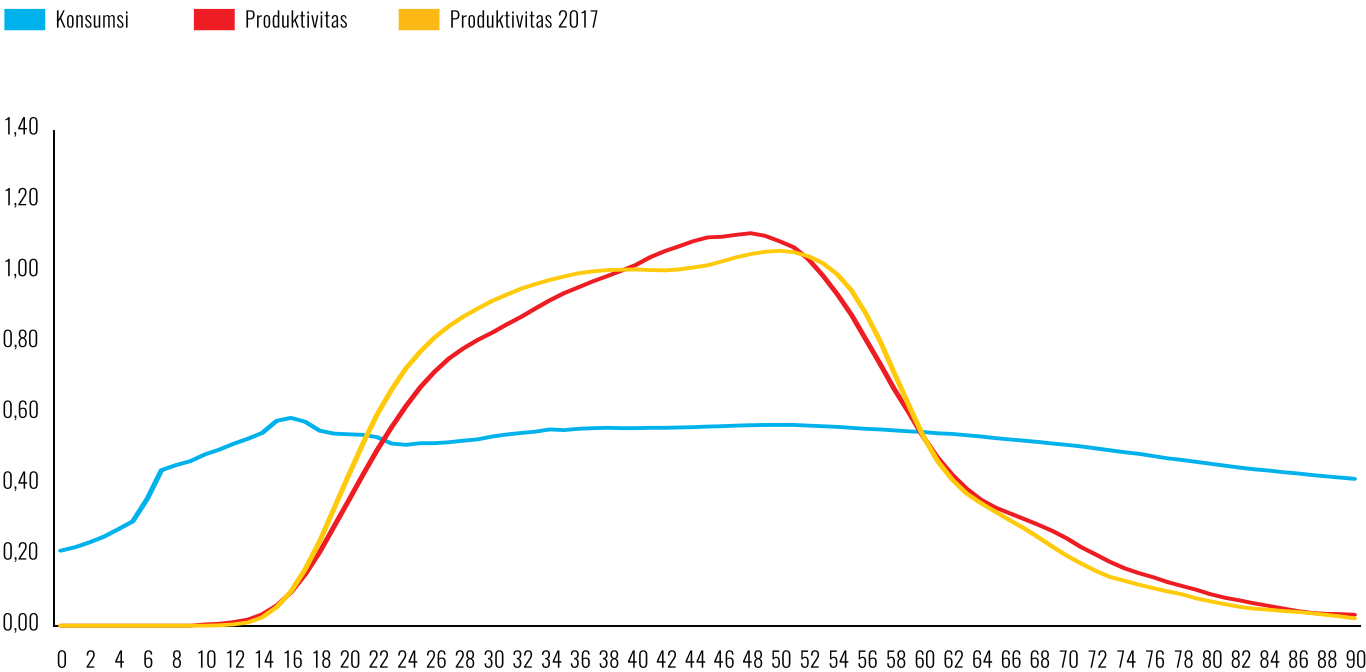
Untuk menggambarkan lebih baik bonus demografi pertama ini, kita perlu mengenal bagaimana produktivitas kita dibandingkan dengan negara lain, serta bagaimana variasi produktivitas tersebut antar provinsi. Produktivitas USA ditampilkan dalam grafik. Produktivitas tersebut ditampilkan sebagai produktivitas relatif terhadap produktivitas penduduk usia produktif usia 30-49. Perbandingan produktivitas antar negara atau provinsi dengan nasional menunjukkan perbandingan produktivitas per umur dibandingkan dengan usia produktif tersebut.

Produktivitas dan Konsumsi USA, 2013



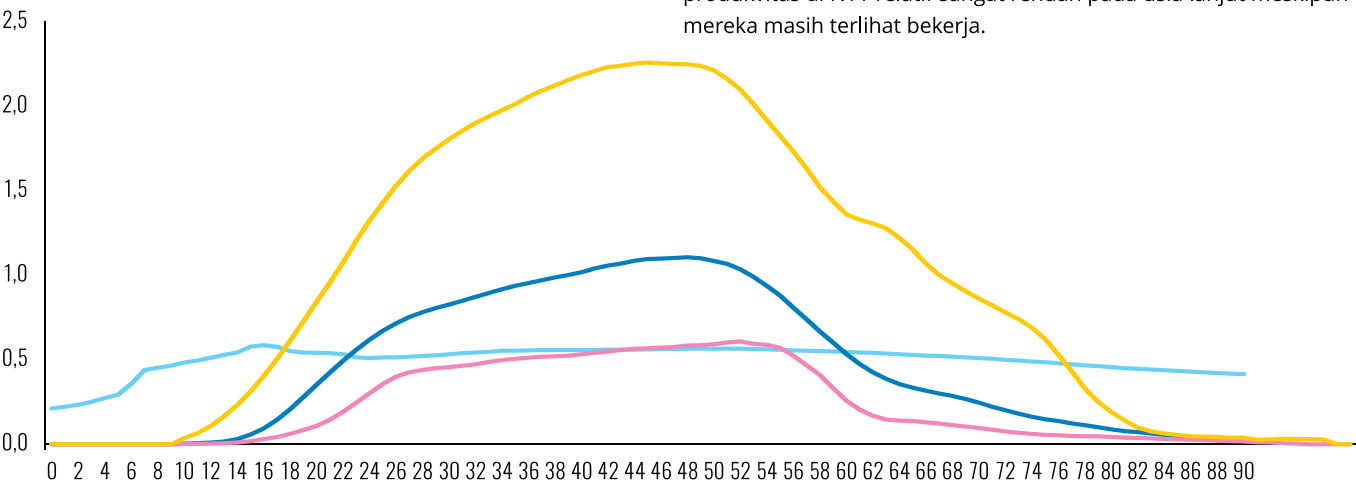
Dibandingkan dengan produktivitas Indonesia pada grafik, produktivitas USA yang dihitung berdasarkan nilai relatif terhadap usia produktivitas 30-49 terlihat hampir sama. Puncak produktivitas terjadi pada usia 47-48 tahun. Di beberapa usia terlihat produktivitas USA lebih baik, terutama setelah usia 50 tahun. Produktivitas Indonesia menurun segera setelah usia pensiun sekitar 50-55, sementara produktivitas USA menurun setelah usia pensiun mereka yaitu sekitar 60 tahun. Produktivitas Indonesia pada tahun 2017 sudah terus membaik dan semakin merata dari usia muda (*early career*) yaitu 25 sampai pada usia 50 tahun. Penurunan produktivitas pun lebih lambat yaitu sekitar umur 58-60 tahun.

Produktivitas dan Konsumsi Indonesia, 2012 dan 2017



Produktivitas dan Konsumsi Indonesia, NTT, Jakarta, 2012

Konsumsi Produktivitas
Produktivitas NTT Produktivitas Jakarta



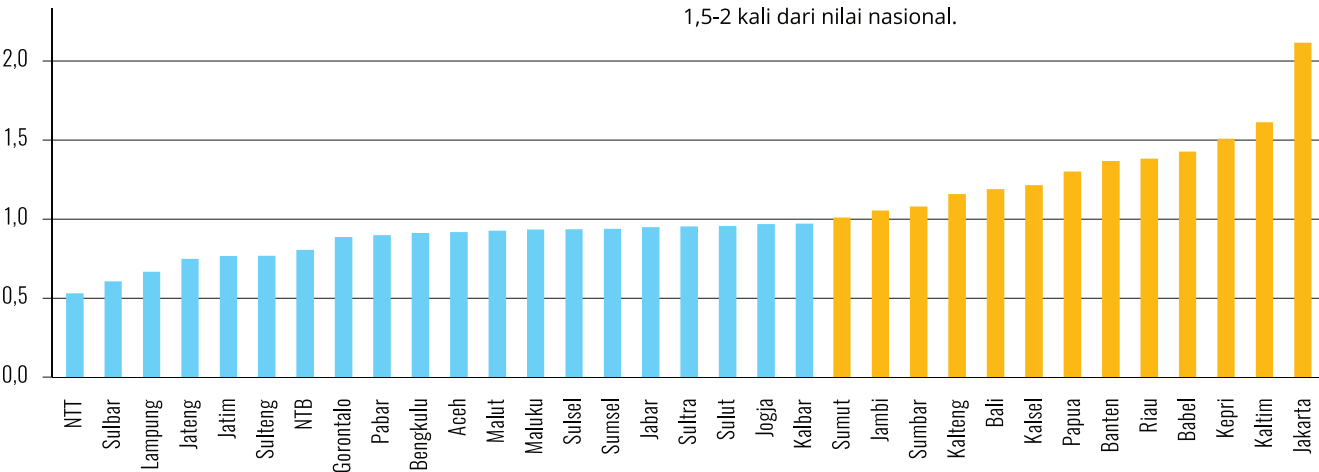
Dalam gambar terlihat bahwa produktivitas nasional secara rata-rata masih jauh di bawah produktivitas DKI Jakarta. Di lain pihak produktivitas provinsi NTT hampir setengahnya secara nasional. Bentuk produktivitas atau profil produktivitas ketiga provinsi juga terlihat relatif berbeda. Rata-rata puncak produktivitas relatif sama. Profil produktivitas DKI Jakarta memperlihatkan rasio yang cukup besar pada usia lanjut, yaitu antara 60-70 tahun. Sementara, profil produktivitas di NTT relatif sangat rendah pada usia lanjut meskipun mereka masih terlihat bekerja.

Perbandingan Produktivitas* Penduduk Usia Produktif (30-49) Tingkat Provinsi Terhadap Nasional

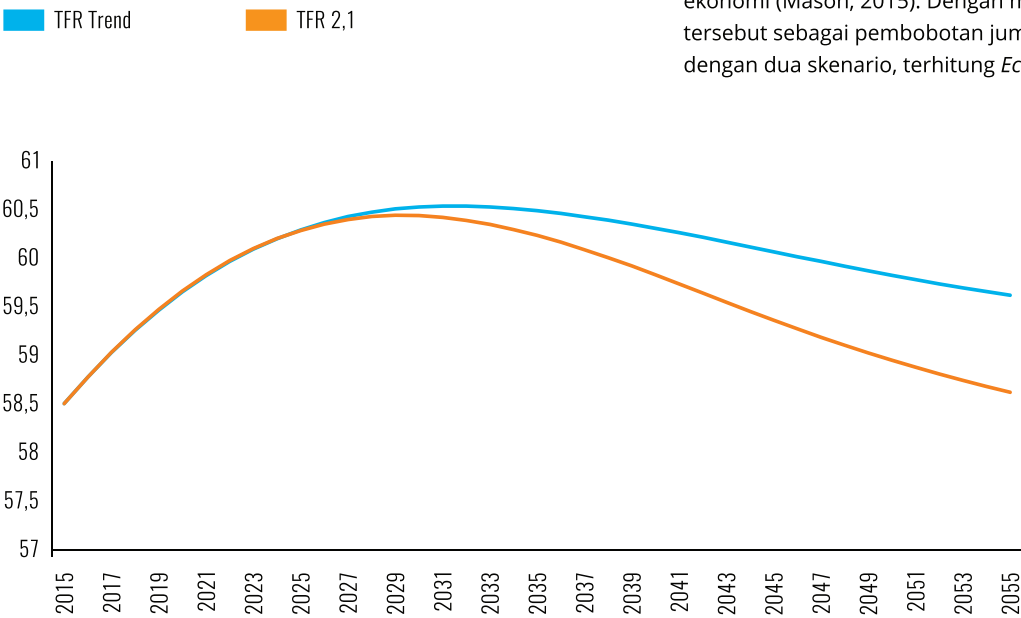
TFR 2,1 TFR Trend

* Produktivitas dihitung dari *labor income* dari *National Transfer Account* (NTA), Mason (2015)

Secara umum perbandingan produktivitas yang dinyatakan dalam *labor income* memperlihatkan variasi yang cukup besar antara provinsi. Dibandingkan dengan produktivitas nasional, terdapat 20 provinsi dengan rata-rata produktivitas rata-rata *prime age* yang masih di bawah nasional. Sementara sisanya, produktivitas provinsi tersebut di atas nasional, dengan yang paling tinggi adalah DKI Jakarta, Kalimantan Timur, dan Kepulauan Riau. Rata-rata produktivitas penduduk usia 30-49 di provinsi tersebut hampir 1,5-2 kali dari nilai nasional.



Economic Support Ratio Menurut
Dua Skenario Proyeksi Penduduk



Dengan menggunakan profil produktivitas tersebut, *Economic Support Ratio* dihitung dan pertumbuhan *Economic Support Ratio* tersebut menjadi potensi kontribusi demografi terhadap pertumbuhan ekonomi (Mason, 2015). Dengan menggunakan data produktivitas tersebut sebagai pembobotan jumlah penduduk menurut proyeksi dengan dua skenario, terhitung *Economic Support Ratio*.

Economic Support Ratio dan First Demographic Dividend untuk Dua Skenario Proyeksi Penduduk 2015-2045

	TFR Trend	TFR 2,1
Akhir Tahun	2031	2029
Puncak <i>Economic Support Ratio</i>	60,5	60,4
Potensi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi (rata-rata dalam %)		
2020-2024	0,25	0,24
2025-2030	0,09	0,04
2031-2045	-0,03	-0,11

Dalam perolehan bonus demografi pertama, proyeksi dengan TFR yang terus menurun akan menghasilkan *Economic Support Ratio* dengan puncak tahun 2031, dua tahun lebih lambat dibandingkan proyeksi dengan menjaga TFR pada tingkat 2,1. Pada saat puncak ini, pertumbuhan ekonomi didukung oleh sekitar 60 pekerja efektif untuk setiap 100 jumlah penduduk. Kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi pada periode 2020-2030 diperkirakan sekitar 0,09-0,25%. Setelah tahun 2030 tersebut, *first demographic dividend* tidak banyak memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Setelah itu, *demographic dividend* dapat dinikmati dalam bentuk *Second Demographic Dividend*, yaitu demografi dividen sebagai hasil investasi *physical capital* dan peningkatan produktivitas pekerja.

B. BONUS DEMOGRAFI PROVINSI

Momentum bonus demografi terjadi berbeda-beda di setiap provinsi. Beberapa provinsi seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta sudah mulai memasuki periode bonus demografi lebih awal (pada sekitar tahun 2000 dan 2010-an) dan diperkirakan akan berakhir pada sekitar tahun 2030-an kecuali DKI Jakarta, Bali, Jawa Barat, dan Banten yang memiliki jendela kesempatan lebih lebar. Selain itu, Kepulauan Riau memiliki puncak bonus demografi yang lebih dalam dengan jangka waktu bonus demografi yang lebih panjang karena net migrasi yang positif dan fertilitas yang rendah.

Provinsi lainnya seperti Aceh, Riau, Maluku, Papua Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Sumatera Barat, Sulawesi Barat, dan Nusa Tenggara Barat memasuki periode bonus demografi lebih lambat (paling cepat tahun 2015) dan umumnya akan berakhir pada tahun 2040-an, kecuali Papua Barat dan Nusa Tenggara Barat yang memiliki jendela kesempatan lebih lebar. Di sisi lain, provinsi Nusa Tenggara Timur masih belum tahu kapan akan mendapatkan bonus demografi.

Jika dibandingkan antara hasil proyeksi dengan menggunakan skenario TFR yang ditahan 2,1 dan skenario mengikuti tren, skenario tren menghasilkan periode bonus demografi yang lebih panjang. Hal ini dikarenakan dengan menjaga TFR di *replacement rate* 2,1 akan menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah anak dan jumlah lanjut usia sebagai akibat meningkatnya *life expectancy*, sementara jumlah penduduk usia produktif tidak berubah.

Angka Ketergantungan Propinsi dengan Transisi Kependudukan Lanjut (*Late Transition*)

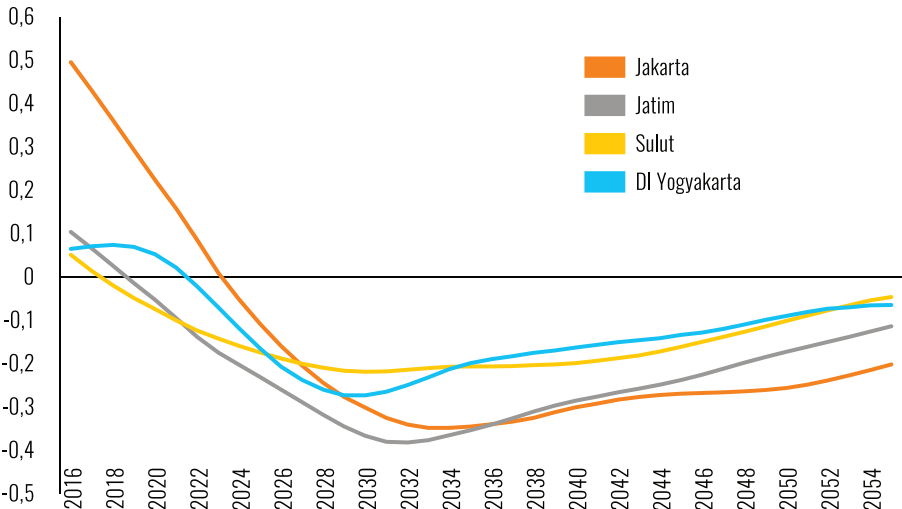
Provinsi	Tahun Puncak		Tahun Puncak		Tahun Berakhir
	2010-2035	2015-2045 (Trend/TFR 2,1)	2010-2035	2015-2045 (Trend/TFR 2,1)	2015-2045 (Trend/TFR 2,1)
DKI Jakarta	2015	2016/2015	46,88	38,2/38,23	2042/2040
DIY	2018	2018/2018	50,41	43,71/43,69	2044/2034
Jawa Timur	2015	2016/2015	51,37	42,24/42,24	2034/2032
Sulawesi Utara	2015	2015/2015	50,88	44,86/44,86	2035/2033

Propinsi dengan kategori transisi lanjut telah melewati masa puncak bonus demografi dengan angka ketergantungan paling rendah. Melalui proyeksi terbaru, tidak terjadi pergeseran puncak tersebut. Namun Angka Ketergantungan terlihat jauh lebih kecil. Hal ini menunjukkan potensi bonus demografi relatif berkualitas, dengan jumlah penduduk usia produktif lebih banyak atau angka. Perbedaan Angka Ketergantungan dan tahun puncak antara dua skenario proyeksi 2015-2045 tidak banyak berbeda. Namun kedua skenario memperlihatkan akhir periode relatif sangat berbeda. Hal ini tentunya disebabkan oleh berkurangnya beban jumlah penduduk usia muda karena jumlah anak yang berkurang, dibandingkan dengan skenario TFR 2,1. Untuk itu, provinsi pada kategori *late transition* ini secara umum masih memiliki waktu untuk menikmati puncak penduduk usia produktif. Besaran kontribusi dapat dilihat dari *Economic Support Ratio*. Berdasarkan proyeksi dengan skenario TFR 2,1, DKI Jakarta memiliki potensi bonus demografi pertama yang paling tinggi dengan rata-rata 0,08% pada periode 2020-2024. Sementara provinsi lain sudah tidak mendapatkan bonus demografi pertama.

Pertumbuhan *Economic Support Ratio* (*First Demographic Dividend*)
Untuk Provinsi dengan *Late Transition*



DKI Jakarta memiliki potensi bonus demografi pertama yang paling tinggi dengan rata-rata 0,08% pada periode 2020-2024



Provinsi dengan kategori masa transisi awal mempunyai Angka Ketergantungan terendah pada tahun yang hampir sama untuk setiap data proyeksi, proyeksi 201-2035 maupun kedua skenario pada proyeksi 2015-2045. Yang agak berbeda adalah Angka Ketergantungan, dengan nilai yang lebih rendah sehingga memberikan lebih banyak peluang ataupun potensi terhadap pertumbuhan.

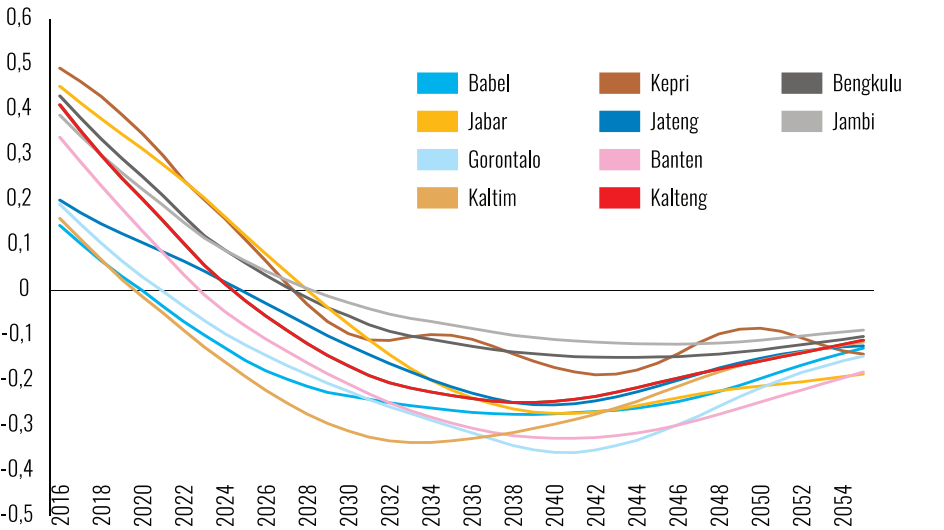


Kepulauan Riau dan Jawa Barat berpotensi mendapatkan bonus demografi pertama yang tinggi.

Angka Ketergantungan Provinsi Kategori Masa Transisi Awal

Provinsi	Tahun Puncak		Tahun Puncak		Tahun Berakhir
	2010-2035	2015-2045 (Trend/TFR 2,1)	2010-2035	2015-2045 (Trend/TFR 2,1)	2015-2045 (Trend/TFR 2,1)
Jawa Tengah	2021	2022/2021	50,98	46,04/46,02	2035/2033
Jawa Barat	2023	2025/2023	47,73	44,06/44,12	2044/2039
Banten	2022	2023/2022	47,14	43,59/43,597	2043/2040
Bangka Belitung	2020	2021/2021	47,59	44,45/44,41	2044/2040
Bengkulu	2020	2020/2020	47,36	44,61/44,56	2046/2041
Jambi	2020	2020/2020	48,41	45,06/45,02	2043/2038
Kalimantan Timur	2019	2019/2019	47,20	41,17/41,13	2043/2039
Kalimantan Selatan	2015	2015/2015	50,83	47,35/47,35	2036/2033
Kalimantan Tengah	2021	2021/2021	46,21	41,85/41,8	2045/2041
Gorontalo	2022	2023/2022	47,32	44,07/44,05	2044/2040
Kepulauan Riau	2025	2026/2025	43,42	41,31/40,91	--

Pertumbuhan *Economic Support Ratio* (*First Demographic Dividend*)
Untuk Provinsi dengan Transisi Awal



Angka Ketergantungan Provinsi Kategori Masa Pre-Transisi

Pada provinsi dengan *early-transition* mempunyai rentang panjang antar provinsi pada tahun akhir bonus demografi pertama. Beberapa provinsi berakhir lebih awal, yaitu sekitar 2030-an, sementara yang lain sekitar 2040-an.

“With the continuing shift in population structures, an issue that emerges is how to turn elderly people into assets rather burdens within the system“

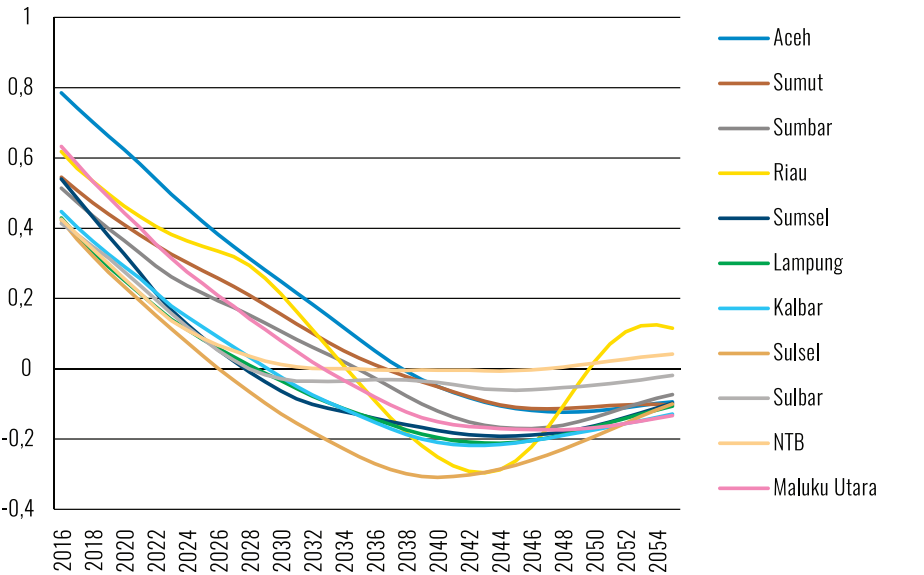
Maliki, implication of the demographic dividend on government policy in Indonesia, 2016.

Provinsi	Tahun Puncak		Tahun Puncak		Tahun Berakhir
	2010-2035	2015-2045 (Trend/TFR 2,1)	2010-2035	2015-2045 (Trend/TFR 2,1)	2015-2045 (Trend/TFR 2,1)
Aceh	2029	2032/2029	48,53	47,18/47,77	2046/2040
Sumatera Utara	2027	2029/2027	50,13	48,54/48,93	2039/2034
Sumatera Barat	2032	2034/2032	49,34	48,32/49,34	2043/2037
Riau	2029	2029/2029	46,48	43,72/44,13	2044/2041
Sumatara Selatan	2020	2019/2020	50,22	47,92/47,87	2039/2034
Lampung	2023	2023/2023	48,31	45,65/45,65	2042/2038
Kalimantan Barat	2024	2026/2024	47,14	45,25/45,36	2046/2042
Sulawesi Selatan	2021	2019/2021	49,23	47,92/45,74	2039/2036
Sulawesi Barat	2029	2031/2029	48,57	46,79/47,35	2046/2038
NTB	2033	2036/2033	47,99	46,79/47,90	-
Maluku Utara	2027	2029/2027	48,54	46,67/46,97	2046/2039

Pertumbuhan *Economic Support Ratio (First Demographic Dividend)* Untuk Provinsi pada Pre-transisi

Angka ketergantungan untuk provinsi dengan kategori pre-transisi ini secara rata-rata lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi pada kategori sebelumnya. Provinsi ini relatif lebih muda, namun sebagian provinsi ini memiliki puncak bonus demografi 2019-2020 dengan tahun berakhir cukup panjang.

Kontribusi demografi cukup tinggi di antara pre-transisi provinsi. Provinsi Aceh, Sumut, dan Sumbar berpotensi untuk mendapatkan bonus demografi pertama rata-rata memberikan kontribusi lebih besar dari 0,3% terhadap pertumbuhan ekonomi. Bonus demografi pada kategori ini juga relatif masih panjang. Oleh karena itu, masa persiapan dapat dilakukan menjadi lebih matang untuk meraih lebih baik lagi keuntungan demografi tersebut.



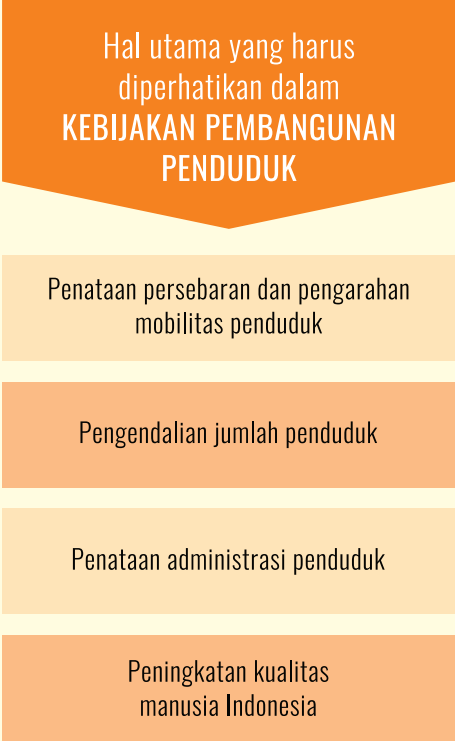
A. STRATEGI UTAMA UNTUK MEMETIK DAN MEMPERPANJANG BONUS DEMOGRAFI

Strategi utama yang dibutuhkan untuk dapat memetik bonus demografi adalah mengatasi penduduk usia muda *Not in Education, Employment, or Training* (NEET), meningkatkan partisipasi kerja wanita, menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, mengembangkan sumber daya manusia, dan literasi keuangan dan investasi. Selain itu, bonus demografi pun tidak terlepas dari tingkat fertilitas, penurunan mortalitas, dan migrasi penduduk. Untuk dapat mencapai struktur penduduk yang diidamkan dengan tingkat ketergantungan yang rendah, perlu adanya komitmen kuat dari pemerintah untuk dapat memenuhi target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs).



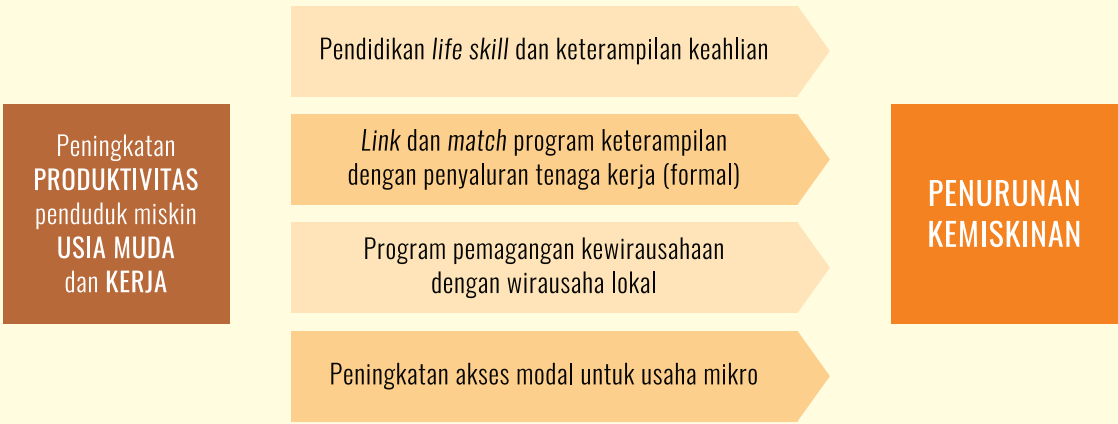
Merujuk pada penjelasan sebelumnya maka kebijakan pembangunan penduduk harus memperhatikan empat hal utama.

- 1 Pengendalian jumlah penduduk yang ditunjang pembangunan keluarga. Jumlah penduduk ke depan perlu seimbang sesuai dengan daya dukung lingkungan. Selain itu, perencanaan jumlah penduduk ke depan perlu mempertimbangkan keseimbangan fiskal yang berkesinambungan.
- 2 Peningkatan kualitas perlu diarahkan untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia dan menjadikan mereka menjadi lebih peka terhadap perubahan teknologi dan kondisi global.
- 3 Penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk sesuai dengan kebutuhan setiap wilayah serta mendukung pembangunan daerah yang berkeadilan dan pembangunan perkotaan berkelanjutan.
- 4 Penataan administrasi penduduk, penataan dan pengelolaan database kependudukan. Sinergi penggunaan data catatan sipil dan pengembangan *database* kependudukan akan menjadi penentu berjalannya kebijakan yang lebih optimal.

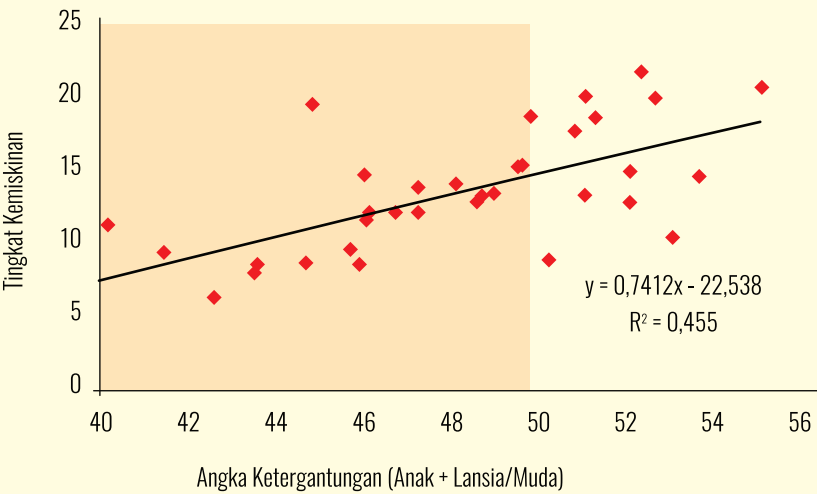


B. BONUS DEMOGRAFI: KESEMPATAN UNTUK KELUAR DARI KEMISKINAN

Pada dasarnya terdapat konsekuensi akibat tingginya pertumbuhan penduduk antara lain: rendahnya pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan ketimpangan, kualitas pendidikan dan kesehatan, ketahanan pangan, lingkungan, dan migrasi. Namun di sisi lain, terdapat peluang pemanfaatan perubahan struktur untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan keluar dari kemiskinan. Semakin banyaknya penduduk usia produktif di antara masyarakat miskin akan berpotensi sebagai “driver” penurunan kemiskinan. Terkait dengan potensi tersebut maka perlu dilakukan strategi utama. Peningkatkan produktivitas penduduk miskin usia muda dan kerja melalui pendidikan *life skill* dan keterampilan keahlian bagi usia muda disertai dengan *link and match* program keterampilan dengan penyaluran tenaga kerja (formal). Selanjutnya, dilaksanakan program pemagangan kewirausahaan dengan wirausaha lokal serta peningkatan akses modal untuk usaha mikro.



Hubungan Linier Angka Ketergantungan dan Tingkat Kemiskinan



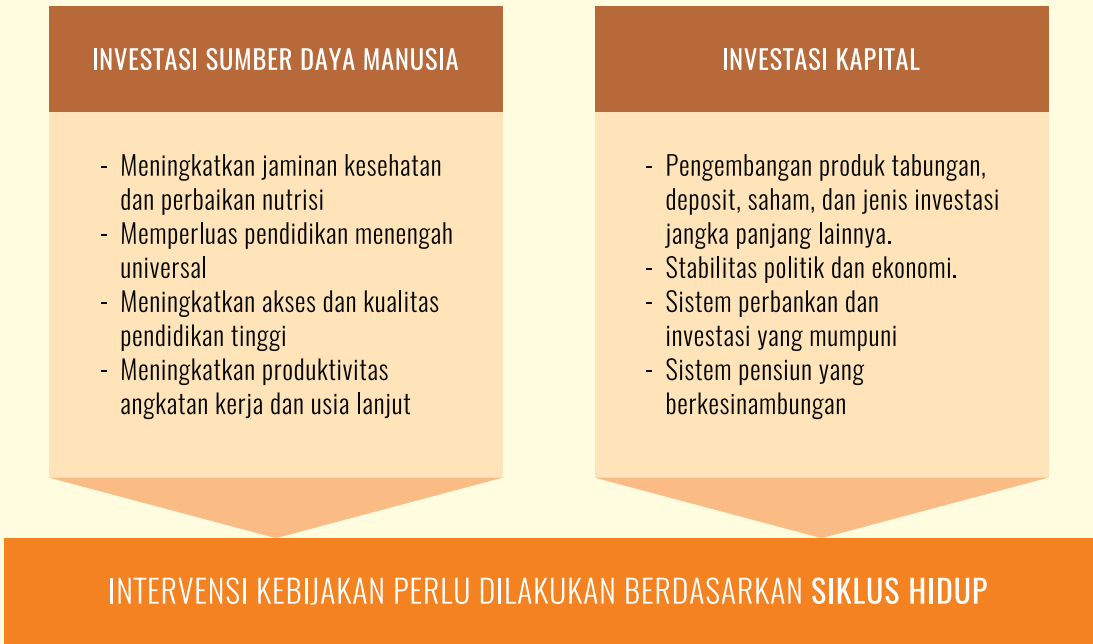
Dalam perlindungan sosial, maka perlu peningkatan asistensi kepesertaan Sistem Jaminan Sosial Nasional Ketenagakerjaan meliputi JKK, JHT, dan JKM. Di sisi usaha mikro kecil dan menengah dilakukan peningkatan partisipasi kerja perempuan dengan keterampilan usaha rumahan disertai peningkatan perlindungan pekerja rumahan. Tidak hanya itu, pemangku kepentingan perlu melaksanakan peningkatan produktivitas pertanian dengan memperkuat jaringan pemasaran produk pertanian.

C. PELUANG DAN PRA-SYARAT DALAM PEMANFAATAN BONUS DEMOGRAFI

Penciptaan landasan ekonomi yang kuat merupakan solusi atas tantangan global yang dihadapi. **Pada first demographic dividend**, dilakukan penciptaan pekerjaan yang berkualitas dalam bentuk industri manufaktur padat pekerja, industri ekonomi kreatif dan berbasis teknologi, serta peningkatan produktivitas pertanian. Hal tersebut membutuhkan dukungan peraturan dan kebijakan sistem pendidikan dan pelatihan vokasi. Dari sisi tenaga kerja maka akan didorong transformasi informal menjadi formal. **Pada periode second demographic dividend**, mendorong pengembangan investasi produktif berupa akumulasi aset sebagai pendorong investasi untuk meningkatkan pertumbuhan. Langkah yang dilakukan melalui penguatan lembaga keuangan dan perluasan cakupan Sistem Jaminan Sosial Nasional yang meliputi Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun.

D. INVESTASI UTAMA YANG DIPERLUKAN DALAM MEMANFAATKAN BONUS DEMOGRAFI

Ada dua investasi utama yang diperlukan dalam memanfaatkan bonus demografi. Investasi sumber daya manusia melalui pendidikan menengah universal yang diperluas serta didukung dengan peningkatan akses dan kualitas pendidikan tinggi. Sementara itu, peningkatan investasi harus didukung dengan pengembangan produk tabungan, deposit, saham, dan jenis investasi jangka panjang lainnya. Diperlukan pula stabilitas politik dan ekonomi, sistem perbankan dan investasi yang mumpuni, serta sistem pensiun yang berkesinambungan. Intervensi kebijakan perlu dilakukan berdasarkan siklus hidup anak-anak > dewasa > orang tua.



E. PENINGKATAN SIKLUS HIDUP DALAM PEMANFAATAN BONUS DEMOGRAFI

Pemanfaatan bonus demografi dapat diupayakan melalui pendekatan siklus hidup. Setiap manusia akan mengalami *fase prenatal, noenatal, infant, early childhood*, anak, remaja, dewasa, dan lansia. Hasil yang diharapkan generasi muda yang sehat dan cerdas sehingga ketika beranjak remaja dapat aktif dan produktif. Pada akhirnya akan tercipta tenaga kerja yang berdaya berdaya saing dan produktif. Selanjutnya dengan mengoptimalkan masa persiapan pensiun maka lansia akan tetap sehat dan produktif.

Kegiatan yang dapat dilakukan dengan pemberian nutrisi yang baik hingga *fase infant*. Hal ini selaras dengan pengembangan usia dini hingga memasuki fase anak. Pendidikan, pengembangan keterampilan, dan upaya kewirausahaan dijalankan dari fase anak hingga lansia. Pendidikan keuangan atau *financial literacy* efek jika seseorang telah berada akhir fase remaja hingga akhir lansia. Hal yang paling utama, pendidikan norma dan *life-skill*, kesehatan dan nutrisi, kelanjutusiaan berbasis keluarga dan komunitas akan dilaksanakan sepanjang periode hidup.

F. MEMETIK DAN MEMERPANJANG BONUS DEMOGRAFI

Untuk dapat memetik bonus demografi diperlukan beberapa strategi umum. Pertama, penduduk usia muda yang tidak termasuk ke dalam kategori sedang mengenyam pendidikan, bekerja ataupun mengikuti pelatihan yang biasa disebut dengan NEET (*Not in Education, Employment or Training*) harus dikurangi. Kedua, perlu ditingkatkannya partisipasi kerja wanita. Ketiga, perlu diciptakannya lapangan kerja yang berkualitas. Keempat, sumber daya manusia harus terus menerus dikembangkan dan yang terakhir adalah literasi sistem keuangan dan investasi.

Kemudian, strategi khusus pun perlu diterapkan dalam rangka memperpanjang bonus demografi. Pertumbuhan penduduk harus dijaga keseimbangannya dengan meningkatkan tingkat kesehatan yang prima. Produktivitas penduduk usia produktif dan lanjut usia perlu ditingkatkan melalui perluasan kewirausahaan. Selain itu, pemerintah pun perlu mendukung mobilisasi penduduk yang menunjang pemerataan antar wilayah, memperluas adaptasi dan penguasaan teknologi, serta meningkatkan cakupan jaminan sosial agar menyeluruh dan komprehensif.

Dalam rangka mengoptimalisasi bonus demografi, perekonomian yang berkualitas perlu dibangun. Selain itu, sumber daya manusia sebagai modal pembangunan perlu diperkuat. Hal ini dapat dilakukan melalui pembangunan pendidikan dan pelatihan berkualitas yang memacu inovasi, peningkatan keterampilan yang mudah beradaptasi dengan kemajuan teknologi, pengembangan *life-skill* terutama bagi tenaga kerja muda, pengembangan kewirausahaan dan pendidikan berkelanjutan terutama bagi tenaga kerja usia lanjut, dan peningkatan kesehatan penduduk. Kemudian, pertumbuhan penduduk yang seimbang pun perlu dijaga. Hal terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah melindungi seluruh penduduk Indonesia dengan Sistem Jaminan Sosial Nasional.

G. LANGKAH STRATEGIS PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA

Penciptaan lapangan kerja merupakan salah satu kunci utama dalam rangka mendukung pemanfaatan bonus demografi. Lapangan kerja yang berkualitas dapat memberikan peluang bagi usia produktif agar dapat berkontribusi secara maksimal dalam pembangunan ekonomi. Untuk itu, langkah strategis perlu diambil dalam rangka menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Investasi terutama yang banyak menciptakan lapangan kerja formal perlu ditingkatkan. Hal ini dapat dilakukan dengan prioritas pengembangan industri manufaktur padat pekerja, penguatan infrastruktur dan konektivitas pendukung investasi, dan peningkatan iklim investasi di pusat dan daerah yang salah satunya dapat dilakukan dengan deregulasi peraturan dan penguatan PTSP daerah dan standardisasi perizinan. Selanjutnya, program pemerintah yang menciptakan lapangan kerja perlu diperbanyak. Hal ini dapat dilakukan diantaranya dengan mengembangkan infrastruktur skala kecil dan menengah serta meningkatkan kesempatan wirausaha. Hambatan di pasar kerja juga perlu dikurangi dengan menciptakan iklim kerja yang kondusif melalui harmonisasi UU Ketenagakerjaan dengan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional dan memperkuat sistem pengawasan ketenagakerjaan.

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi merupakan penggerak ekonomi dan menjadi penunjang perluasan kesempatan kerja dengan mencetak wirausaha baru yang inovatif dan berdaya saing. UMKM dan koperasi memerlukan dukungan penuh, oleh karena itu, perlu strategi yang diterapkan seperti meningkatkan akses pembiayaan untuk usaha mikro dan kecil, meningkatkan nilai tambah dan perluasan akses pemasaran, dan meningkatkan kemudahan, kepastian, dan perlindungan usaha.

Di sisi lain, lapangan kerja yang berkualitas perlu didukung oleh pekerja yang memiliki keterampilan. Tiga strategi utama dalam peningkatan keterampilan pekerja adalah pengembangan kurikulum pelatihan untuk meningkatkan soft skill dan hard skill, promosi pelatihan kejuruan berbasis kompetensi dan program magang, serta peningkatan kualifikasi, persyaratan dan pengoperasian lembaga sertifikasi profesional di seluruh negeri. Dengan meningkatnya lapangan kerja berkualitas yang didukung oleh pekerja terampil, bonus demografi akan memberikan manfaat yang luar biasa bagi Indonesia.

H. PEMANFAATAN BONUS DEMOGRAFI DALAM REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Di periode yang sama, terjadi teknologi disruptif yang tidak dapat dihindari. Dikenal dengan istilah Revolusi Industri 4.0, perubahan teknologi telah mengubah tata cara dan pola kerja manusia. Teknologi digital dianggap berpotensi mengganggu. Banyak pekerjaan yang berpotensi diganti atau menggunakan otomatisasi termasuk digantikan oleh mesin berteknologi tinggi. Namun demikian teknologi digital juga dapat merangsang produktivitas ekonomi. Adaptasi teknologi memberikan kesempatan kerja yang lebih luas dan fleksibel. Selanjutnya akan terjadi peningkatan produktivitas dan efisiensi angkatan kerja dalam proses produksi modern. Hasil yang diciptakan dalam proses tersebut akan memberikan kemudahan dan kenyamanan konsumen.

Perubahan struktur penduduk merupakan momentum bagi kita untuk dapat menjadi negara besar. Hal ini perlu diantisipasi dengan kebijakan yang tepat. Dalam jangka pendek, perlu memanfaatkan kenaikan jumlah penduduk usia produktif melalui peningkatan produksi dan konsumsi karena hanya terjadi pada saat terjadinya perubahan struktur penduduk. Jika ditindaklanjuti segera, secara langsung dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pemanfaatan kenaikan akumulasi aset yang dapat menjadi investasi produktif merupakan kebijakan yang dapat diambil dalam jangka panjang. Tingginya investasi oleh penduduk usia produktif akan terbawa terus ke depan. Kedua kebijakan tersebut membutuhkan dua syarat utama: (1) Peningkatan produktivitas dan (2) iklim investasi dan lembaga keuangan.

Kebijakan lain yang perlu diperhatikan guna mendukung bonus demografi terkait dengan penguatan regulasi dan peningkatan infrastruktur. Regulasi diperlukan untuk mendukung perluasan kesempatan kerja yang baik dan peningkatan partisipasi perempuan dalam tenaga kerja menuju sinergi arah kebijakan industri iklim ketenagakerjaan yang kondusif. Selain itu iklim investasi dan promosi ekspor membutuhkan pula regulasi.

Dari penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan pengembangan sumber daya manusia adalah kunci untuk memanfaatkan demografi dividen. Pengembangan sumber daya manusia perlu dibangun secara utuh, mulai dari awal sampai akhir berdasarkan siklus hidup. Kualitas pendidikan dan kesehatan harus dijamin sepenuhnya melalui peningkatan kualitas guru dan fasilitas kesehatan masyarakat. Peningkatan keahlian dan kewirausahaan juga harus mendapat perhatian. Konsep pemagangan sebaiknya tidak hanya untuk menyiapkan calon pekerja tetapi juga dirancang untuk mencetak wirausaha baru.

TECHNICAL AND VOCATIONAL
EDUCATION AND TRAINING
TVET NASIONAL

Standar kompetensi dibuat oleh Dunia Usaha atau Dunia Industri (DU/DI)
Program Diklat berbasis kompetensi dikembangkan oleh lembaga diklat dan
sertifikasi kompetensi dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi profesi

PIHAK YANG
TERLIBAT



PILAR 1 STANDAR KOMPETENSI - Modul dan Kurikulum	Asosiasi Industri Asosiasi Profesi
PILAR 2 PROGRAM DIKTAT BERBASIS KOMPETENSI PEMAGANGAN BERBASIS KOMPETENSI	LEMBAGA DIKLAT Instruktur Tenaga Pengajar/Guru Koordinator dan Pengurus Lembaga Diklat
PILAR 3 SERTIFIKASI KOMPETENSI	Lembaga Sertifikasi Profesi

PENDUDUK SEBAGAI MODAL PEMBANGUNAN

Penanggungjawab

Prof. Bambang P.S. Brodjonegoro, Ph.D

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas

Pengarah

Pungky Sumadi

Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Tim Penyusun

Maliki

Hariyadi

Citra Kumala

Dharendra Wardhana

Rasmita Yulia Mutiarasari

Alifia Oktrina Fayardi

Chaeruniza Fitriyani

Yogi Yunianto

Utin Kiswanti

Adelita

Ekaning

Chaerul Rijal

Ucapan Terima Kasih

Nurma Midayanti, BPS

Widaryatmo, BPS

Edi Setiawan, BPS

Desain

Anis Ahmad

Kontak

Direktorat Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial

Kedeputian Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS

Jl. Taman Surapati 2 Jakarta

Gedung Madiun Lantai 6

